

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Beberapa tahapan telah dilakukan oleh peneliti dalam rangka menjawab tujuan penulisan yang telah diungkapkan pada bagian pendahuluan. Melalui tahapan tersebut, peneliti menemukan benang merah yang terkait antara masing-masing tahap analisis. Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan dengan menggunakan perangkat framing model Pan dan Kosiscki pada level teks dan berpedoman pada teori proses framing Dietram A Scheufele di level konteks, peneliti menemukan frame SKH *Jurnal Nasional* yang terkait dengan peristiwa pengusulan hak angket kasus Bank Century oleh beberapa anggota DPR.

Berbicara mengenai pengusulan hak angket kasus Bank Century tidak bisa terlepas dari kasus Bank Century itu sendiri. Sehingga pembingkai mengenai peristiwa ini juga terkait dengan pandangan dari SKH *Jurnal Nasional* terhadap kasus Bank Century. **Frame pertama** yang peneliti temukan adalah *Jurnal Nasional* **membingkai kebijakan bailout Bank Century merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menyelamatkan perekonomian Nasional**. Dalam teks berita hal ini ditekankan dengan pernyataan dari Wapres Boediono yang menjelaskan

mengenai latar belakang diambilnya kebijakan *bailout* Bank Century tersebut (teks berita berjudul “Pemerintah Siap Jernihkan Polemik Century” dan “Audit Century Selesai Pekan Depan”). Kondisi keuangan dunia yang saat itu sedang dilanda krisis keuangan global merupakan alasan yang dipaparkan oleh Boediono dalam pengambilan kebijakan tersebut. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga turut memberikan pandangannya mengenai kasus ini (teks berita berjudul “Presiden Ingin Kasus Century Dibuka” dan “SBY Sambut Angket Century”). Namun pernyataan presiden lebih merupakan himbauan dan langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus ini kepada pihak-pihak terkait.

Dalam wawancara dengan awak redaksi Jurnal Nasional, melalui Jan Prince Permata, redaktur halaman satu, mereka mengungkapkan bahwa **kebijakan *bailout* Bank Century ini merupakan kebijakan yang tepat demi penyelamatan perekonomian nasional.** Pandangan SKH *Jurnal Nasional* mengenai kasus Bank Century ini tentunya merupakan hasil dari proses *frame building*. Dalam proses tersebut terdapat beberapa elemen yang mempengaruhi bentukan dari frame media. Pada konteks SKH *Jurnal Nasional*, faktor latar belakang dan ideologi menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap bentuk dari frame media. Latar belakang **SKH *Jurnal Nasional* memiliki hubungan yang dekat dengan Presiden SBY.** Relasi ini tumbuh dalam proses pendirian SKH *Jurnal Nasional* yang memang bertujuan untuk membela kebijakan dari masa pemerintahan Presiden SBY. Kebijakan Bank Century merupakan salah satu kebijakan yang diputuskan oleh Presiden SBY sehingga, surat kabar ini secara konsisten membela kebijakan tersebut.

Mengenai hubungannya dengan peristiwa pengusulan hak angket kasus Bank Century oleh beberapa anggota DPR, tentunya pembingkai SKH *Jurnal Nasional* juga didasari atas bingkai mereka terhadap kasus Bank Century. **Frame kedua** yang peneliti temukan adalah *Jurnal Nasional* membingkai peristiwa pengusulan hak angket kasus Bank Century memiliki motif politik yang berdampak terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Frame ini terlihat jelas pada teks berita pertama yang berjudul “Demokrat : Usul Hak Angket Century Terburu-buru”, beberapa penekanan kata dalam lantunan tertentu dilakukan. Seperti pada lantunan dari Anas Urbaningrum yang merupakan pelantun wacana utama dari teks berita ini. Penggunaan frasa atau kata seperti “tendensi politik”, “politisasi” dan “politis” memberikan penekanan pada gagasan bahwa pengusulan hak angket kasus Bank Century memiliki motif politik. Sedangkan dalam level konteks, melalui Friederich Batari mengungkapkan,

“Sebuah gerakan politik tentu saja ada banyak varian, banyak motif di balik gerakan itu, ada mungkin saja melihat karena menurut pendapat dia itu salah karena itu perlu dilakukan hak dalam konteks tidak terpengaruh dan ada juga yang menumpang hak angket itu untuk gerakan politik menggulingkan rezim atau paling tidak ada posisi tertentu karena melibatkan ada pejabat yang terlibat menduduki posisi-posisi politik tertentu.” (Frederich Batari, wartawan. Wawancara langsung tanggal 19 Mei 2010)

Pihak *Jurnal Nasional* meyakini bahwa setiap gerakan politik memiliki berbagai macam motif. Pengusulan hak angket merupakan salah satu gerakan politik yang disinyalir oleh SKH *Jurnal Nasional* memiliki motif politik tertentu. Motif politik ini tentunya berdampak terhadap jalannya pemerintahan Presiden SBY. Dalam

penjelasan mengenai latar belakang pada tahap *frame building*, pendirian SKH *Jurnal Nasional* memiliki tujuan untuk membela kebijakan yang dilakukan oleh SBY. Tentunya dalam peristiwa pengusulan hak angket yang disinyalir memiliki dampak politik cukup besar terhadap pemerintah, SKH *Jurnal Nasional* secara konsisten melakukan pemberitaan dalam upaya untuk membela kebijakan tersebut.

Pembingkaiian SKH *Jurnal Nasional* terhadap peristiwa pengusulan hak angket juga tidak semata-mata seluruhnya dipengaruhi oleh latar belakang dari proses pendirian media ini. Para awak redaksi juga memiliki sikap yang merupakan representasi mereka terhadap tanggungjawab utama jurnalis kepada publik. SKH *Jurnal Nasional* melalui pembedingkaiaannya mengenai peristiwa pengusulan hak angket, juga mengajak publik untuk bisa berpikir jernih dalam menanggapi peristiwa ini. Sebagai surat kabar satu-satunya yang memiliki sikap paling konsisten terkait kasus Bank Century, *Jurnal Nasional* menawarkan pandangan alternatif kepada masyarakat untuk melihat dari sisi yang berbeda terhadap suatu peristiwa khususnya peristiwa politik. Apabila dikaitkan dengan salah satu fungsi normatif pers sebagai anjing penjaga (*watchdog*) yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan, SKH *Jurnal Nasional* memang tidak bisa menjalankan fungsi ini secara penuh, mengingat hubungan atau relasi yang terjalin dengan pihak penguasa di negeri ini. Namun hal ini bisa dikritisi lebih lanjut dengan memandang SKH *Jurnal Nasional* sebagai sebuah penyeimbang, sebab terkadang pihak penguasa juga tidak bisa bekerja secara maksimal apabila selalu mendapat kritik dari media massa. Penguasa terkadang juga perlu mendapatkan pujian atas kinerja mereka untuk membangun

negara. Sehingga pada akhirnya opini publik yang berkembang tidak hanya sekedar mengikuti alur mayoritas pemberitaan media massa yang cenderung mengarah pada kritik atas kebijakan pemerintah. Posisi SKH *Jurnal Nasional* dipandang sebagai penyeimbang atas pemberitaan yang telah berkembang di masyarakat.

## **B. Saran**

Dalam proses penulisan ini, peneliti menyadari masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan. Pada proses analisis teks peneliti mengalami kesulitan dalam menghubungkan kalimat dan kata yang terdapat dalam teks berita, sebab proses ini menuntut tingkat ketelitian dan kecermatan yang tinggi sehingga dapat ditemukan frame media yang sesuai. Selanjutnya dalam proses penggalan data di lapangan, peneliti menemui beberapa kesulitan seperti terbatasnya narasumber yang dapat diwawancarai maupun terbatasnya waktu untuk melakukan wawancara terhadap narasumber oleh karena kesibukan masing-masing. Daftar pertanyaan yang telah peneliti buat tidak seluruhnya dijawab karena keterbatasan waktu. Pada penulisan selanjutnya peneliti menyarankan untuk mempersiapkan teknik atau keterampilan khusus agar membuat suasana wawancara nyaman serta mampu mendorong subyek penulisan memberikan informasi secara lengkap dan terbuka.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan ini hanya melihat peristiwa pengusulan hak angket kasus Bank Century dari satu sisi surat kabar saja, maka akan lebih menarik apabila penulisan selanjutnya dapat membandingkan dengan surat

kabar lainnya seperti *Media Indonesia*, *Suara Karya* maupun *Kompas*. penulisan ini menggunakan perangkat analisis framing ala Pan dan Kosicki pada level teks dan teori proses framing milik Dietram A Scheufele untuk analisis level konteks. Maka pada penulisan selanjutnya penggunaan perangkat analisis framing lainnya seperti model framing milik Gamson & Modigliani, Muray Edelman, atau Robert Entman masih sangat terbuka. Selain itu penulisan mengenai pengusulan hak angket masih bisa dikaji dengan menggunakan metode penulisan lain seperti analisis isi (*content analysis*) maupun analisis wacana (*discourse analysis*).

Untuk pihak SKH *Jurnal Nasional*, peneliti menyarankan agar pihak SKH *Jurnal Nasional* terus melakukan inovasi maupun perubahan-perubahan terhadap pengemasan berita yang dilakukannya. Sebagai koran politik, posisi SKH *Jurnal Nasional* sudah terlanjur terkait dengan Presiden SBY, sehingga koran ini memiliki pangsa pasar yang terbatas. Padahal peneliti melihat potensi besar dari awak redaksi surat kabar ini untuk melakukan kerja jurnalistik yang berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Eriyanto. 2002. *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*.  
Yogyakarta : LKis.

Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Relitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta : Granit.

Herman, Edward .S dan Noam Chomsky. 1994. *Manufacturing Consent : The  
Political Economy of the Mass Media*. London : Vintage.

Moleong, Lexy J. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda.

Mubarok, M. Mufti. 2010. *Membongkar Kotak Hitam Centurygate*. Surabaya :  
Reform Media.

Santana.K, Septian. 2005. *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta. Yayasan Obor.

Sobur, Alex. 2006. *Analisis Teks Media : Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana,  
Analisis Semiotik dan Analisis Framing*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

### JURNAL ILMIAH

Scheufele, Dietram A. 1999. *Journal of Communication*. International  
Communication Association.

### SKRIPSI

Pupung Arifin. 2006. "Profiling Nurdin Halid dalam Editorial (Analisis framing

*pencitraan Nurdin Halid dalam Ulasan Rubril “Catatan Ringan” dan “Usul-Usil” di Tabloid Olahraga Bola terkait dengan Kasus Pidana Ketua Umum PSSI)”, Program Sarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.*

#### **TIDAK DIPUBLIKASIKAN**

Dr. Haryatmoko, SJ. *Demokrasi, Korupsi dan Peluang Etika Politik*. disampaikan dalam acara diskusi ahli *Pemilu 2009, Ideologi Kebangsaan dan Etika Politik* di Padepokan Musa Asy'arie (PADMA), Yogyakarta, 31 Maret 2009.

#### **MEDIA ONLINE**

[http://jurnalnasional.com/?med=about us](http://jurnalnasional.com/?med=about%20us) diakses tanggal 4 September 2009 pukul 21.05 wib.

<http://regional.kompas.com/read/xml/2009/02/14/15074169/Nasabah.Bank.Century.Diduga.Bunuh.Diri> diakses tanggal 19 November 2009 pukul 22.08 wib.

<http://kontan.co.id/read/xml/2009/09/01/KSSK-Sempat-Tidak-Setuju-Dampak-Sistemik-Century.htm> diakses tanggal 19 November 2009 pukul 22.09 wib.

<http://www.lps.go.id/v2/images/publikasi/Press%20Release%20tentang%20Penanganan%20Bank%20Century%20Sesuai%20UU%20LPS.pdf> diakses tanggal 19 November 2009 pukul 22.10 wib.



## **SURAT KABAR**

SKH KOMPAS. *Angket Century Resmi Diusulkan : Pramono dan Anis Teken, Marzuki Menolak*. Jumat, 13 November 2009. hal 1.

SKH KOMPAS. *Angket Century Siap*. Kamis, 12 November 2009. hal 3.

## **MAJALAH**

Arvian, Yandhrie dan Fery Firmansyah. *Menutup Borok Sebelum Merger*. Majalah Tempo edisi 17 Januari 2010. hal 105

Damayanti, Ninin. *Penyambung Lidah Istana*. Majalah Tempo edisi 17 Januari 2010. hal 30.

Damayanti, Ninin. *Ramadhan Pohan : Jangan Berharap Cover Both Side*. Majalah Tempo edisi 17 Januari 2010. hal 31

Dhyatmika, Wahyu dkk. *Fulus Sampoerna dan Koran Istana*. Majalah Tempo edisi 17 Januari 2010. hal 27 .

Maksum, Dwijo. *Dengusan Banteng Ketaton*. Majalah Tempo edisi 29 November 2009. hal 37

Parera, Philipus dan Sunu Dyantoro. *Supaya Barisan Tak Bubar di Jalan*. Majalah Tempo edisi 29 November 2009. hal 36

Parera, Philipus dan Munawwaroh. *Karib Yudhoyono di Kursi Ketua*. Majalah Tempo edisi 13 Desember 2009. hal 32.

## **UNDANG – UNDANG**

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomer 27 Tahun 2009 tentang  
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2009. Jakarta. CV  
Tamita Utama.





**LAMPIRAN**

**Tabel Kecenderungan Narasumber**

No Teks Berita	Narasumber dan jumlah porsi dalam paragraf pada teks berita*						Jumlah paragraf dlm teks berita
	Pemerintah	F PD	Partai Koalisi	Inisiator Hak Angket	Partai Oposisi	Pakar	
1		Anas Urbaningrum (4) Marzuki Alie (4)				Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M Zen (2)	15
2	Boediono (8)	Anas Urbaningrum (3)	Ketua Fraksi PPP, Hasrul Azwar (1) Wakil Ketua MPR dari Fraksi Golkar Hajriyanto Y Tohari (2)	Mahmud Yunus, bendahara Fraksi PPP (1)	Taufik Kiemas (2)		17
3		Marzuki Alie (6) Sutan Batoegana (6)	Andi Rahmat, PKS (1 ) Aburizal Bakrie, Golkar (1)		Gayus Lumbuun (2)	Arbi Sanit (1) Arie Sudjito (5)	22
4		Anas Urbaningrum (4)		Mukhammad Misbakhum, PKS (5)			9

5	Boediono (7)  BPK (3)	Achsanul Qosasi (5)  Ruhut Sitompul (2)  Ramadhan Pohan (1)	Nasir Jamil, PKS (3)  Masayak Johan, PPP (2)			27
6	SBY (tentang kasus Century : 10 tentang Bibit Candra : 10)					20
7	SBY (7)	Anas Urbaningrum (4)  Marzuki Alie (1)	Marwan Jafar, F PKB (3)  Priyo Budi Santono, F Golkar (2)		Pramono Anung, F PDIP (1)	18
8		Anas Urbaningrum (2) Anonim (3)	Anis Matta (1)	Maruara Sirait, F PDIP (1)	Direktur State Budget Watch Ramson Siagian (4)	11

\*)dalam tanda kurung

## SURAT KETERANGAN

009/SK/Red/JN/V/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Pemimpin Redaksi Surat Kabar *Jurnal Nasional* dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Yudit Mahargayaningtiyas**  
N.I.M : 02729/Kom  
Nama Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Nama tersebut di atas adalah benar telah menyelesaikan penelitian skripsi di Surat Kabar *Jurnal Nasional* dengan topik "**Polemik Pengusutan Hak Angket Kasus Bank Century Dalam Surat Kabar Jurnal Nasional**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19 Mei 2010

**Jurnal Nasional**  
jurnal berbasis manfaat

**A. Hamid Dipopramono**  
Wakil Pemimpin Redaksi



### KARAKTER PRODUK

Cerdas, analitis, artistis, etis dan estetik

#### Produk Analitik

Mengulas permasalahan dengan pendekatan in depth analysis, yakni kedalaman, jujur dan aktual, mengedepankan analisis atas berita.

#### Cakupan

Politik, pemerintahan, hukum, pertahanan & keamanan, ekonomi dan bisnis, BUMN & korporasi, olahraga, wisata, seni & budaya, wanita, sains-teknologi & produk, kesehatan hingga gaya hidup.

### PENYAJIAN

#### Konsep

: Analytical Newspaper

Durasi : Pagi, 7 hari dalam seminggu

Kuantitas : 16 halaman reguler

Poin difrensiasi : Memadukan isi serta unsur KEDALAMAN dan AKTUALITAS dari informasi berita.

#### SISIPAN

TOP SOCCER : Suplemen tetap, 8 halaman, paling panas dan mutakhir di dunia sepak bola dan olah raga lainnya: SETIAP HARI.

#### PROFIT

: Suplemen tetap, 8 halaman, berisi ulasan bisnis dan kinerja sektor korporasi, setiap Rabu.

#### JEJARING TAMBAHAN

Jurnal Bogor, Jurnal Sukabumi



### READERSHIP

#### Karakter Pembaca

- Membaca lebih dari satu media cetak.
- Tidak ingin tertinggal informasi penting.
- Biasa menggunakan komputer dan internet.
- Paham fitur komunikasi dan informasi di handphone.
- Sadar perkembangan berita, gaya hidup dan gadget.

Gender : Pria 65%, Wanita 35%

Profesi : Pebisnis, politisi, birokrat, profesional, karyawan, akademisi, mahasiswa, keluarga.

SES : Menengah-Atas, A, B

Pendidikan : SMA, S1, S2, S3

Usia : 20-60 tahun

Gaya hidup : Agropolis, metropolis dan megalopolis

### TIRAS & EDAR

#### Tiras

95.000 eksemplar, 65% di Jabodetabek

#### Wilayah Edar

Perkotaan di Batam, Medan, Palembang, Lampung, Jabodetabek, Bandung, Cirebon, Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Balikpapan dan Makassar.

### UKURAN BIDANG CETAK



### UMUM

Harian umum JURNAL NASIONAL terbit sejak 1 Juni 2006. Mobile newspaper pertama di Indonesia yang memadukan surat kabar dan layanan informasi aktual melalui fasilitas GPRS pada ponsel.

#### Visi

Suratkabar berbasis jurnalisme pencerahan terdepan di Indonesia 2014.

#### Misi

- Menegakkan fungsi informasi, Edukasi, re-kreasi dan kontrol sosial
- Mewartakan fakta dan peristiwa secara obyektif dan tanpa prasangka
- Menegakkan cover both side dalam seluruh aspek pemberitaan
- Menyajikan informasi edukatif dan mengembangkan optimisme
- Mengembangkan wawasan pembaca sebagai bagian dari proses perubahan dan pembaruan bangsa
- Menegakkan demokrasi berbudaya secara kreatif berdasarkan etika.
- Menguatkan nilai ekonomi media massa

# Demokrat: Usul Angket Century Terburu-buru

Jakarta | Jurnal Nasional

FRAKSI Partai Demokrat DPR RI menilai usulan hak angket Bank Century terburu-buru dan belum memiliki dasar hukum. Fraksi terbesar di DPR ini melihat tendensi politik lebih menonjol dalam usul hak angket itu.

"Bukankah audit BPK belum selesai? Fraksi Partai Demokrat konsisten dengan penegakan hukum melalui jalur hukum, bukan dengan jalur nonhukum. Kami tidak setuju dengan politisasi," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada *Jurnal Nasional*, Kamis (12/11).

Meski begitu, Anas menilai usulan hak angket itu biasa sebagai hak dewan, dan tidak perlu dikhawatirkan. Menurut dia, fraksi-fraksi partai politik koalisi sama sikapnya dengan Fraksi Partai Demokrat, yakni menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kalau ada anggota fraksinya yang ikut mengusulkan hak

---

**USULAN HAK  
ANGKET ITU  
BIASA SEBAGAI  
HAK DEWAN,  
DAN TIDAK  
PERLU DIKHA-  
WATIRKAN.**

---

angket itu urusan internal masing-masing fraksi.

"Kalau Fraksi Partai Demokrat para anggotanya sejalan dengan kebijakan fraksi. FPD menunggu hasil audit BPK sehingga perkaranya menjadi terang benderang. Apakah ada penyimpangan, siapa yang menyimpang, apakah ada aliran dana ilegal, kita tunggu hasil auditnya," kata Anas.

---

**Bersambung ke hal 7**



## Demokrat: Usul Angket Century Terburu-buru

(sambungan dari halaman 1)

Anas mengatakan, Fraksi Partai Demokrat berpendirian bahwa siapa pun yang bersalah berdasarkan hasil audit, harus mendapatkan hukuman yang adil, tanpa kecuali. "Kami ingin keadilan ditegakkan, tetapi tidak dengan jalan politisasi."

Berkas surat usulan hak angket kemarin disampaikan oleh perwakilan dari tujuh fraksi kepada Ketua DPR Marzuki Alie, didampingi dua wakilnya yakni Anis Matta (Fraksi PKS) dan Pramono Anung (Fraksi PDIP). Dua Wakil Ketua DPR lainnya, Priyo Budi Santoso (Fraksi Partai Golkar) dan Marwoto Mintohardjo (Fraksi PAN) tidak hadir.

Sebelum menyampaikan usulan hak angket Bank Century, anggota Fraksi PDIP Maruar Sirait membacakan isi surat usulan tersebut di hadapan pimpinan DPR dan sebagian anggota DPR yang menjadi pengusul hak angket.

Sebanyak 138 anggota DPR telah menandatangani usul hak angket, terdiri atas 80 anggota Fraksi PDIP, 24 anggota Fraksi Golkar, 14 anggota Fraksi Hanura, delapan anggota Fraksi Gerindra, delapan anggota Fraksi PKS, tiga anggota Fraksi PAN, dan satu anggota Fraksi PPP.

Ketua DPR Marzuki Alie belum mau menandatangani usul hak angket Bank Century dengan pertimbangan masih menunggu laporan akhir BPK.

"Hak angket Bank Century ini diusulkan oleh sekitar 140 anggota DPR, masih ada sekitar 400 anggota DPR lainnya yang belum menandatangani. Sikap saya seperti 400 anggo-

ta DPR lainnya," kata Marzuki Alie ketika menerima berkas usul hak angket seperti dikutip *Antara*.

Marzuki mengatakan, dukungan terhadap hak angket adalah komitmen pribadi dan fraksi. Sikap Fraksi Partai Demokrat DPR masih menunggu laporan akhir hasil audit BPK seperti sikap anggota DPR lainnya.

Sebagai Ketua DPR, Marzuki menghargai penggunaan hak angket oleh 138 anggota DPR yang mengajukan usulan hak angket kasus Bank Century.

Saat menyampaikan berkas usul hak angket kasus Bank Century, para pengusul meminta dua Wakil Ketua DPR yakni Anis Matta dan Pramono Anung turut menandatangani formulir hak angket. Keduanya kemudian menandatangani.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M. Zen memandang perlunya ketegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengungkap kasus Bank Century. Patra mengatakan pernyataan Presiden kepada publik mengenai kasus aliran dana Bank Century ini diperlukan untuk menjawab sakwasangka yang berkembang dalam masyarakat.

"Berdasarkan UN *Convention Against Corruption* (UNCAC), bila berkaitan dengan penyalahgunaan, ada kaitan dengan dugaan tindak pidana, maka semua keuangan publik harus dipertanggungjawabkan," katanya di kantor YLBHI Jakarta, Kamis petang.

■ Friederich Batari/  
Widyasari

# Pemerintah Siap Jernihkan Polemik Century

Jakarta | Jurnal Nasional

PEMERINTAH siap memberikan informasi untuk menjernihkan polemik seputar pencairan dana talangan (*bail out*) Bank Century sebesar Rp6,7 triliun. "Apa pun, informasi yang diperlukan untuk pencerahan masyarakat akan kita berikan. Jadi masyarakat tak perlu bertanya-tanya lagi biar jelas dan kemudian bisa fokus bekerja lagi," kata Wakil Presiden Boediono kepada pers di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (13/11).

Wakil Presiden menjelaskan pemerintah ingin persoalan Bank Century dapat terselesaikan dengan jernih di masyarakat. Jangan lagi perhatian masyarakat tersita pada persoalan tersebut. Diharapkan masyarakat tenang dan dapat menaruh kembali perhatiannya pada kegiatan-kegiatan yang produktif.

*Bail out* Bank Century, kata Boediono, pada dasarnya diputuskan Bank Indonesia (BI) kala itu untuk menyelamatkan sistem perbankan nasional dari krisis keuangan global. Saat memutuskan *bail out*, kata Boediono, BI sama sekali tidak mengetahui ada *fraud* atau persoalan di Bank Century termasuk keluarnya kebijakan



Boediono

fasilitas pembiayaan jangka pendek (FPJP) oleh BI yang saat itu didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).

Saat itu bank-bank nasional, menengah dan kecil mengalami pemburukan pendanaan dari pihak ketiga, penurunan kualitas aset, turunnya nilai *paper* yang dipegang oleh bank, serta anjloknya nilai surat utang negara.

Kondisi ini pulalah yang membuat BI mengambil kebijakan menurunkan rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) bank dari 8 persen menjadi nol persen.

---

Bersambung ke hal 7

## Pemerintah Siap Jernihkan Polemik Century

(sambungan dari halaman 1)

Kebijakan perubahan CAR ini sama sekali bukan didasarkan pada persoalan yang sedang dihadapi Bank Century semata kala itu. BI pun sama sekali tidak merekayasa proses keluarnya *bail out* Bank Century.

Terhadap usul hak angket soal Century yang ditandatangani 139 anggota DPR, Boediono menilai hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. "Ini (hak angket) saya kira wajar saja dan silakan saja. Saya *welcome* saja apa pun yang diputuskan oleh dewan," kata Boediono.

Wakil Presiden menegaskan bahwa sejak kampanye pilpres pasangan SBY-Boediono memiliki komitmen untuk pemerintahan yang bersih. "Komitmen pemerintahan yang bersih, yang obyektif, yang melayani rakyat. Apa pun kita tunduk pada hukum," kata Wapres.

### Disponsori Golkar

Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Taufik Kiemas mengungkapkan, sponsor hak angket Bank Century adalah Partai Golkar. PDIP menurutnya hanya menjadi pengikut apa yang telah diupayakan Partai Golkar.

"Walaupun kesannya kami yang mengusung dari awal penggunaan hak angket ini namun sebenarnya sponсорnya Golkar. Golkar yang pertama kali usul. PDIP menyusul belakangan," ujar Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/11).

Sementara itu, inisiator hak angket, Mahmud Yunus mengaku optimistis usulan tersebut akan digolkan. Sebab, tujuan hak angket bukan untuk menjatuhkan presiden. "Salah satu tujuan hak angket adalah untuk mengetahui transparansi aliran dana sebesar Rp6,7 triliun yang digelon-

torkan itu. Angka tersebut bukan jumlah yang sedikit," kata Bendahara Fraksi PPP itu.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, sejauh ini pihaknya telah berkomunikasi dengan fraksi-fraksi dari partai koalisi. "Sikapnya sama dengan FPD, yakni menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan," katanya.

Namun, lanjutnya, bila ada anggota fraksi yang ikut mengusulkan, hal itu urusan internal masing-masing fraksi. Dia menegaskan, para anggota FPD sejalan dengan kebijakan fraksi. "Kami yakin, etika dan tatakrama berkoalisi tetap dianggap penting. FPD menunggu hasil audit BPK, sehingga perkaranya menjadi terang-benderang. Apakah ada penyimpangan, siapa yang menyimpang, apakah ada aliran dana ilegal. Kita tunggu hasil auditnya," kata Anas.

Menurut Anas, pihaknya

melihat usulan hak angket sebagai sesuatu yang biasa saja. Bahkan menurutnya, hal itu adalah hak dewan yang lazim. Karena itu, dia menganggap tidak ada yang perlu dikhawatirkan. "FPD hanya menilai, usulan angket jelas terburu-buru dan belum ada dasarnya. Bukankah audit belum selesai? Tendensi politik lebih menonjol. FPD tetap konsisten dengan penegakan hukum, namun melalui jalur hukum dan bukan dengan jalur nonhukum," katanya.

Ketua Fraksi PPP, Hasrul Azwar mengatakan, fraksinya sangat menjunjung tinggi hak-hak anggota dewan dalam pengusulan pansus hak angket, tetapi sikap dari fraksinya masih menunggu hasil audit dari BPK. "Mengapa PPP secara fraksi belum ikut tanda tangan angket, karena kami menghormati hasil rekomendasi Komisi XI periode yang lalu untuk meminta BPK

mengaudit kasus ini," katanya.

### Terlalu Dini

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Golkar, Hajriyanto Y Tohari menilai usulan hak angket Bank Century terlalu pagi jika disimpulkan mengarah pada upaya pemakzulan presiden. Namun yang pasti penggunaan hak angket ini merupakan hak dewan yang diberikan konstitusi dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dewan terutama dalam hal kebijakan pemerintah yang memiliki dampak besar ke masyarakat.

"Karena itu anggota DPR berhak mengajukan hak angket," katanya di sela-sela dialog nasional kader politik Muhammadiyah bertajuk "Penguatan Integritas Berpolitik dan Jaringan Kader Persyarikatan" di kantor PP Muhammadiyah, Jumat malam.

■ Arjuna Al Ichsan/Rhama Deny/Friederich Batari

## Proses Hak Angket Century Masih Panjang

Jakarta | Jurnal Nasional

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Ali mengatakan pengajuan hak angket kasus Bank Century memerlukan waktu dan proses panjang, dimulai dari pengusul hingga dibentuk panitia khusus. Apalagi, saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang mengaudit kasus tersebut.

"Saya menginginkan kita bisa bersabar untuk menunggu hasil audit BPK, *toh* menurut BPK laporan itu akan diserahkan 18 November mendatang. Itu kan tinggal beberapa hari lagi,"

katanya. Menurut dia, DPR memberikan tenggat kepada BPK untuk menyerahkan laporan itu hingga 20 November.

Sebanyak 139 anggota DPR dari delapan fraksi, kecuali Fraksi Partai Demokrat, telah mengusulkan penggunaan hak angket atas kasus Bank Century.

Menanggapi usulan itu, Ketua DPR mengatakan para pengusul masih bersifat perorangan, belum mewakili fraksi.

---

Bersambung ke hal 7

## Proses Hak Angket Century Masih Panjang

(sambungan dari halaman 1)

"Nanti dalam proses selanjutnya ketika sudah masuk ke dalam Badan Musyawarah barulah mengatasnamakan fraksi," katanya.

Marzuki menyatakan surat usulan hak angket itu pasti akan ditindaklanjuti. Namun, laporan audit BPK juga akan diterima, sehingga ada dasar dalam melakukan hak angket. "Setelah kita menerima laporan audit BPK, maka kita bisa mengetahui ke mana arahnya, karena dari laporan itu kita bisa mengetahui letak permasalahan hukumnya. Barulah kita bisa memanggil orang yang terlibat dalam kasus itu satu per satu, di sini-lah hukum berbicara."

Pengamat politik Arbi Sanit menilai usulan pengajuan hak angket itu baru tahap awal. "Kalaupun disetujui, prosesnya masih panjang, jadi jangan punya pikiran apa-apa. Saat ini belum ada ujung pangkalnya, karena pansusnya belum terbentuk," katanya.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada Arie Sudjito mengatakan hak angket merupakan hak yang dimiliki anggota DPR ketika ada kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan undang-undang.

Menurut dia, yang paling penting adalah menunggu laporan BPK untuk memastikan tingkat pelanggaran seberapa besar, implikasi, serta prosesnya nanti seperti apa. Laporan BPK itu merupakan data-data yang kuat untuk menelusuri dan bertanya kepada pemerintah.

Melihat konfigurasi politik dan koalisi kabinet saat ini, Arie menduga akan terjadi kompromi-kompromi politik dalam penyelesaian kasus Century, tapi pasti dilandasi dengan solusi terbaik.

"Yang diperlukan dalam penyelesaian kasus ini tidak hanya langkah politik, melainkan juga langkah substantif atas sebuah audit, tentang bagaimana pendalaman atas materi atau masalah yang ada dalam kasus Bank Century ini," katanya. Dengan begitu, setiap langkah kebijakan politik yang diambil didasari oleh argumentasi-argumentasi yang secara substantif ekonomi, kebijakan perbankan, ataupun hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Kalaupun nantinya sekedar politisasi, hal itu mungkin populer. Tapi dia mengingatkan, hal itu bisa menghambat tercapainya target substansi dari sebuah *government reform* dalam perbankan Indonesia.

Anggota DPR Fraksi De-

mokrat Sutan Batoegana mengatakan fraksinya menghormati hak DPR mengajukan hak angket. Namun, Partai Demokrat mendahulukan proses hukum yang sedang berjalan.

"Tidak ada niat, bahkan berburuk sangka pada teman-teman DPR. Tujuan kita sama, tapi cara berbeda. Kita hargai hak teman-teman yang mengadakan hak angket," ujar Sutan dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (14/11).

Menurut Sutan, sidang Komisi XI telah memutuskan memerintahkan BPK melakukan audit investigasi aliran dana ke Bank Century. Ketua BPK Hadi Purnomo berjanji memberikan laporan audit investigasi kepada DPR sebelum reses, awal Desember.

"Bank Indonesia, kata Sutan, sudah melaporkan dugaan adanya tindak pidana dalam kasus Bank Century kepada kepolisian. "Karena itu, ranah hukum itu kita jalankan dulu. Kalau tidak memuaskan, maka bukan tidak mungkin kita (Fraksi Demokrat) bergabung dengan teman-teman," ujar Sutan.

Sutan mengingatkan DPR agar serius menggunakan hak angket tersebut.

Sutan mencontohkan beberapa hak angket sebelumnya, seperti hak angket BBM, yang kandas dan tidak me-

muskan rakyat.

Gayus Lumbuun dari Fraksi PDIP menyatakan menghormati proses audit yang dilakukan BPK dalam kasus Bank Century. Namun, proses tersebut tidak bisa menemukan akar persoalan karena hanya bersifat teknis.

"BPK itu sifatnya *technical auditing*, sifatnya teknis. PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan) tidak mau memberi data kepada BPK karena undang-undang mengatakan laporan PPATK hanya diberikan kepada polisi dan KPK," ujarnya.

Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Andi Rahmat mengatakan hak angket sangat dibutuhkan untuk membongkar kasus Bank Century hingga tuntas. "Kita inginkan agar angket Bank Century bisa sampai kepada hulu persoalan," kata Andi.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan Partai Golkar tidak mengeluarkan instruksi khusus soal kasus Bank Century. Ia tak mempersoalkan langkah yang akan diambil DPR untuk menggunakan hak angket, interpelasi, atau jalan lain. "Yang penting ada penyelesaian dan penjelasan se-jelas-jelasnya soal Century ini," katanya.

■ Widyasari/Very Herdiman/  
Salvia Ika Padmasari

## Usulan Angket Century Tak Perlu Disikapi Berlebihan

Jakarta | Jurnal Nasional

ANGGOTA Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, Mukhammad Misbakhum mengatakan, meski aroma politik begitu kuat di balik pengajuan hak angket skandal Century, namun upaya DPR untuk menyelidiki dana talangan atau *bailout* Bank Century tidak perlu disikapi berlebihan. Pasalnya, usulan hak angket Century merupakan mekanisme demokratis yang ditempuh DPR dalam upaya mengakomodasi aspirasi publik.

"Pengajuan usulan hak

angket Bank Century dimaksudkan agar talangan dana ke Bank Century bisa transparan," kata Mukhammad Misbakhum kepada *Jurnal Nasional*, Minggu (15/11).

Menurut salah seorang inisiator angket Century ini, dengan mengungkap masalah ini, justru lebih baik bagi pemerintah karena tidak lagi menjadi bola liar di masyarakat seperti munculnya wacana gerakan *people power*. Akan tetapi aspirasi publik ini bisa dilokalisasi di DPR melalui penggunaan hak angket.

Pada prinsipnya hak ang-

ket Century dimaksudkan untuk membangun kredibilitas institusi Bank Indonesia dan Departemen Keuangan.

Menurut dia, peran DPR sebagai perpanjangan aspirasi rakyat tidak boleh dipandang sebagai intrik politik. Namun, pemberian dana talangan sebesar Rp6,7 triliun kepada Bank Century perlu diselidiki secara transparan.

### Terburu-buru

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat DPR RI menilai usulan angket Bank Century terburu-buru dan belum

memiliki dasar hukum. Fraksi terbesar di DPR ini melihat tendensi politik lebih menonjol dalam usul hak angket itu.

"Bukankah audit BPK belum selesai? Fraksi Partai Demokrat konsisten dengan penegakan hukum melalui jalur hukum, bukan dengan jalur non hukum. Kami tidak setuju dengan politisasi," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada *Jurnal Nasional*, Kamis, pekan lalu.

Meski begitu, Anas menilai usulan hak angket itu biasa sebagai hak dewan, dan tidak perlu dikhawatirkan. Menurut

dia, fraksi-fraksi partai politik koalisi sama sikapnya dengan Fraksi Partai Demokrat, yakni menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kalau ada anggota fraksinya yang ikut mengusulkan hak angket, itu urusan internal masing-masing fraksi.

Anas mengatakan, Fraksi Partai Demokrat berpendirian bahwa siapa pun yang bersalah berdasarkan hasil audit, harus mendapatkan hukuman yang adil, tanpa kecuali. "Kami ingin keadilan ditegakkan, tetapi tidak dengan jalan politisasi." ■ Friederich Batari

# Audit Century Selesai Pekan Depan

Demokrat, menyebut bantuan Rp6,7 triliun kepada Bank Century bukan *bail out*.

Jakarta | Jurnal Nasional

**B**ADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengumumkan hasil audit Bank Century pekan depan. "Hasilnya tunggu saja, paling lambat pekan depan sudah ada," kata anggota BPK Moermahadi kepada pers usai meresmikan Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara di Kendari, Jumat (20/11).

Moermahadi meminta semua pihak bersabar menunggu hasil kerja BPK karena ti-

dak lama lagi akan dilansir ke publik. Dia enggan menjelaskan, apakah hasil audit BPK menemukan adanya indikasi penyalahgunaan anggaran dalam pemberian dana talangan (*bail out*) sebesar Rp6,7 triliun kepada Bank Century.

Sebelumnya, Ketua BPK Hadi Purnomo mengungkapkan bahwa laporan final audit Bank Century akan rampung pada Desember, namun ternyata bisa dipercepat hingga pekan ketiga November ini.

Wakil Presiden Boediono

menyerahkan kasus Bank Century kepada BPK untuk melakukan audit. "Saya tidak mau jawab. Biar nanti BPK dan sebagainya yang melakukan audit," katanya di Roma, Italia, Kamis sore, menjawab pertanyaan wartawan mengenai kasus Bank Century.

Ditanya ke mana aliran dana yang telah disuntikkan ke bank tersebut, Boediono menjawab, "Biar BPK saja."

Pada saat terjadi kucuran dana untuk Bank Century, Boediono menjabat Gubernur

Bank Indonesia.

Mengenai kebijakan fasilitas pembiayaan jangka pendek dan rasio kecukupan modal (CAR) saat itu, Boediono mengatakan kebijakan fasilitas pembiayaan jangka pendek *menyantol* atau terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang dikeluarkan Oktober 2008 untuk menanggapi keadaan darurat.

Bersambung ke hal 7

## Audit Century Selesai Pekan Depan

(sambungan dari halaman 1)

Instrumen tersebut, katanya, banyak dilakukan oleh berbagai negara pada masa krisis tahun lalu yang tujuannya membantu bank-bank yang menghadapi kesulitan saat krisis.

Boediono mengatakan, kebijakan itu dilakukan setelah melihat perkembangan yang terjadi saat itu, yaitu memburuknya kualitas aset bank-bank yang berdampak kepada CAR. Dana pihak ketiga juga merosot, katanya.

Menurut dia, kebijakan itu berlaku untuk semua bank dan yang parah antara lain Bank Century. Kebijakan saat itu untuk merespons keadaan yang memburuk sangat cepat. Ini diberlakukan untuk semua bank dan sampai saat ini masih berlaku.

### Hak Angket

Fraksi Partai Demokrat DPR menyatakan menolak penggunaan hak angket Century. Hal itu disampaikan oleh tiga anggota Fraksi Demokrat, yakni Achsanul Qosasi, Ramadhan Pohan, dan Ruhut Sitompul dalam jumpa pers di Press Room Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (20/11).

Achsanul yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi alasan Demokrat

menolak hak angket Century. Menurut dia, dana Century bukan dana *bail out*. Dana tersebut adalah Penyertaan Modal Sementara (PMS) dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan diperoleh dari premi beberapa bank anggota LPS.

"PMS bukan dana *bail out* dan tidak berasal dari APBN," katanya.

Achsanul menuturkan sesuai dengan prosedur PMS, maka Bank Century dikelola sementara oleh LPS selama tiga tahun. Setelah tiga tahun, akan dijual ke publik. Jika belum ada yang membeli, LPS akan mengelola selama dua tahun lagi.

"Hingga saat ini Bank Century dinilai sehat dan tidak terjadi kerugian negara karena tidak diambil dari APBN," ucapnya.

Achsanul menegaskan, LPS merupakan lembaga independen sehingga otoritas pencairan dana yang ada pada lembaga tersebut tidak memerlukan izin DPR.

Dia mengatakan Robert Tantular melakukan tidak kriminal karena menipu nasabah mereka melalui Securitas Antha Boga.

Menanggapi dugaan keterlibatan Partai Demokrat dan Presiden dalam kasus Century, Achsanul dengan tegas menyatakan tidak ada keterlibatan itu. "Media dan masyarakat harus bisa berpikir

jernih dalam kasus ini. Pemerintah saat ini butuh dukungan publik untuk menyukseskan program 100 hari."

Ruhut Sitompul mengatakan Demokrat tak menginginkan senjata pamungkas DPR seperti angket digunakan sia-sia seperti sebelumnya. Kami sendiri tidak tagosama sekali dengan penggunaan hak tersebut karena kami yakin bahwa tidak ada masalah dengan Bank Century lainnya.

Ruhut mengkritik sikap PDIP yang memojokkan Demokrat dalam penggunaan hak angket. "Sekarang saya tanya balik, Ketua Dewan Pembina PDIP Taufik Kiemas tidak tanda tangan sampai sekarang, masa kami didesak untuk tanda tangan."

Ramadhan Pohan membantah isu akan adanya *deal deal* dan *bargaining* politik dengan partai-partai pendukung angket yang kebanyakan memiliki masalah hukum. "Kami tegaskan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi karena kami mendukung penegakkan hukum. Kami tidak akan melindungi siapapun yang salah," katanya.

### Penggembosan

Pengusul hak angket Bank Century memperhatikan kemungkinan adanya penggembosan agar

usulan tersebut tidak mencapai sasaran.

"Jika orientasinya untuk mengungkap kebenaran dan transparansi terhadap masyarakat maka pengusul hak angket Century akan tetap solid," kata Nasir Jamil, anggota Fraksi PKS di Gedung DPR Jakarta, Jumat.

Anggota Komisi III Bidang Hukum ini optimistis usulan hak angket Bank Century akan diagendakan pada rapat paripurna 1 Desember mendatang, meskipun masih ada perbaikan teknis penulisan surat usulan hak angket tersebut.

Dia mengakui, hak angket yang diusulkan anggota DPR periode sebelumnya kurang beruntung dan penyelesaiannya tidak jelas karena pengusulnya tidak solid.

Anggota Fraksi PPP DPR Mayasak Johan mengatakan, agar usulan hak angket Bank Century solid dan mencapai sasaran, maka sebelum dibahas di rapat paripurna harus dipersiapkan secara matang.

Pada pengambilan keputusan di rapat paripurna, menurut dia, sebaiknya melalui mekanisme voting tertutup, sehingga para pengusul hak angket tetap bisa menggunakan haknya dengan nyaman meskipun fraksinya tidak mendukung.

■ Andi Syahrir/Rhama Deny/  
Friederich Batari/Antara



# Presiden Ingin Kasus Century Dibuka

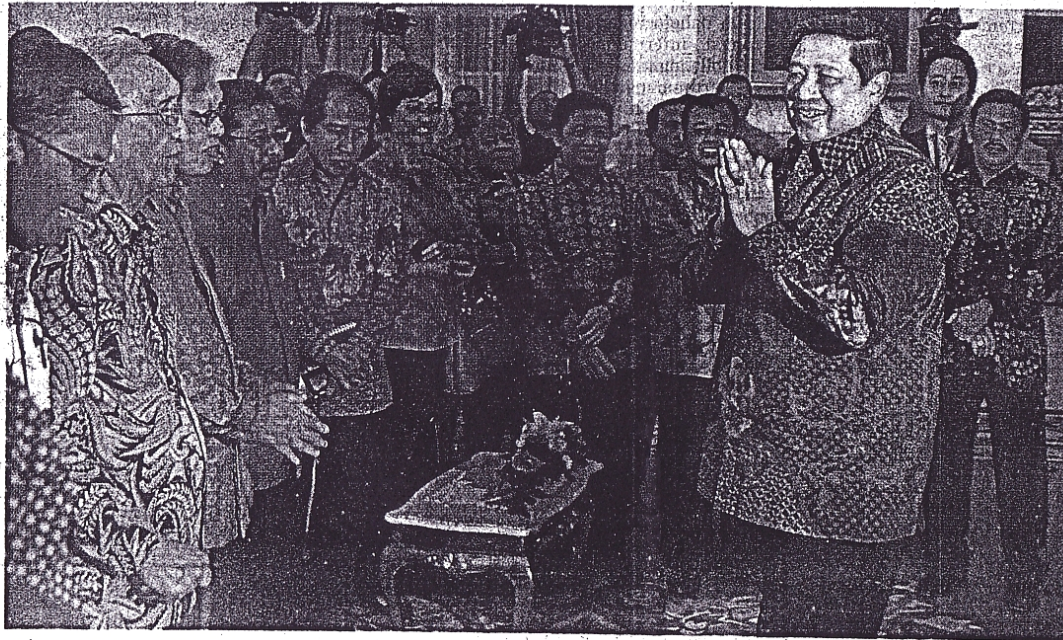
Nanti malam Presiden umumkan sikap soal kasus hukum Bibit dan Chandra.

Jakarta | Jurnal Nasional

**P**RESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan penyelesaian kasus aliran dana talangan (*bail out*) Bank Century yang kini dipermasalahkan DPR dan menjadi isu hangat di tengah-tengah masyarakat, dibuka.

Hal ini dikemukakan Presiden dalam acara silaturahmi dengan pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Negara, Jakarta, Minggu (22/11) malam. "Saya juga ingin tahu aliran dana talangan ke mana saja, buka semua apa adanya. Sekali lagi untuk mengetahui *proper* atau tidak. Apa ada yang menyimpang atau semua sesuai dengan yang ditentukan. Buka semua," kata SBY.

Kepala Negara membantah rumor yang saat ini berkembang bahwa tim suksesnya menerima aliran dana talangan Bank Century pada Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden 2009.



WIDODO S. JUSUF/ANTARA

## Silaturahmi Media Massa

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi salam kepada sejumlah pemimpin redaksi media massa nasional seusul acara silaturahmi di Istana Negara, Jakarta, Minggu (22/11) malam. Kepala Negara melakukan dialog dengan para pemimpin redaksi media massa nasional mengenai berbagai isu nasional terkini termasuk kasus hukum Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah serta kasus Bank Century.

Bersambung ke hal 7

## Presiden Ingin Kasus Century Dibuka

(sambungan dari halaman 1)

SBY mengakui telah mendengar rumor tentang tuduhan tim suksesnya menerima aliran dana talangan Bank Century pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009.

"Saya harus katakan malam ini, tentu sesuatu yang tercela seorang Presiden mendapatkan dana atau meminta dana atau berharap ada dana dari sumber-sumber yang tidak semestinya. Dengan demikian itu cacat bagi saya kalau itu sebagaimana yang beredar sekarang ini dikait-kaitkan. Saya ingin dibuka seluruhnya," katanya.

Untuk membuktikan bantahannya, Presiden mempersiapkan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bank Century untuk membuka semua catatan rekemennya. "Saya tidak ingin ada nalangan psikologis antara rakyat dan kepala negara dan keadilan tegak di negeri ini, sambil mencari siapa yang tidak *proper* di dalam menjalankan tugasnya," ucapnya.

SBY mengajak masyarakat untuk memandang kasus Bank Century dari situasi krisis keuangan global yang terjadi ketika pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan bank tersebut.

Kepala Negara juga mengajak semua pihak menunggu laporan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang dana talangan Bank Century yang menurut rencana akan diserahkan ke DPR hari ini (23/11).

"Bagi saya kalau itu ada yang diklarifikasi, dijelaskan, dan dipertanggungjawabkan, yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawab-

kan dan menjelaskan. Supaya jelas," ujarnya.

Kepala Negara mempersiapkan DPR untuk menggunakan hak angket dana talangan Bank Century jika itu merupakan jalan terbaik agar masalah Bank Century menjadi terang-benderang.

### Kasus Chandra dan Bibit

Presiden juga akan mengungkapkan sikapnya terkait kasus Bibit dan Chandra. "Mudah-mudahan keputusan yang saya ambil besok merupakan putusan yang tepat, walaupun saya sadar pasti ada kontroversi, ada yang pro dan kontra, tapi saya memang harus bersikap sesuai dengan kewenangannya saya," kata SBY.

Kepala Negara kembali menegaskan bahwa tidak ada pemikiran sedikit pun dalam dirinya untuk melemahkan institusi pemberantasan korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan sebagainya.

"Pemberantasan korupsi merupakan salah satu prioritas pemerintahan dalam 100 hari, jadi tidak bisa dimengerti kalau ada yang berpendapat Kepala Negara bermaksud melemahkan institusi tersebut," katanya.

Dia menjelaskan kasus Bibit dan Chandra berada dalam ranah hukum dan merupakan kewenangan kepolisian, kejaksaan Agung, dan pengadilan. "Saya tidak bisa memasuki batas kewenangan tersebut walaupun saya punya posisi sebagai Presiden," katanya.

Dalam ranah hukum, sesuai dengan perundang-undangan, kewenangan Presiden hanya dalam memberikan amnesti dan abolisi setelah

berkonsultasi dengan DPR serta grasi dan rehabilitasi setelah berkonsultasi dengan Mahkamah Agung. "Di luar itu, bukan kewenangan saya, meski saya tidak boleh abstain bersikap," katanya.

Presiden juga mengatakan, penyelesaian kasus Bibit dan Chandra, harus dilakukan dengan menghasilkan kebenaran dan keadilan yang hakiki dan mengandung koreksi dan perbaikan di masa mendatang.

Presiden juga menginginkan, agar keputusan yang diambil dilakukan secara mendalam dan komprehensif, serta dapat menghilangkan disharmonisasi antara lembaga pemberantasan korupsi.

Kemarin, Presiden telah memanggil Kapolri Bambang Hendarso Danuri, dan Jaksa Agung Hendarman Supanji untuk mendengarkan posisi kedua institusi tersebut atas kasus hukum Chandra dan Bibit. Rencananya, nanti malam Presiden secara langsung akan menyampaikan sikap pemerintah atas kasus hukum Bibit dan Chandra.

Pada Minggu siang, Presiden juga memanggil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dan Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa untuk mendengar saran dan pertimbangan dari dua pemimpin lembaga negara itu tentang kasus Chandra dan Bibit.

Sebelumnya, pada 17 November 2009, Presiden telah menerima rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Chandra-Bibit atau Tim Delapan yang menyarankan penghentian penyidikan kasus Bibit dan Chandra. ■ **Yanuar Jatnika**

## Fokus Hari Ini

# SBY Sambut Angket Century

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menyambut baik usulan anggota DPR untuk menggunakan hak angket terhadap kasus Bank Century.

"Tujuannya jelas, yakni agar perkara ini mendapatkan kejelasan serta sekaligus untuk mengetahui apakah ada tindakan-tindakan yang keliru dan tidak tepat," kata SBY di Istana Merdeka Jakarta, Senin (23/11) malam.

SBY mengatakan, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah dan tindakan internal berangkat dari hasil dan temuan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah diserahkan ke DPR dan Presiden kemarin.

Ia meminta percepatan proses hukum bagi para pengelola Bank Century dan segera dapat dikembalikannya dana penyertaan modal Rp6,7 triliun itu kepada negara. "Saya telah menginstruksikan Jaksa Agung dan Kapolri untuk melaksanakan tugas penting ini," ucapnya.

Kepala Negara mengungkapkan dirinya ingin mengetahui apakah penyertaan modal sementara Rp6,7 triliun itu ada yang "bocor" atau tidak sesuai dengan peruntukannya.

SBY menyatakan saat ini berkembang desas-desus, rumor, atau fitnah yang mengatakan sebagian dana itu dialirkan ke dana kampanye Partai Demokrat dan Calon Presiden SBY. "Fitnah yang sungguh kejam dan sangat menyakitkan," ujarnya.

Presiden meminta masalah Bank Century diselesaikan dengan baik, dalam koridor konstitusi, hukum, dan perundang-undangan yang berlaku, seraya memerhatikan dan mendengarkan aspirasi dan pendapat umum.

Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR mendukung usulan penggunaan hak angket anggota DPR untuk menyelidiki pemberian dana talangan kepada Bank Century sebesar Rp6,7 triliun.

"Kami sudah mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Kasus Bank Century dari BPK. Kesimpulannya ditemukan banyak kekurangan, kelemahan, dan kesalahan penerapan standar aturan penanganan bank bermasalah," kata Ketua Fraksi Demokrat Anas Urbaningrum di Jakarta, Senin.

Bersambung ke hal 7

## SBY Sambut Angket Century

(sambungan dari halaman 1)

"Atas dasar itu, FPD berkeputusan untuk mendukung usul angket kasus Bank Century. Kami akan mendukung seratus persen angket Bank Century. Seluruh anggota FPD kami instruksikan untuk ikut tandatangan usul angket Bank Century," katanya.

Anas menambahkan bahwa Demokrat tak terkait persoalan dana talangan Century sebesar Rp6,7 triliun. Ia menegaskan, partainya tidak akan melindungi para pelaku bila ditemukan penyelewengan dana talangan pemerintah ke Bank Century.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Jafar menyatakan dukungan fraksinya atas usulan hak angket Bank Century. Marwan mengatakan pihaknya sudah mempelajari hasil audit investigatif BPK.

"F-PKB mendukung hak angket dengan alasan, antara lain mendalami kontroversi aliran dana Bank Century, termasuk juga mendorong dewan memanggil PPATK dan pihak-pihak terkait," ujar Marwan.

Jika dalam perjalanan pengusutan ditemukan ada-

nya indikasi tindak pidana, Marwan mengatakan, seharusnya diserahkan dan diproses secara hukum.

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, DPR segera menindaklanjuti audit investigasi BPK terhadap Bank Century untuk diputuskan apakah hasil audit akan diserahkan ke Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau Komisi XI.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengungkapkan, meskipun audit BPK tidak mencakup aliran dana Bank Century, dia bersama anggota lain akan menelusuri lebih jauh aliran dana dan membuktikan bahwa hak angket memang diperlukan.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Priyo Budi Santoso menilai diteruskannya hasil audit investigasi BPK yang mengindikasikan adanya pelanggaran proses *bail out* Bank Century, maka usulan penggunaan hak angket tidak mungkin dibendung lagi.

"Hasil audit investigasi BPK makin menguatkan dugaan adanya pelanggaran prosedur dalam proses pelaksanaan *bail out*," tuturnya.

■ Yanuar Jatnika/  
Friederich Batari/  
Rhama Deny

# Demokrat Resmi Dukung Angket Century

Seluruh anggota Fraksi Demokrat mendukung hak angket Century

Rhama Deny

rhamadeny@jumas.com

Jakarta | Jurnal Nasional

**F**RAKSI Partai Demokrat (FPD) secara resmi menyerahkan dukungannya terhadap penggunaan hak angket DPR mengenai kasus Bank Century. Daftar dukungan yang ditandatangani oleh 144 anggota FPD tersebut diserahkan oleh Ketua Fraksi FPD Anas Urbaningrum kepada salah seorang inisiator Hak Angket Century dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait, di Jakarta, Senin (30/11). "Fraksi Demokrat berharap pansus angket kali ini jangan jadi pansus-pansusan dan tidak jelas hasilnya," kata Anas.

Pada kesempatan itu Anas juga mengatakan bahwa fraksinya belum mengambil sikap apa pun terhadap banyaknya fraksi anggota koalisi yang

terkesan mengarahkan seolah aliran dana Bank Century itu dituntikan ke SBY dan Partai Demokrat. Partai Demokrat baru akan menentukan sikap mengenai hal itu nanti, termasuk mengenai kemungkinan adanya *resuffle cabinet* yang dikaitkan dengan kinerja parpol pendukung.

Maruarar Sirait mengatakan, dengan adanya dukungan dari 144 Anggota Fraksi Demokrat maka secara prinsip sudah 9 fraksi yang menyatakan dukungan terhadap pansus ini. "Semua fraksi di DPR sudah menyatakan dukungannya dengan jumlah keseluruhan pendukung hak angket mencapai 502 orang. Ini adalah dukungan yang sangat signifikan dan kita segera bawa ke paripurna DPR," kata Maruarar.

Tidak Jelas  
Direktur State Budget Watch (SBW) yang juga mantan anggota Komisi XI DPR

## FRAKSI DEMOKRAT BERHARAP PANSUS ANGKET KALI INI JANGAN JADI PANSUS-PANSUSAN DAN TIDAK JELAS HASIL KERJANYA.

Ramson Siagian memprediksi, Hak Angket Century bakal mengalami kelunturan. Hal ini menurutnya karena Menkeu Sri Mulyani menyimpan kartu truf. Sri Mulyani dan staf intinya kemungkinan mengetahui betul tentang permasalahan tokoh-tokoh Senayan terkait berbagai proyek APBN. Misalnya soal anggaran pembangunan di Departemen PU, Dephub dan program listrik

masuk desa di Departemen ESDM.

Selain itu, juga pembanguan gedung di Depkeu dan beberapa proyek di departemen lain, serta kegiatan yang berkaitan dengan pembagian dana optimalisasi Rp4,2 triliun untuk beberapa Pemda oleh Panja Daerah.

"Jadi, pada waktu pembentukan opini dan kunjungan ke tokoh-tokoh nasional, memang warna Pansus Angket Century cukup jelas, tetapi begitu pansus terbentuk dan berjalan beberapa langkah, bisa saja ada potensi warnanya menjadi tidak jelas," kata Ramson Siagian.

Sekjen PKS yang juga Wakil Ketua DPR dari FPKS Anis Matta membantah bahwa fraksi PKS menyudutkan SBY dan Partai Demokrat yang seolah menerima aliran dana Bank Century.

Sementara itu, salah seorang di internal Partai Demokrat yang tidak

manya mengatakan, bahwa banyak kepentingan partai-partai politik yang bermain dalam kasus ini. PDIP terkesan *ngotot* mendukung angket ini karena adanya kekhawatiran PDIP akan adanya pergantian jajaran pimpinan di Bank Indonesia yang kebanyakan kader PDIP.

Sedangkan mengenai Golkar yang ikut bermanuver dalam kasus ini, sumber Demokrat itu mengatakan bahwa yang diinginkan Golkar hanyalah menggulingkan Menkeu Sri Mulyani. Ini terkait dengan tindakan Sri Mulyani beberapa waktu lalu yang membuat saham Bumi Resources sempat di *suspend* yang membuat rontok harga saham perusahaan tambang milik ketua umum Golkar, Aburizal Bakrie. "Ical" gerah dengan tindakan Sri Mulyani yang menghambat divestasi saham Newmont oleh Bumi Resources,

## ANALISIS TEKS BERITA 1

**Judul berita** : Demokrat: Usul Angket Century Terburu-buru  
**Rubrik** : Halaman Muka  
**Edisi** : Jumat, 13 November 2009  
**Penulis** : Friedierich Batari/Widyasari

## ANALISIS SELEKSI

STRUKTUR SKRIPTURAL	STRUKTUR TEMATIS	STRUKTUR SINTAKSIS	FUNGSI
<p><b>Obyek Wacana :</b>                      Pengusulan hak angket kasus Bank Century oleh 138 anggota DPR.</p>	<p><b>Jenis Wacana :</b>                      Pengungkapan alasan dari pihak F PD mengenai keputusan untuk belum menandatangani usulan penggunaan hak angket untuk penyelesaian kasus Bank Century. (paragraf 1-5, Anas Urbaningrum dan paragraf 6, 9-12, Marzuki Alie)</p> <p>Pandangan dari ahli hukum mengenai penyelesaian dari kasus Bank Century ini. (paragraf 14 - 15)</p>	<p>Terdapat pada <i>lead</i> , dan tersebar secara merata pada <i>body</i>. Penempatan berita di rubrik Halaman Muka.</p>	<p>Memberi arahan kepada pembaca bahwa berita ini mengacu pada wacana hak angket yang terburu-buru menurut Fraksi Partai Demokrat.</p>
<p><b>Pelibat Wacana :</b>                       Fraksi Partai Demokrat, diwakili oleh Anas Urbaningrum</p>		<p>Lead dan Body (Paragraf 2,3,4,5)</p>	<p>Memberikan pendapat bahwa pengusulan hak angket terburu-buru dan penuh tendensi politik,</p>

<p>BPK (Badan Pemeriksa Keuangan )</p>	<p>Body (Paragraf 2,3,4 dan 11)</p>	<p>penyebaran <i>placement</i> dari paragraf 1-5 menguatkan pemberitaan bahwa alasan pengusulan hak angket kasus Bank Century tidak kuat.</p> <p>Mempunyai peran mengaudit keuangan Bank Century dan sampai berita ini diturunkan audit tersebut belum selesai, hal ini yang kemudian menjadi penyebab F PD untuk belum menandatangani usulan hak angket kasus Bank Century. Penyebaran yang terdapat dalam 4 paragraf menguatkan <i>statement</i> bahwa hasil audit BPK merupakan hal yang penting dalam penyelesaian kasus Bank Century</p>
<p>Perwakilan tujuh fraksi yang mengusulkan hak angket.</p>	<p>Body (Paragraf 6)</p>	<p>Menyerahkan berkas surat usulan hak angket serta meminta Wakil Ketua DPR Anis Mata (F PKS), Pramono Anung (F PDIP), untuk menandatangani formulir usulan hak angket. Informasi hanya terdapat dalam satu paragraf, hal ini menandakan bahwa informasi ini hanya untuk memenuhi standar pemberitaan 5W 1H</p>

<p>Ketua DPR Marzuki Alie (F PD)</p>		<p>Body (Paragraf 6,9,10,11,12 )</p>	<p>Menerima berkas usulan hak angket namun belum menandatangani pengusulan hak angket Century dan mengungkapkan alasan mengapa tidak menandatangani berkas usulan hak angket, penyebaran <i>placement</i> berita yang terdapat pada paragraf 6 kemudian di paragraf 9-12 menguatkan pesan bahwa Ketua DPR juga masih meragukan usulan hak angket tersebut.</p>
<p>Wakil Ketua DPR Anis Mata (F PKS) dan Pramono Anung (F PDIP)</p>		<p>Body (Paragraf 6 dan 12)</p>	<p>Mendampingi Ketua DPR untuk menerima berkas usulan hak angket (paragraf 6) dan menandatangani formulir persetujuan hak angket atas permintaan pengusul,(paragraf 12) hal ini memberikan kesan bahwa kedua wakil ketua DPR ini tidak secara pribadi langsung mendukung usulan hak angket ini namun harus di dorong oleh para pengusul ketika penyerahan surat usulan.</p>
<p>Priyo Budi Santoso (F Golkar) dan Marwoto MintoHardjo (F PAN)</p>		<p>Body (Paragraf 6)</p>	<p>Kedua tokoh ini merupakan wakil ketua DPR yang tidak hadir ketika penyerahan usulan hak angket tersebut, hal ini bisa menunjukkan bahwa usulan hak angket ini tidak penting sehingga tidak seluruh wakil</p>



<p>Maruara Sirait (F PDIP)</p> <p>138 anggota DPR yang terdiri atas 80 anggota Fraksi PDIP, 24 anggota Fraksi Golkar, 14 anggota Fraksi Hanura, delapan anggota Fraksi Gerindra, delapan anggota Fraksi PKS, tiga anggota Fraksi PAN, dan satu anggota Fraksi PPP.</p> <p>140 anggota DPR</p> <p>400 anggota DPR</p> <p>Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra Zen</p>	<p>Body (Paragraf 7)</p> <p>Body (Paragraf 8 dan 12)</p> <p>Body (Paragraf 10)</p> <p>Body (Paragraf 10)</p> <p>Body dan Closure (Paragraf 14 dan 15)</p>	<p>ketua DPR datang.</p> <p>Membacakan surat usulan penggunaan hak angket di hadapan ketua DPR dan fraksi pendukung hak angket, penempatan berita yang hanya ada dalam satu paragraf dan terdapat di tengah berita menenggelamkan informasi ini dengan wacana yg lain.</p> <p>Anggota DPR yang telah menandatangani usul hak angket. Memperjelas berita bahwa hanya ada 138 anggota DPR yang telah menanda tangani persetujuan hak angket ini.</p> <p>Mengusulkan hak angket</p> <p>Belum menandatangani usulan hak angket</p> <p>Memberikan saran kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam penyelesaian kasus Bank Century</p>
---	---	---

<p>Presiden Susilo Bambang Yudhoyono</p> <p><i>UN Convention Against Corruption (UNCAC)</i></p>		<p>Body (Paragraf 14)</p> <p>Closure (Paragraf 15)</p>	<p>Ketegasannya diperlukan untuk menyelesaikan kasus century dan untuk menghilangkan sakwasangka.</p> <p>Undang-undang yang berkaitan dengan penyalahgunaan keuangan publik, memperkuat wacana yg dilantunkan oleh Anas Urbaningrum bahwa penegakkan hukum melalui jalur hukum.</p>
<p><b>Pelantun Wacana :</b></p> <p>Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum</p>	<p>“Bukankah audit BPK belum selesai? Fraksi Partai Demokrat konsisten dengan penegakan hukum melalui jalur hukum, bukan dengan jalur non hukum. Kami tidak setuju dengan politisasi,”</p> <p>“usulan hak angket itu biasa sebagai hak dewan, dan tidak perlu dikhawatirkan.”</p> <p>“fraksi-fraksi partai politik</p>	<p>Body (Paragraf 2, kalimat 1)</p> <p>Body (Paragraf 3, kalimat 1)</p> <p>Body (Paragraf 3, kalimat</p>	<p>Pernyataan ini menjelaskan mengapa F PD belum menandatangani usulan hak angket kasus Bank Century dan memberikan pandangan bahwa menurut F PD penyelesaian masalah Bank Century dilakukan dengan jalur hukum bukan dengan jalan politik.</p> <p>Pernyataan ini menjelaskan bahwa menurut F PD hak angket itu merupakan hal yang wajar dan bukanlah ancaman serius.</p> <p>Pernyataan ini menjelaskan bahwa</p>

<p>Ketua DPR Marzuki Alie</p>	<p>koalisi sama sikapnya dengan Fraksi Partai Demokrat, yakni menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kalau ada anggota fraksinya yang ikut mengusulkan hak angket, itu urusan internal masing-masing fraksi.”</p> <p>“Kalau Fraksi Partai Demokrat para anggotanya sejalan dengan kebijakan fraksi. FPD menunggu hasil audit BPK sehingga perkaranya menjadi terang-benderang. Apakah ada penyimpangan, siapa yang menyimpang, apakah ada aliran dana ilegal, kita tunggu hasil auditnya,”</p> <p>“Kami ingin keadilan ditegakkan, tetapi tidak dengan jalan politisasi.”</p> <p>"Hak angket Bank Century ini</p>	<p>2)</p> <p>Body (Paragraf 4, kalimat 1)</p> <p>Body (Paragraf 5, kalimat 2)</p> <p>Body (Paragraf 10, kalimat</p>	<p>fraksi koalisi mempunyai sikap yang sama dengan F PD, pernyataan ini juga sekaligus menyanggah isu yang berkembang mengenai pecahnya koalisi yang dibangun oleh F PD.</p> <p>Memberi penjelasan bahwa F PD merupakan fraksi yg kompak, tidak ada pertentangan antara anggota satu dengan yang lain dan menjelaskan lebih detail sekaligus menekankan alasan mengapa F PD belum menandatangani usulan hak angket.</p> <p>Pernyataan ini mengungkapkan bahwa penyelesaian masalah kasus Bank Century lewat adanya hak angket di DPR merupakan politisasi. Melalui pernyataan ini F PD memandang bahwa kasus Bank Century merupakan masalah hukum dan DPR tidak perlu turun tangan.</p> <p>Pernyataan ini menegaskan bahwa</p>
-------------------------------	---	---	--

<p>Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra Zen</p>	<p>diusulkan oleh sekitar 140 anggota DPR, masih ada sekitar 400 anggota DPR lainnya yang belum menandatangani. Sikap saya seperti 400 anggota DPR lainnya,"</p> <p>“dukungan terhadap hak angket adalah komitmen pribadi dan fraksi. Sikap Fraksi Partai Demokrat DPR masih menunggu laporan akhir hasil audit BPK seperti sikap anggota DPR lainnya”</p> <p>“menghargai penggunaan hak angket oleh 138 anggota DPR yang mengajukan usulan hak angket kasus Bank Century”</p> <p>“..perlunya ketegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengungkap kasus Bank Century.”</p> <p>“Pernyataan Presiden kepada</p>	<p>1 dan 2 )</p> <p>Body (Paragraf 11, kalimat 1)</p> <p>Body(Paragraf 12 , kalimat 1)</p> <p>Body (Paragraf 14, kalimat 1)</p> <p>Body (Paragraf 14, kalimat</p>	<p>belum seluruh anggota DPR menyetujui usulan hak angket ini. Penekanannya ada pada 400 anggota DPR yang belum menandatangani usulan hak angket.</p> <p>Lantunan ini lagi-lagi menegaskan sikap dari F PD yang masih menunggu audit BPK dan dukungan dari para anggota DPR tidak bisa dibaca sebagai sikap seluruh anggota DPR. Hal ini menguatkan peran Marzuki Alie sebagai Ketua DPR (berasal dari F PD) yg mempunyai sikap yg sama.</p> <p>Pernyataan ini menunjukkan sikap bijaksana Ketua DPR yg menghargai keputusan anggota DPR lain.</p> <p>Pernyataan ini menjelaskan bahwa sikap presiden belum tegas dalam mengungkap kasus Bank Century.</p> <p>Pernyataan ini memberikan saran</p>
--	--	---	---

	<p>publik mengenai kasus aliran dana Bank Century ini diperlukan untuk menjawab sakwasangka yang berkembang dalam masyarakat.”</p> <p>"Berdasarkan UN <i>Convention Against Corruption</i> (UNCAC), bila berkaitan dengan penyalahgunaan, ada kaitan dengan dugaan tindak pidana, maka semua keuangan publik harus dipertanggungjawabkan,”</p>	<p>2)</p> <p>Closure (Paragraf 15, kalimat 1)</p>	<p>kepada presiden agar memberikan pernyataan kepada publik terkait kasus ini.</p> <p>Pernyataan ini memperkuat <i>statement</i> dari Anas Urbaningrum, wakil dari F PD yang menginginkan penyelesaian kasus ini lewat jalur hukum.</p>
--	--	---	---

### SUB FRAME SELEKSI

Jurnal Nasional memandang pengusulan hak angket kasus bank century ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam teks berita hal ini dilakukan dengan pemilihan pernyataan – pernyataan dari tokoh F PD yang mengungkapkan alasan ketidaksetujuan terhadap pengusulan hak angket kasus Bank Century, selain itu Jurnal Nasional juga melakukan *exclude* terhadap pengusul hak angket dan penandatanganan usulan hak angket, dengan tidak adanya kutipan pernyataan dari pihak pengusul maupun dari pihak penandatanganan usulan.

### ANALISIS SALIANSI

STRUKTUR RETORIS	STRUKTUR SINTAKSIS	FUNGSI
<p><b>Catchphrases</b></p> <p>(frase yang menarik atau menonjol dalam sebuah wacana)</p>		

<ul style="list-style-type: none"> <li>- "...Usul Angket Century Terburu-buru"</li> </ul>	<p>Judul</p>	<p>Memberikan kesan dari awal, bahwa berita ini berisi wacana mengenai hak angket kasus Bank Century yang terburu-buru. Kata "terburu-buru" yang digunakan memberikan kesan bahwa tidak adanya pemikiran panjang dan dasar yang kuat dalam proses pengusulan hak angket ini</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- "...tendensi politik lebih menonjol..",  "...tidak setuju dengan politisasi..." dan  "...ingin keadilan ditegakkan , tapi tidak dengan jalan politisasi..."</li> </ul>	<p>Lead sampai Body (paragraf ke 2, kal ke 2) dan Body (paragraf ke 5, kal ke 2)</p>	<p>Ketiga kutipan ini kata "politik" dan "politisasi" menjadi kata yang tampak menonjol dalam kalimat . Kedua kutipan pertama memberikan kesan bahwa penyelesaian kasus Bank Century dengan hak angket akan mengakomodir kepentingan politik tertentu dan upaya pengusulan hak angket hanyalah upaya politis semata, sekaligus menegaskan sikap F PD yang tidak setuju dengan hal tersebut. Kemudian kutipan yang terakhir menguatkan sikap F PD yang konsisten dalam proses penegakan hukum.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- "Usulan hak angket itu biasa sebagai hak dewan, dan tidak perlu dikhawatirkan."</li> </ul>	<p>Body (paragraf ke 3, kal pertama )</p>	<p>Menguatkan kesan bahwa hak angket bukan merupakan ancaman yang serius bagi pemerintah.</p>

<p><b>Keywords</b></p> <p>(Sebuah kata / atau bisa juga frase yang menjadi inti sikap atau bingkai yang dibuat atas sebuah wacana. <i>Keyword</i> ini sangat mungkin bersifat denotatif karena lebih lugas dalam menyampaikan sikap.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "...belum memiliki <u>dasar hukum</u>..."</li> <li>- "<u>Fraksi terbesar</u> di DPR ini...."</li> <li>- "...dukungan terhadap hak angket adalah <u>komitmen pribadi dan fraksi</u>."</li> </ul>	<p>Lead (kalimat pertama )</p> <p>Lead (kalimat kedua)</p> <p>Body (paragraf 11,kalimat pertama)</p>	<p>Memperkuat kesan peng-ilegalan hak angket karena tidak memiliki dasar hukum.</p> <p>Menonjolkan F PD merupakan fraksi besar dan berpengaruh sekaligus mengingatkan kekuatan besar F PD di DPR.</p> <p>Memperkuat kesan upaya politis dari hak angket yang hanya berdasarkan pada kepentingan pribadi atau fraksi dan bukan pada kepentingan rakyat.</p>
<p><b>Exemplaar</b></p> <p>(Perbandingan, mengaitkan bingkai dengan contoh)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Hak angket Bank Century ini diusulkan oleh sekitar 140 anggota DPR, masih ada sekitar 400 anggota DPR lainnya yang belum menandatangani."</li> </ul>	<p>Body (paragraf 10, kal pertama)</p>	<p>Untuk mempertegas bahwa tidak seluruh anggota DPR menandatangani usulan hak angket kasus Bank Century ini dan memperjelas bahwa lebih banyak anggota DPR yang belum menandatangani usulan hak</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- “Kalau ada anggota fraksinya yang ikut mengusulkan hak angket, itu urusan internal masing-masing fraksi.”</li> <li>- “...para anggotanya sejalan dengan kebijakan fraksi.”</li> <li>- “...bila berkaitan dengan penyalahgunaan, ada kaitan dengan dugaan tindak pidana, maka semua keuangan publik wajib dipertanggungjawabkan”.</li> </ul>	<p>Body (paragraf 3, kal ke 3)</p> <p>Body (paragraf 4, kal pertama )</p> <p>Closure (kalimat pertama)</p>	<p>angket tersebut.</p> <p>Menguatkan kesan bahwa sikap anggota koalisi yang ikut menandatangani hak angket bukanlah urusan F PD (sebagai pimpinan koalisi) dan mengembalikan masalah tersebut kepada masing-masing fraksi.</p> <p>Kalimat ini digunakan untuk menunjukkan bahwa seluruh F PD sepaham,sepakat dalam bersikap mengenai pengusulan hak angket tersebut.</p> <p>Memperkuat kesan bahwa masalah Bank Century merupakan kasus hukum.</p>
<p><b>Metafora</b> (Perumpamaan; pengandaian; kiasan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- “...pengusung hak angket”.</li> </ul>	<p>Body (paragraf ke 7, kal pertama)</p>	<p>Pemilihan kata ‘pengusung’ bukan ‘pengusul’ menekankan aspek ketergesaan dalam proses usulan hak angket. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘usung’ sendiri memiliki arti menempatkan atau membawa sesuatu di atas bahu. Dalam konteks sebenarnya ketika seseorang</p>



		mengusung beban di atas bahu, pasti membawa beban tersebut dengan tergesa-gesa bahkan berlari.
<p><b>Depiction (to picture in words; describe)</b> (penggambaran oleh kata-kata, menguraikan, pelukisan melalui kata-kata sehingga memiliki kesan tertentu)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- “Apakah ada penyimpangan, siapa yang menyimpang, apakah ada aliran dana ilegal,kita tunggu hasil auditnya...”</li> <li>- “...menunggu audit BPK sehingga perkaranya menjadi terang benderang.”</li> <li>- “Sikap saya seperti 400 anggota DPR lainnya...”</li> </ul>	<p>Body (paragraf ke 4, kal ke 2)</p> <p>Body (paragraf ke 4, kal pertama)</p> <p>Body (paragraf ke 10, kal ke2 )</p>	<p>Memperkuat kesan bahwa kasus Bank Century bisa diselesaikan ‘hanya’ dengan menunggu hasil audit dari BPK.</p> <p>Pemilihan kata ‘terang-benderang’ yang digunakan bukan ‘jelas’ memberikan kesan <i>hiperbola</i> karena seolah-olah hanya dengan audit BPK saja, dapat membuka seluruh pokok permasalahan kasus Bank Century.</p> <p>Memperkuat kesan bahwa keputusan F PD belum menandatangani usulan hak angket kasus Bank century bukanlah keputusan yang minoritas di DPR.</p>
<p><b>SUB FRAME SALIANSI</b></p> <p>Jurnal Nasional melakukan penonjolan terhadap gagasan dari Fraksi Partai Demokrat melalui opini dan fakta-fakta yang mendukung keputusan Fraksi Partai Demokrat untuk belum menandatangani usulan hak angket kasus Bank Century.</p>		

## MEDIA FRAME

<b>SUB FRAME SELEKSI</b>	<b>SUB FRAME SALIANSI</b>
<p>Jurnal Nasional memandang pengusulan hak angket kasus Bank Century ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam teks berita hal ini dilakukan dengan pemilihan pernyataan – pernyataan dari tokoh Fraksi Partai Demokrat yang mengungkapkan alasan ketidaksetujuan terhadap pengusulan hak angket kasus Bank Century, selain itu Jurnal Nasional juga melakukan <i>exclude</i> terhadap pengusul hak angket dan penandatanganan usulan hak angket, dengan tidak adanya kutipan pernyataan dari pihak pengusul maupun dari pihak penandatanganan usulan.</p>	<p>Jurnal Nasional melakukan penonjolan terhadap gagasan dari Fraksi Partai Demokrat melalui opini dan fakta-fakta yang mendukung keputusan Fraksi Partai Demokrat untuk belum menandatangani usulan hak angket kasus Bank Century.</p>
<p style="text-align: center;"><b>FRAME JURNAL NASIONAL</b></p> <p>Jurnal Nasional dalam teks beritanya memberikan kesan bahwa keputusan yang dilakukan oleh Fraksi Partai Demokrat untuk belum menandatangani usulan hak angket merupakan keputusan tepat karena memiliki alasan kuat berdasarkan hukum. Teks berita berjudul “Demokrat: Usul Angket Century Terburu-buru” ini juga terlihat berulang kali menonjolkan fakta-fakta yang mendukung alasan Fraksi Partai Demokrat untuk belum menandatangani usulan hak angket kasus Bank Century.</p>	

## ANALISIS BERITA 2

**Judul Berita** : Pemerintah Siap Jernihkan Polemik Century  
**Rubrik** : Halaman Muka  
**Edisi** : 14 November 2009  
**Penulis** : Arjuna Al Ichsan/Rhama Deny/Friederich Batari

## ANALISIS SELEKSI

STRUKTUR SELEKSI	STRUKTUR TEMATIS	STRUKTUR SINTAKSIS	FUNGSI
<b>Obyek Wacana :</b> Pengusulan hak angket kasus Bank Century oleh 139 anggota DPR dari delapan fraksi.	<b>Jenis Wacana :</b> Penjelasan pemerintah mengenai proses <i>bailout</i> Bank Century (paragraf 1-6, Boediono) Tanggapan pemerintah mengenai pengusulan hak angket kasus Bank Century (paragraf 7-8, Boediono)  Pengungkapan Golkar sebagai inisiator hak angket. (sub judul “Disponsori Golkar” paragraf 9-10, Taufik Kiemas) Optimisme mengenai proses pengusulan hak angket (paragraf 11, Mahmud Yunus) Tanggapan dari F PD terhadap pengusulan hak	Tersebar pada <i>lead</i> , sampai pada <i>body</i> judul utama.  Terdapat pada sub judul 1, “Disponsori Golkar”	Memberikan arahan kepada pembaca bahwa berita ini mengacu kepada sikap pemerintah terhadap wacana pengusulan hak angket kasus Bank Century.  Sub judul berfungsi sebagai pelengkap wacana pengusulan hak angke, sekaligus juga untuk melemahkan wacana PDIP sebagai inisiator utama hak angket.

	<p>angket (paragraf 12-14, Anas Urbaningrum)</p> <p>Pernyataan sikap dari salah satu partai anggota koalisi mengenai pengusulan hak angket (paragraf 15, Hasrul Azwar, F-PPP)</p> <p>Tanggapan mengenai upaya pemakzulan dari hak angket dan penjelasan fungsi hak angket ( Hajriyanto Y Tohari, sub judul “Terlalu Dini”, paragraf 16- 17)</p>	<p>Terdapat pada sub judul 2, “Terlalu Dini”</p>	<p>Sub judul sebagai penguat wacana yang dilantunkan oleh pemerintah, inisiator hak angket maupun F PD.</p>
<p><b>Pelibat Wacana</b></p> <p>Pemerintah yang direpresentasikan oleh Wakil Presiden Boediono</p>		<p>Lead sampai dengan body (paragraf 2 – 8)</p>	<p>Sebagai wakil dari pemerintah, dan pihak yang dituding sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap <i>bailout</i> 6,7 Trilyun ke Bank Century, Boediono memberikan penjelasan mengapa <i>bailout</i> tersebut dilakukan. (paragraf 3 – 6)</p> <p>Kemudian pada paragraf 7-8, merupakan opini Boediono mengenai hak angket yang diusulkan oleh DPR.</p>
<p>Bank Indonesia</p>		<p>Body (paragraf 3,5 dan 6)</p>	<p>Merupakan lembaga yang memutuskan</p>

<p>Bank – bank menengah dan kecil</p>	<p>Body (paragraf 4)</p>	<p>penyelamatan Bank Century melalui <i>bailot</i>. (paragraf 3)</p> <p>Menurunkan rasio kecukupan modal (CAR) dari 8 % menjadi nol persen. (paragraf 5)</p> <p>Penjelasan bahwa lembaga keuangan ini tidak melakukan rekayasa dalam penyelamatan kasus Bank Century (paragraf 6)</p> <p>Mengalami pemburukan pendanaan dari pihak ketiga, penurunan kualitas aset dan penurunan nilai <i>paper</i> yang dipegang oleh bank. Hal ini yang kemudian menjadikan alasan Bank Indonesia untuk menurunkan rasio kecukupan modal (CAR) dari 8 % ke nol persen.</p>
<p>Taufik Kiemas, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Perjuangan</p>	<p>Sub Judul “Disponsori Golkar”, body (paragraf 9 – 10 )</p>	<p>Memberikan keterangan bahwa yang menjadi inisiator hak angket merupakan Partai Golkar.</p>
<p>Partai Golkar</p>	<p>Body (paragraf 9 – 10 )</p>	<p>Merupakan inisiator pengusulan hak angket kasus Bank Century menurut versi Taufik Kiemas.</p>
<p>Partai Demokrasi</p>	<p>Body (paragraf 9 – 10 )</p>	<p>Menyusul langkah Partai Golkar untuk</p>

<p>Perjuangan (PDIP)</p> <p>Mahmud Yunus, inisiator hak angket, bendahara F-PPP</p> <p>Anas Urbaningrum, Ketua F - Partai Demokrat</p> <p>Fraksi Partai Demokrat</p> <p>Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)</p> <p>Hasrul Azwar, Ketua F- PPP</p>	<p>Body (paragraf 11)</p> <p>Body (paragraf 12 - 14)</p> <p>Body (paragraf 12 - 14)</p> <p>Body (paragraf 12 - 14)</p> <p>Body (paragraf 15)</p>	<p>menjadi pengusung hak angket kasus Bank Century ini. (versi Taufik Kiemas)</p> <p>Mengungkapkan optimisme mengenai kelolosan hak angket dan menjelaskan bahwa hak angket bukanlah sarana untuk menjatuhkan pemerintah.</p> <p>Mengungkapkan alasan F PD belum menandatangani pengusulan hak angket dan melakukan penilaian terhadap hak angket bahwa hal tersebut tergesa-gesa.</p> <p>Melalui Anas Urbaningrum, menjelaskan alasan belum ditandatanganinya pengusulan hak angket oleh F – PD</p> <p>Hasil audit BPK yang masih berjalan (saat berita ini diturunkan) menjadi alasan bagi F – PD untuk belum menandatangani berkas pengusulan hak angket kasus Bank Century.</p> <p>Menjelaskan sikap dari partai koalisi yang belum menandatangani usulan hak angket karena masih menunggu proses audit BPK.</p>
--	--	--

<p>Partai Persatuan Pembangunan</p> <p>Komisi XI periode lalu</p> <p>Hajriyanto Y Tohari, Wakil Ketua MPR dari F – Golkar</p>		<p>Body (paragraf 15)</p> <p>Body (paragraf 15)</p> <p>Body (paragraf 16-17)</p>	<p>Salah satu dari partai anggota koalisi yang juga belum menandatangani berkas pengusulan hak angket secara fraksi.</p> <p>Merekomendasikan BPK untuk melakukan audit kasus Bank Century.</p> <p>Menjelaskan kemungkinan penggunaan hak angket ke arah pemakzulan presiden dan mendiskripsikan lebih lanjut fungsi dari hak angket itu sendiri.</p>
<p><b>Pelantun Wacana</b></p> <p>Wakil Presiden Boediono</p>	<p>“Apa pun, informasi yang diperlukan untuk pencerahan masyarakat akan kita berikan. Jadi masyarakat tak perlu bertanya-tanya lagi biar jelas dan kemudian bisa fokus bekerja lagi,”</p> <p>“..pemerintah ingin persoalan Bank Century dapat terselesaikan dengan jernih di masyarakat. Jangan lagi perhatian masyarakat tersita pada persoalan tersebut. Diharapkan masyarakat tenang dan dapat menaruh kembali perhatiannya pada</p>	<p>Lead (kalimat ke dua)</p> <p>Body (paragraf 2, kal 1-2)</p>	<p>Pernyataan ini menjelaskan bahwa pemerintah siap untuk melayani keinginan tahanan masyarakat mengenai proses <i>bailout</i> Bank Century, selain itu hal ini memberikan kesan bahwa informasi yang beredar saat ini tidak cukup memberikan pencerahan kepada masyarakat.</p> <p>Pernyataan ini secara tidak langsung ‘meminta’ kepada masyarakat agar tidak terlalu memikirkan kasus Bank Century ini dan tetap percaya pada usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah.</p>

	<p>kegiatan-kegiatan yang produktif.”</p> <p>“<i>Bail out</i> Bank Century,... pada dasarnya diputuskan Bank Indonesia (BI) kala itu untuk menyelamatkan sistem perbankan nasional dari krisis keuangan global.”</p> <p>“BI sama sekali tidak mengetahui ada <i>fraud</i> atau persoalan di Bank Century termasuk keluarnya kebijakan fasilitas pembiayaan jangka pendek (FPJP) oleh BI yang saat itu didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).”</p> <p>“Ini (hak angket) saya kira wajar saja dan silakan saja. Saya <i>welcome</i> saja apa pun yang diputuskan oleh dewan,”</p> <p>“Komitmen pemerintahan yang bersih, yang obyektif, yang melayani rakyat. Apa pun kita tunduk pada hukum,”</p> <p>“Walau kesannya kami yang</p>	<p>Body (paragraf 3, kal pertama )</p> <p>Body (paragraf 3, kal kedua)</p> <p>Body (paragraf 7, kal kedua)</p>	<p>Melalui pernyataan ini, Bank Indonesia merupakan lembaga yang mendasari keputusan <i>bailout</i> namun hal yang lebih ditekankan dalam pernyataan ini adalah tanggungjawab Bank Indonesia dalam upaya penyelamatan ekonomi nasional saat itu.</p> <p>Pernyataan ini memberikan kesan bahwa sebenarnya Bank Indonesia tidak mengerti persoalan yang dialami oleh Bank Century saat itu. Hal ini aneh karena sebagai bank sentral tugas utamanya adalah melakukan pengawasan kepada kinerja bank umum seperti Bank Century.</p> <p>Boediono dalam pernyataannya memberikan kesan bahwa ia tidak merasa khawatir dengan adanya pengusulan hak angket, serta menghormati hak angket sebagai hak dewan.</p>
--	--	--	---



<p>Taufik Kiemas, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Perjuangan</p>	<p>mengusung dari awal penggunaan hak angket ini namun sebenarnya sponsornya Golkar. Golkar yang pertama kali usul. PDIP menyusul belakangan,”</p> <p>“...optimistis usulan tersebut akan digolkan. Sebab, tujuan hak angket bukan untuk menjatuhkan presiden.”</p>	<p>Body (paragraf 8, kal kedua)</p> <p>Sub judul “ Disponsori Golkar”, body (paragraf 10, kal pertama)</p>	<p>Memberikan kesan bahwa saat ini pemerintah sedang mengupayakan pemerintahan yang bersih, obyektif dan melayani rakyat, serta tunduk pada hukum.</p> <p>Pernyataan ini memberikan kesan penggelindingan bola liar oleh PDIP selaku salah satu inisiator hak angket. Serta memberikan kesan tidak kompak dan tidak satu tujuan antar sesama intern anggota partai.</p>
<p>Mahmud Yunus, inisiator hak angket, bendahara F-PPP</p>	<p>“Salah satu tujuan hak angket adalah untuk mengetahui transparansi aliran dana sebesar Rp6,7 triliun yang digelontorkan itu. Angka tersebut bukan jumlah yang sedikit,”</p>	<p>Body (paragraf 11, kal pertama)</p>	<p>Memberikan kesan bahwa hak angket bukan berfungsi untuk menjatuhkan pemerintahan.</p>
<p>Anas Urbaningrum, Ketua F - Partai Demokrat</p>	<p>“Sikapnya sama dengan FPD, yakni menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan,”</p> <p>“Kami yakin, etika dan tatakrma berkoalisi tetap dianggap penting. FPD menunggu hasil audit BPK, sehingga perkaranya menjadi terang benderang. Apakah</p>	<p>Body (paragraf 11, kal kedua)</p> <p>Body (paragraf 12, kal kedua)</p>	<p>Memberikan penekanan tujuan dari pengusulan hak angket untuk menyelidiki aliran dana Rp 6,7 trilyun.</p> <p>Memberikan kesan bahwa partai anggota koalisi juga memiliki sikap</p>

	<p>ada penyimpangan, siapa yang menyimpang, apakah ada aliran dana ilegal. Kita tunggu hasil auditnya,”</p> <p>“..usulan hak angket sebagai sesuatu yang biasa saja. Bahkan menurutnya, hal itu adalah hak dewan yang lazim.”</p> <p>“FPD hanya menilai, usulan angket jelas terburu-buru dan belum ada dasarnya. Bukankah audit belum selesai? Tendensi politik lebih menonjol. FPD tetap konsisten dengan penegakan hukum, namun melalui jalur hukum dan bukan dengan jalur nonhukum,”</p> <p>“Mengapa PPP secara fraksi belum ikut tanda tangan angket, karena kami menghormati hasil rekomendasi Komisi XI periode yang lalu untuk</p>	<p>Body (paragraf 13, kal 2-4)</p> <p>Body (paragraf 14, kal pertama)</p> <p>Body (paragraf 14, kal 4-6)</p>	<p>yang sama seperti F PD.</p> <p>Pernyataan ini memberikan kesan F PD menaruh kepercayaan bahwa partai koalisi akan bersikap sejalan dengan keputusan F PD terhadap pengusulan hak angket ini, selain itu pernyataan ini menekankan bahwa hasil audit dari BPK merupakan hal yang sangat penting dalam pengungkapan kasus Bank Century ini.</p> <p>Pernyataan ini memberikan kesan bahwa F PD tidak takut terhadap kemungkinan diloloskannya hak angket yang ditenggarai beberapa pihak pada pemakzulan pemerintah, sekaligus menguatkan pernyataan Boediono yang juga beranggapan bahwa hak angket ini wajar.</p> <p>Pernyataan ini merupakan penilaian F PD terhadap pengusulan hak angket yang memberikan kesan terburu-buru dan <i>illegal</i> karena belum memiliki dasar hukum, serta penuh dengan berbagai macam kepentingan.</p>
--	--	--	---

<p>Hasrul Azwar, Ketua F- PPP</p>	<p>meminta BPK mengaudit kasus ini,”</p>	<p>Body (paragraf 15, kal 2)</p>	<p>Pernyataan ini menguatkan <i>statement</i> dari Anas Urbaningrum yang tetap percaya kepada komitmen partai anggota koalisi, namun pernyataan ini juga kontra dengan <i>statement</i> Mahmud Yunus, selaku bendahara PPP yang dalam teks berita disebutkan sebagai inisiator hak angket. Sesama anggota F PPP memiliki pernyataan kontra dalam satu teks berita, hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya satu kesepahaman antar anggota partai.</p>
<p>Hajriyanto Y Tohari, Wakil Ketua MPR dari F – Golkar</p>	<p>“..usulan hak angket Bank Century terlalu pagi jika disimpulkan mengarah pada upaya pemakzulan presiden. Namun yang pasti penggunaan hak angket ini merupakan hak dewan yg diberikan konstitusi dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dewan terutama dalam hal kebijakan pemerintah yang memiliki dampak besar ke masyarakat. Karena itu anggota DPR berhak mengajukan hak angket.”</p>	<p>Sub judul “Terlalu Dini” Body (paragraf 16, kal pertama dan paragraf 17 kal pertama)</p>	<p>Pernyataan ini memperkuat <i>statement</i> dari Mahmud Yunus yang mengatakan bahwa tujuan hak angket bukan upaya untuk menjatuhkan pemerintah, tidak hanya itu pernyataan ini sekaligus juga memperkuat <i>statement</i> dari Boediono dan Anas Urbaningrum yang menyatakan bahwa hak angket merupakan hal yang wajar.</p>

<p><b>SUB FRAME SELEKSI</b></p> <p>Jurnal Nasional mendiskripsikan hak angket sebagai hak dewan yang wajar dan tidak perlu dikhawatirkan. Hal ini terlihat dari pilihan opini – opini yang dimasukkan (<i>included</i>). Opini – opini tersebut memiliki satu suara yang saling menguatkan satu sama lain bahwa hak angket merupakan sesuatu yang wajar dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan hak angket ini.</p>			

**ANALISIS SALIANSI**

STRUKTUR RETORIS	STRUKTUR SINTAKSIS	FUNGSI
<p><b>Catchprases</b> (frasa yang menarik dan menonjol dari sebuah wacana)</p> <p>“...pemerintah ingin persoalan Bank Century dapat terselesaikan dengan jernih di masyarakat..”</p> <p>“..Apa pun kita tunduk pada hukum..”</p>	<p>Body (paragraf 2, kal pertama)</p> <p>Body (paragraf 8, kal 3)</p>	<p>Merupakan frasa yang digunakan pada awal teks berita dan mempunyai fungsi sebagai pengantar ide / gagasan awal mengenai komitmen pemerintah untuk menyelesaikan persoalan Bank Century di masyarakat.</p> <p>Pernyataan ini dilantunkan oleh Boediono yang mewakili pemerintah. Lantunan ini memberikan kesan bahwa pemerintah taat pada hukum. Apabila dihubungkan dengan pernyataan Anas Urbaningrum yang menyatakan bahwa hak angket belum memiliki dasar hukum, maka bisa disimpulkan bahwa dalam menghadapi pengusulan hak angket, pemerintah menghadapinya dengan memandang sebelah mata usulan hak angket tersebut karena pemerintah hanya tunduk pada hukum dan hak</p>

<p>“...tendensi politik lebih menonjol. FPD tetap konsisten dengan penegakan hukum, namun melalui jalur hukum dan bukan dengan jalur nonhukum,..”</p> <p>“...PPP secara fraksi belum ikut tanda tangan angket,..”</p>	<p>Body (paragraf 14, kal 4)</p> <p>Body (paragraf 15, kal 2)</p>	<p>angket belum memiliki dasar hukum. Pernyataan ini merupakan gagasan dari F PD yang memberikan kesan bahwa pengusulan hak angket penuh dengan berbagai macam kepentingan politik dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.</p> <p>Pernyataan dari Hasrul Azwar selaku Ketua Fraksi PPP ini memberikan kesan bahwa partai koalisi tetap berada di jalur yang sama dengan F PD selaku pimpinan koalisi, pernyataan ini sekaligus menyanggah isu perpecahan koalisi yang telah dibangun oleh F PD.</p>
<p><b>Keywords</b> (Sebuah kata / atau bisa juga frase yang menjadi inti sikap atau bingkai yang dibuat atas sebuah wacana. <i>Keyword</i> ini sangat mungkin bersifat denotatif karena lebih lugas dalam menyampaikan sikap.)</p> <p>“..sponsor hak angket Bank Century adalah Partai Golkar.”</p> <p>“..hal itu adalah hak dewan yang lazim..”</p>	<p>Body (paragraf 9, kal pertama)</p> <p>Body (paragraf 14, kal 2)</p>	<p>Dalam teks berita, pernyataan ini berfungsi sebagai pelengkap isi berita disamping itu pernyataan ini sekaligus memberikan kesan tidak sepaham dan sejalannya para pengusul hak angket, sebab di media massa banyak disebut bahwa PDIP merupakan inisiator hak angket kasus Bank Century, namun hal ini disanggah oleh Taufik Kiemas yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP.</p> <p>Pernyataan Anas Urbaningrum ini berfungsi</p>

		untuk menguatkan pernyataan dari Boediono yang juga menganggap bahwa hak angket tersebut merupakan sesuatu yang wajar.
<p><b>Exemplaars</b> (Perbandingan, mengaitkan bingkai dengan contoh)</p> <p>“...pada dasarnya diputuskan Bank Indonesia (BI) kala itu untuk menyelamatkan sistem perbankan nasional dari krisis keuangan global..”</p> <p>“...usul hak angket soal Century yang ditandatangani 139 anggota DPR.”</p> <p>“...penggunaan hak angket ini merupakan hak dewan yg diberikan konstitusi dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dewan terutama dalam hal kebijakan pemerintah yang memilki dampak besar ke masyarakat.Karena itu anggota DPR berhak mengajukan hak angket,”</p>	<p>Body (paragraf 3, kal pertama)</p> <p>Body (paragraf 7, kal 2)</p> <p>Body (paragraf 16, kal 2 dan paragraf 17 kal pertama)</p>	<p>Pernyataan ini merupakan penjelasan dari Boediono saat memutuskan untuk memberikan <i>bailout</i> kepada Bank Century. Alasan yang ia kemukakan memberikan kesan bahwa keputusan yang dilakukan saat itu demi penyelamatan ekonomi nasional dari krisis global, bukan untuk kepentingan Bank Century secara khusus.</p> <p>Kalimat ini memberikan kesan bahwa pengusulan hak angket ini hanya ditandatangani oleh 139 anggota DPR saja, padahal 139 anggota DPR tersebut telah mewakili seluruh fraksi di DPR kecuali F- PD.</p> <p>Pernyataan ini menegaskan kembali fungsi dari hak angket tersebut yang merupakan hak dewan, sekaligus menguatkan <i>statement</i> dari Boediono, Mahmud Yunus dan Anas Urbaningrum mengenai hak angket yang dianggap wajar dan tidak mengarah pada proses pemakzulan pemerintah.</p>
<p><b>Metafora</b> (Perumpamaan; pengandaian; kiasan)</p>		

<p>“...mengetahui <u>transparansi</u> aliran dana sebesar Rp6,7 triliun yang <u>digelontorkan</u> itu...”</p> <p>“...usulan hak angket Bank Century <u>terlalu pagi</u> jika disimpulkan mengarah pada upaya pemakzulan presiden.”</p>	<p>Body (paragraf 11, kal 3)</p> <p>Body (paragraf 16, kal pertama)</p>	<p>Kalimat ini terdapat dalam pernyataan Mahmud Yunus mengenai tujuan hak angket. Dalam pernyataannya ia menggunakan kata ‘transparansi’ untuk menekankan kejelasan aliran dana <i>bailout</i> tersebut, dalam arti <i>harafiah</i> kata ini mempunyai arti sebuah sifat tembus cahaya ; nyata ; jelas.</p> <p>Ia juga menggunakan kata ‘digelontorkan’, kata tersebut dalam arti sebenarnya digunakan untuk menerangkan air yang mengalir sebanyak-banyaknya, dalam kalimat ini kata ‘digelontorkan’ mempunyai kesan bahwa dana yang disalurkan untuk Bank Century sangat banyak.</p> <p>Penggunaan kata ‘terlalu pagi’ dalam pernyataan ini memberikan kesan ketergesaan hak angket (saat berita ini diturunkan) apabila diarahkan pada upaya pemakzulan presiden. Kata ‘terlalu pagi’ memberikan kesan terburu - buru dan cenderung belum siap.</p>
<p><b>Depiction (to picture in words; describe)</b> (penggambaran oleh kata-kata, menguraikan, pelukisan melalui kata-kata sehingga memiliki kesan tertentu)</p> <p>“...FPD menunggu hasil audit BPK, sehingga perkaranya menjadi terang benderang. Apakah ada penyimpangan, siapa yang menyimpang, apakah ada aliran dana ilegal.”</p>	<p>Body (paragraf 13, kal 4)</p>	<p>Memperkuat kesan bahwa dalam kaca mata F PD, kasus Bank Century bisa diselesaikan ‘hanya’ dengan menunggu hasil audit dari BPK.</p>

<p><b>Visual Images</b> Foto Boediono yang ditampilkan secara <i>close up</i>, dengan ekspresi ceria, tersenyum sambil memperlihatkan giginya.</p>	<p>Body (halaman pertama)</p>	<p>Memberikan kesan pemerintah tidak memiliki beban atas kasus Bank Century ini</p>
--	-------------------------------	---

**SUB FRAME SALIANSI**  
 Jurnal Nasional melakukan penonjolan terhadap wacana hak angket melalui gagasan secara teks maupun visual yang menguatkan wacana tersebut. Dari teks berita tampak bahwa Jurnal Nasional ingin menonjolkan wacana bahwa hak angket merupakan sesuatu yang wajar dan tidak mengarah kepada upaya pemakzulan presiden, selain itu gagasan mengenai hak angket yang tergesa-gesa juga masih disertakan.

**MEDIA FRAME**

<b>SUB FRAME SELEKSI</b>	<b>SUB FRAME SALIANSI</b>
<p>Jurnal Nasional mendiskripsikan hak angket sebagai hak dewan yang wajar dan tidak perlu dikhawatirkan. Hal ini terlihat dari pilihan opini – opini yang dimasukkan (<i>included</i>). Opini – opini tersebut memiliki satu suara yang saling menguatkan satu sama lain bahwa hak angket merupakan sesuatu yang wajar dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan hak angket ini.</p>	<p>Jurnal Nasional melakukan penonjolan terhadap wacana hak angket melalui gagasan secara teks maupun visual yang menguatkan wacana tersebut. Dari teks berita tampak bahwa Jurnal Nasional ingin menonjolkan wacana bahwa hak angket merupakan sesuatu yang wajar dan tidak mengarah kepada upaya pemakzulan presiden selain itu gagasan mengenai hak angket yang tergesa-gesa juga masih disertakan.</p>

**FRAME JURNAL NASIONAL**  
 Jurnal Nasional dalam teks berita berjudul “Pemerintah Siap Jernihkan Polemik Century”, memberitakan bahwa pemerintah tidak menganggap hak angket ini sebagai sebuah ancaman yang serius dan tetap berusaha untuk menyelesaikan sekaligus menjernihkan persoalan terkait dengan kasus Bank Century.



### ANALISIS BERITA 3

**Judul Berita** : Proses Hak Angket Century Masih Panjang  
**Rubrik** : Halaman Muka  
**Edisi** : 15 November 2009  
**Penulis** : Widyasari/Very Herdiman/Salvia Ika Padmasari

### ANALISIS SELEKSI

STRUKTUR SKRIPTURAL	STRUKTUR TEMATIS	STRUKTUR SINTAKSIS	FUNGSI
<p><b>Obyek Wacana :</b> Pengusulan hak angket kasus Bank Century oleh 139 anggota DPR dari delapan fraksi.</p>	<p><b>Jenis Wacana :</b> Penjelasan Ketua DPR mengenai usulan hak angket ini. (Marzuki Alie)</p> <p>Opini dari pengamat politik mengenai pengusulan hak angket ini. (Arbi Sanit dan Arie Sudjito)</p> <p>Pernyataan dari F – PD mengenai pengusulan hak angket kasus Bank Century. (Sutan Batoegana)</p> <p>Pernyataan dari pengusul hak angket. (Gayus Lumbuun dan Andi Rahmat)</p> <p>Pernyataan dari ketua umum partai</p>	<p><i>Lead</i> dan paragraf 2-6</p> <p>Body, (paragraf 7) Body, (paragraf 8 – 13)</p> <p>Body, (paragraf 14-18)</p> <p>Body, (paragraf 19-20) Body, (paragraf 21)</p> <p><i>Closure</i>, (paragraf 22)</p>	<p>Memberikan arahan kepada pembaca bahwa berita ini mengacu pada wacana proses hak angket yang masih panjang.</p> <p>Informasi yang memperkuat wacana utama bahwa proses hak angket masih panjang.</p>

	anggota koalisi mengenai pengusulan hak angket kasus Bank Century. (Aburizal Bakrie)		
<b>Pelibat Wacana</b>			
Ketua DPR Marzuki Alie		Lead dan Body (paragraf 2, 4 - 6)	Memberikan pernyataan mengenai proses pengusulan hak angket.
BPK		Body (paragraf 2,6,9,15,dan 20)	Membuat laporan hasil audit atas Bank Century atas permintaan sidang Komisi XI.
139 anggota DPR dari delapan fraksi		Body (paragraf 3)	Anggota DPR yang telah menandatangani usulan hak angket kasus Bank Century.
Fraksi Partai Demokrat		Body (paragraf 3, 13, dan 16)	Menjadi satu-satunya fraksi yang perwakilan anggotanya belum menandatangani berkas pengusulan hak angket.
Badan Musyawarah DPR		Body ( paragraf 5)	Merupakan prosedur rapat di DPR yang harus dilalui untuk meloloskan hak angket.
Arbi Sanit		Body ( paragraf 7)	Memberikan opini seputar pengusulan hak angket.
Arie Sudjito		Body ( paragraf 8 – 12 )	Memberikan opini seputar pengusulan hak angket dan menjelaskan lebih dalam mengenai

Sutan Batoegana, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat	Body ( paragraf 13 – 18 )	fungsi hak angket dan kemungkinan – kemungkinan yang terjadi di dalam prosesnya.  Memberikan alasan lebih lanjut mengenai keputusan F Partai Demokrat untuk belum menandatangani berkas usulan hak angket kasus Bank Century.
Komisi XI	Body ( paragraf 15 )	Dalam salah satu sidangnya menunjuk BPK untuk melakukan audit investigasi aliran dana Bank Century.
Ketua BPK Hadi Purnomo	Body (paragraf 15 )	Memberikan laporan hasil audit Bank Century kepada DPR sebelum reses awal Desember.
Bank Indonesia	Body ( paragraf 16)	Melaporkan dugaan adanya tindak pidana dalam kasus Bank Century kepada kepolisian.
Hak angket BBM	Body ( paragraf 18)	Menjadi perbandingan mengenai hasil hak angket sebelumnya yang diajukan oleh DPR.
Gayus Lumbuun	Body ( paragraf 19-20)	Memberikan opini mengenai proses audit yang dilakukan oleh BPK.
PPATK	Body (paragraf 20)	Diharapkan bisa memberikan data-

Polisi dan KPK		Body (paragraf 20)	data keuangan kepada BPK, namun ternyata tidak bisa karena bertentangan dengan undang-undang.
Andi Rahmat		Body ( paragraf 21)	Menurut undang-undang hanya kepada dua lembaga tersebut PPATK bisa memberikan data aliran dananya.
Partai Golkar		Closure ( paragraf 22 )	Memberikan opini mengenai fungsi dan tujuan diusulkannya hak angket.
Aburizal Bakrie		Closure ( paragraf 22 )	Merupakan sponsor hak angket menurut pernyataan Taufik Kiemas.
<b>Pelantun Wacana</b>			Memberikan pernyataan terkait dengan <i>statement</i> Taufik Kiemas yang menyebutkan bahwa hak angket disponsori oleh Golkar.
Ketua DPR, Marzuki Alie	“...pengajuan hak angket kasus Bank Century memerlukan waktu dan proses panjang, dimulai dari pengusul hingga dibentuk panitia khusus. Apalagi, saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang mengaudit kasus tersebut.”	Lead (kal pertama - 2)	Pernyataan ini memberikan kesan bahwa hak angket kasus Bank Century tidak sekedar diusulkan dan kemudian lolos, namun harus menempuh proses yang sudah ditetapkan oleh DPR.

<p>Arbi Sanit</p>	<p>“Saya menginginkan kita bisa bersabar untuk menunggu hasil audit BPK, <i>toh</i> menurut BPK laporan itu akan diserahkan 18 November mendatang. Itu kan tinggal beberapa hari lagi,”</p> <p>“...para pengusul masih bersifat perorangan, belum mewakili fraksi. Nanti dalam proses selanjutnya ketika sudah masuk ke dalam Badan Musyawarah barulah mengatasmamakan fraksi,”</p> <p>“...surat usulan hak angket itu pasti akan ditindaklanjuti. Namun, laporan audit BPK juga akan diterima, sehingga ada dasar dalam melakukan hak angket. Setelah kita menerima laporan audit BPK, maka kita bisa mengetahui kemana arahnya, karena dari laporan itu kita bisa mengetahui letak permasalahan hukumnya. Barulah kita bisa memanggil orang yang terlibat dalam kasus itu satu per satu, di sinilah hukum berbicara.”</p> <p>“...usulan pengajuan hak angket itu baru tahap awal. “Kalaupun</p>	<p>Body (paragraf 2, kal pertama )</p> <p>Body (paragraf 4, kal pertama )</p> <p>Body (paragraf 6, kal pertama – 3 )</p> <p>Body (paragraf 7, kal pertama – 3 )</p>	<p>Pernyataan ini memberikan kesan bahwa audit BPK merupakan sesuatu hal yang penting dan dari situ, bisa berpikir apakah hak angket kasus Bank Century ini diperlukan atau tidak.</p> <p>Pernyataan ini menguatkan kesan bahwa para pengusul hak angket masih bersifat individual, bukan atas nama fraksi.</p> <p>Pernyataan yang dilantunkan oleh Marzuki Alie selaku Ketua DPR ini memberikan kesan, bahwa ketua DPR berkomitmen untuk menindaklanjuti proses pengusulan hak angket namun juga menerima laporan dari BPK sehingga hak angket ini memiliki dasar hukum untuk diusulkan.</p> <p>Pernyataan pengamat politik ini menguatkan pernyataan dari</p>
-------------------	---	---	---

<p>Arie Sudjito</p>	<p>disetujui, prosesnya masih panjang, jadi jangan punya pikiran apa-apa. Saat ini belum ada ujung pangkalnya, karena pansusnya belum terbentuk,”</p> <p>“...hak angket merupakan hak yang dimiliki anggota DPR ketika ada kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan undang-undang.”</p> <p>“...yang paling penting adalah menunggu laporan BPK untuk memastikan tingkat pelanggaran seberapa besar, implikasi, serta prosesnya nanti seperti apa. Laporan BPK itu merupakan data-data yang kuat untuk menelusuri dan bertanya kepada pemerintah.“</p> <p>“...akan terjadi kompromi-kompromi politik dalam penyelesaian kasus Century, tapi pasti dilandasi dengan solusi terbaik.”</p>	<p>Body (paragraf 8, kal pertama)</p> <p>Body (paragraf 9, kal pertama – 2 )</p> <p>Body (paragraf 10, kal kedua)</p>	<p>Marzuki Alie mengenai proses hak angket kasus Bank Century yang masih panjang.</p> <p>Pernyataan ini menguatkan kembali fungsi hak angket yang diusulkan oleh DPR sekaligus menguatkan wacana di berita sebelumnya bahwa hak angket bukan untuk menjatuhkan kekuasaan.</p> <p>Pernyataan ini mendukung pernyataan Marzukie Alie mengenai laporan audit BPK yang harus disertakan ketika mengusulkan hak angket kasus Bank Century.</p> <p>Pernyataan yang merupakan dugaan dari pengamat politik ini memberikan kesan akan adanya politisasi dalam upaya penyelesaian kasus Bank Century, sekaligus menguatkan wacana Anas Urbaningrum pada berita</p>
---------------------	--	---	---

<p>Sutan Batoegana</p>	<p>“Yang diperlukan dalam penyelesaian kasus ini tidak hanya langkah politik, melainkan juga langkah substantif atas sebuah audit, tentang bagaimana pendalaman atas materi atau masalah yang ada dalam kasus Bank Century ini, dengan begitu, setiap langkah kebijakan politik yang diambil didasari oleh argumentasi-argumentasi yang secara substantif ekonomi, kebijakan perbankan, ataupun hukum dapat dipertanggungjawabkan.”</p> <p>“Kalaupun nantinya sekadar politisasi, hal itu mungkin populer. Tapi bisa menghambat tercapainya target substansi dari sebuah <i>government reform</i> dalam perbankan Indonesia.”</p> <p>“...mengormati hak DPR mengajukan hak angket. Namun, Partai Demokrat mendahulukan proses hukum yang sedang</p>	<p>Body (paragraf 11, kal pertama – kedua )</p> <p>Body (paragraf 12, kal pertama – 2 )</p> <p>Body (paragraf 13, kal pertama – 2 )</p>	<p>sebelumnya.</p> <p>Argumen yang dilantunkan secara <i>mendetail</i> ini sekali lagi menguatkan wacana hak angket yang penuh dengan berbagai macam kepentingan sekaligus mengingatkan pentingnya audit BPK dalam proses pengusulan hak angket ini.</p> <p>Pernyataan yang merupakan dugaan ini memberikan kesan bahwa pengusulan hak angket ini merupakan kebijakan yang politis dan mempunyai dampak yang bisa menghambat reformasi ekonomi Indonesia.</p> <p>Memberikan kesan bahwa F – PD merupakan fraksi yang diplomatis dan menjunjung tinggi hukum.</p>
------------------------	---	---	--

	<p>berjalan.”</p> <p>“Tidak ada niat, bahkan berburuk sangka pada teman-teman DPR. Tujuan kita sama, tapi cara berbeda. Kita hargai hak teman-teman yang mengadakan hak angket”</p> <p>“...sidang Komisi XI telah memutuskan memerintahkan BPK melakukan audit investigasi aliran dana ke Bank Century. Ketua BPK Hadi Purnomo berjanji memberikan laporan audit inverigasi kepada DPR sebelum reses, awal Desember.”</p> <p>“ Bank Indonesia sudah melaporkan dugaan adanya tindak pidana dalam kasus Bank Century kepada kepolisian. Karena itu, ranah hukum itu kita jalankan dulu. Kalau tidak memuaskan, maka bukan tidak mungkin kita (Fraksi Demokrat) bergabung dengan teman-teman,”</p> <p>“DPR agar serius menggunakan</p>	<p>Body (paragraf 14, kal pertama - 2)</p> <p>Body (paragraf 15, kal pertama – 2 )</p> <p>Body (paragraf 16, kal pertama – 2 )</p> <p>Body (paragraf 17, kal pertama)</p>	<p>Pernyataan ini melemahkan wacana pemakzulan presiden oleh hak angket yang diusulkan DPR sekaligus menguatkan kesan bahwa F – PD merupakan fraksi yang diplomatis dan menghormati keputusan fraksi lain.</p> <p>Memberikan kesan bahwa permintaan audit Bank Century oleh BPK, merupakan keputusan bersama melalui sidang di Komisi XI dan laporan tersebut akan segera diperoleh DPR awal Desember.</p> <p>Memberikan kesan bahwa Bank Indonesia juga telah berperan untuk melaporkan kasus ini ke ranah hukum, sekaligus menguatkan pembahasan kasus Bank Century dalam ranah hukum menurut F – PD.</p> <p>Memberikan kesan bahwa tujuan pengusulan hak angket ini</p>
--	--	---	--



<p>Gayus Lumbuun</p>	<p>hak angket tersebut”</p> <p>“...beberapa hak angket sebelumnya seperti hak angket BBM yang kandas dan tidak memuaskan rakyat”</p> <p>”...menghormati proses audit yang dilakukan BPK dalam kasus Bank Century. Namun, proses tersebut tidak bisa menemukan akar persoalan karena hanya bersifat teknis. “</p> <p>“BPK itu sifatnya <i>technical auditing</i>, sifatnya teknis. PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan) tidak mau memberi data kepada BPK karena undang-undang mengatakan laporan PPATK hanya diberikan</p>	<p>Body (paragraf 17, kal pertama – 2 )</p> <p>Body (paragraf 19, kal pertama - 2)</p> <p>Body (paragraf 20, kal pertama)</p>	<p>melenceng dari fungsi hak angket sesungguhnya, sampai pernyataan ini harus dimunculkan.</p> <p>Memberikan kesan bahwa terdapat kemungkinan hak angket ini tidak bisa berjalan sesuai dengan fungsinya dengan membandingkannya dengan hak angket terdahulu.</p> <p>Pernyataan ini memberikan kesan bahwa tidak ada persetujuan yang cukup besar terkait dengan pengusulan hak angket kasus Bank Century, namun pernyataan ini kontra dengan pernyataan Marzukie Alie, Arie Sudjito dan Sutan Batoegana.</p> <p>Pernyataan ini menjelaskan kembali mengenai sifat audit BPK yang tidak substansial namun hanya bersifat teknis semata, tentunya hal ini juga kontra dengan pernyataan Marzukie Alie, Arie Sudjito dan Sutan Batoegana. Dalam pernyataannya juga memberikan</p>
----------------------	--	---	---

	<p>kepada polisi dan KPK,”</p>		<p>kesan bahwa audit BPK juga belum bisa digunakan untuk mengetahui aliran dana Bank Century karena PPATK tidak memberikan datanya kepada BPK.</p>
Andi Rahmat	<p>“..hak angket sangat dibutuhkan untuk membongkar kasus Bank Century hingga tuntas. Kita inginkan agar angket Bank Century bisa sampai kepada hulu persoalan,”</p>	<p>Body (paragraf 21, kal pertama - 2)</p>	<p>Pernyataan ini menegaskan kembali manfaat hak angket untuk menyelesaikan kasus Bank Century ini sampai tuntas.</p>
Aburizal Bakrie	<p>“Partai Golkar tidak mengeluarkan instruksi khusus soal kasus Bank Century..”</p> <p>“Yang penting ada penyelesaian dan penjelasan sejelas-jelasnya soal Century ini,”</p>	<p>Body (paragraf 22, kal pertama)</p> <p>Body (paragraf 22, kal 3)</p>	<p>Pernyataan ini melemahkan wacana bahwa sponsor hak angket adalah Partai Golkar seperti yang dinyatakan oleh Taufik Kiemas pada berita sebelumnya.</p> <p>Pernyataan ini memberikan kesan bahwa Partai Golkar tidak terlalu peduli dengan cara yang akan digunakan dalam penyelesaian persoalan Bank Century.</p>

**SUB FRAME SELEKSI**

Jurnal Nasional dalam teks beritanya memberikan porsi yang besar terhadap wacana proses hak angket yang masih panjang dengan melakukan *include* terhadap opini – opini yang menguatkan wacana tersebut. Secara kebetulan wacana ini menguatkan alasan F-PD yang belum menandatangani berkas usulan hak angket kasus Bank Century.

## ANALISIS SALIANSI

STRUKTUR RETORIS	STRUKTUR SINTAKSIS	FUNGSI
<p><b>Catchphrases</b> (frasa yang menarik dan menonjol dari sebuah wacana)</p> <p>“...pengajuan hak angket kasus Bank Century memerlukan waktu dan proses panjang...”</p> <p>“...yang paling penting adalah menunggu laporan BPK..”</p> <p>“...Partai Demokrat mendahulukan proses hukum yang sedang berjalan...”</p> <p>“...DPR agar serius menggunakan hak angket tersebut..”</p>	<p>Lead, kalimat pertama</p> <p>Body, (paragraf 9, kalimat pertama)</p> <p>Body, (paragraf 13, kal 2)</p> <p>Body, (paragraf 17, kal pertama)</p>	<p>Pernyataan ini memberi gambaran bahwa perjalanan hak angket untuk sampai pada tahap pembentukan panitia khusus masih panjang.</p> <p>Lanjutan Arie Sudjito ini menonjolkan laporan dari BPK sebagai kunci untuk menyelesaikan permasalahan Bank Century ini, termasuk kejelasan nasib hak angket yang telah diusulkan.</p> <p>Pernyataan ini memberikan kesan bahwa Partai Demokrat menganggap proses hukum lebih penting daripada upaya penyelesaian persoalan Bank Century melalui pengusulan hak angket.</p> <p>Pernyataan ini menggambarkan bahwa selama ini DPR tidak sungguh-sungguh berusaha untuk menggunakan hak angket secara maksimal, dan upaya pengusulan hak angket tersebut terkesan hanya untuk</p>

		meraih dukungan dari rakyat saja, atau bahkan bersifat politis.
<p><b>Keyword</b> (Sebuah kata / atau bisa juga frase yang menjadi inti sikap atau bingkai yang dibuat atas sebuah wacana. <i>Keyword</i> ini sangat mungkin bersifat denotatif karena lebih lugas dalam menyampaikan sikap.)</p> <p>“Saya menginginkan kita bisa bersabar untuk menunggu hasil audit BPK, <u>toh</u> menurut BPK laporan itu,…”</p> <p>“...para pengusul masih <u>bersifat perorangan</u>, belum mewakili fraksi.”</p> <p>“...akan terjadi <u>kompromi-kompromi politik</u> dalam penyelesaian kasus Century,…”</p>	<p>Body, (paragraf 2, kal pertama)</p> <p>Body, (paragraf 4, kal pertama)</p> <p>Body, (paragraf 10, kal 2)</p>	<p>Sebuah ekspresi dari Marzuki Alie yang menggambarkan bahwa audit BPK akan segera diserahkan kepada DPR, memberikan kesan ketidak mauan para pengusul hak angket untuk berkompromi dengan waktu dan mendesak kepada DPR untuk segera menindaklanjuti usulan hak angket tersebut.</p> <p>Pernyataan ini melemahkan fakta 139 anggota DPR dari delapan fraksi yang sudah menandatangani usulan hak angket kasus Bank Century. Dari 139 anggota DPR tersebut ternyata hanya bersifat pribadi saja bukan mewakili keputusan fraksi.</p> <p>Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa pengusulan hak angket kasus Bank Century ini hanya bersifat politis yang bertujuan untuk menaikkan nilai tawar beberapa partai dalam dinamika politik di</p>

<p>“...nantinya <u>sekedar politisasi</u>, hal itu mungkin populer.”</p>	<p>Body, (paragraf 12, kal pertama)</p>	<p>Indonesia. Pemilihan kata ‘sekedar politisasi’ menonjolkan kesan bahwa upaya pengusulan hak angket tidak semata-mata bertujuan untuk kepentingan publik namun lebih pada tujuan untuk kepentingan tertentu.</p>
<p><b>Exemplaar</b> (Perbandingan yang menguatkan bingkai, mengaitkan bingkai dengan contoh)</p> <p>“...tidak hanya langkah politik, melainkan juga langkah substantif atas sebuah audit, tentang bagaimana pendalaman atas materi atau masalah yang ada dalam kasus Bank Century ini,”</p> <p>“...hak angket sebelumnya, seperti hak angket BBM, yang kandas dan tidak memuaskan rakyat.”</p>	<p>Body, (paragraf 11, kal pertama)</p> <p>Body, (paragraf 18, kal pertama)</p>	<p>Pernyataan ini menjabarkan langkah-langkah yang seharusnya ditempuh ketika melakukan penyelesaian terhadap persoalan Bank Century. Penjabaran ini menggambarkan bahwa selama ini upaya penyelesaian kasus Bank Century tidak sesuai dengan langkah-langkah tersebut.</p> <p>Pemberian contoh hak angket BBM ini memberikan gambaran bahwa hak angket yang telah dilakukan oleh DPR sebelumnya, ternyata tidak memberikan hasil yang terbaik untuk rakyat.</p>
<p><b>Metafora</b> (Perumpamaan; pengandaian; kiasan)</p>		

<p>“...seperti hak angket BBM, yang <u>kandas</u>...”</p>	<p>Body, (paragraf 18, kal pertama)</p>	<p>Kata ‘kandas’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti harafiah terlanggar (terantuk) dalam dasar laut, maka dalam konteks ini pemilihan kata ‘kandas’ bukan gagal memperkuat kesan bahwa ada sesuatu hal yang menyebabkan hak angket BBM itu harus terhenti.</p>
<p><b>Depiction (to picture in words; describe)</b> (penggambaran oleh kata-kata, menguraikan, pelukisan melalui kata-kata sehingga memiliki kesan tertentu)</p> <p>“...setiap langkah kebijakan politik yang diambil didasari oleh argumentasi-argumentasi yang secara substantif ekonomi, kebijakan perbankan, ataupun hukum dapat dipertanggungjawabkan.”</p>	<p>Body, (paragraf 11, kal 2)</p>	<p>Penggambaran yang dijabarkan ini memperkuat bingkai bahwa penyelesaian kasus Bank Century ini harus dipikirkan secara menyeluruh tidak hanya aspek politis seperti pengusulan hak angket saja yang kemudian diupayakan.</p>
<p><b>SUB FRAME SALIANSI</b></p> <p>Jurnal Nasional melakukan penonjolan gagasan yang menguatkan bahwa proses hak angket masih panjang selain itu juga terdapat gagasan bahwa penyelesaian kasus Bank Century tidak hanya dilakukan dengan pengusulan hak angket semata namun juga perlu untuk melihat aspek – aspek lain yang penting bagi penyelesaian persoalan tersebut.</p>		

## MEDIA FRAME

<b>SUB FRAME SELEKSI</b>	<b>SUB FRAME SALIANSI</b>
<p>Jurnal Nasional dalam teks beritanya memberikan porsi yang besar terhadap wacana proses hak angket yang masih panjang dengan melakukan <i>include</i> terhadap opini – opini yang menguatkan wacana tersebut. Secara kebetulan wacana ini juga menguatkan alasan F-PD yang belum menandatangani berkas usulan hak angket kasus Bank Century.</p>	<p>Jurnal Nasional melakukan penonjolan gagasan yang menguatkan bahwa proses hak angket masih panjang selain itu juga terdapat gagasan bahwa penyelesaian kasus Bank Century tidak hanya dilakukan dengan pengusulan hak angket semata namun juga perlu untuk melihat aspek – aspek lain yang penting bagi penyelesaian persoalan tersebut.</p>
<p style="text-align: center;"><b>FRAME JURNAL NASIONAL</b></p> <p>Jurnal Nasional dalam teks beritanya memandang bahwa proses hak angket kasus Bank Century yang diusulkan oleh DPR masih harus berjalan cukup panjang dengan melewati berbagai macam tahapan yang terjadi di dalamnya, mulai dari penantian terhadap audit dari BPK sampai dengan proses birokrasi di DPR. Secara kebetulan gagasan ini juga menguatkan alasan dari Fraksi Partai Demokrat untuk belum menandatangani berkas usulan hak angket.</p>	

## ANALISIS BERITA 4

**Judul Berita** : Usulan Angket Century Tak Perlu Disikapi Berlebihan  
**Rubrik** : Politik Hukum Keamanan  
**Edisi** : 16 November 2009  
**Penulis** : Friedierich Batari

## ANALISIS SELEKSI

STRUKTUR SKRIPTURAL	STRUKTUR TEMATIS	STRUKTUR SINTAKSIS	FUNGSI
<b>Obyek Wacana :</b> Pengusulan hak angket kasus Bank Century oleh 139 anggota DPR	<b>Jenis Wacana :</b> Opini inisiator hak angket dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap pengusulan hak angket kasus Bank Century oleh DPR (Mukhammad Misbakhum)  Pernyataan sikap dari Fraksi Partai Demokrat mengenai keputusan belum menandatangani berkas usulan. (Anas Urbaningrum)	<i>Lead</i> sampai dengan paragraf ke 5  Body, terdapat dalam sub judul “Terburu-buru” tersebar dari paragraf 6 sampai dengan <i>closure</i> , paragraf 9	Memberikan arahan kepada pembaca bahwa berita ini mengacu pada wacana pengusulan hak angket yang wajar dan tidak berlebihan.  Sebagai informasi tambahan yang kembali ditekankan dalam teks berita ini.
<b>Pelibat Wacana :</b>  Inisiator hak angket yang direpresentasikan oleh Mukhammad Misbakhum		<i>Lead</i> sampai dengan paragraf ke 5	Menjelaskan lebih lanjut mengenai fungsi dan tujuan pengusulan hak angket kasus Bank Century ini oleh



<p>Bank Indonesia dan Departemen Keuangan</p>		<p>Body, (paragraf 4)</p>	<p>DPR.</p> <p>Melalui wacana yang berkembang di masyarakat, kedua lembaga ini merupakan lembaga yang paling bertanggungjawab terhadap proses <i>bailout</i> Bank Century. Dalam lantunan Mukhammad Misbakhum, hak angket berfungsi juga untuk membangun kredibilitas kedua lembaga.</p>
<p>Fraksi Partai Demokrat yang direpresentasikan oleh Anas Urbaningrum</p>		<p>Body, terdapat dalam sub judul “Terburu-buru” tersebar dari paragraf 6 sampai dengan <i>closure</i>, paragraf 9</p>	<p>Kembali menjelaskan alasan mengapa Fraksi Partai Demokrat belum menandatangani berkas pengusulan hak angket.</p>
<p>Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)</p>		<p>Body, (paragraf 7 dan 8)</p>	<p>Berdasarkan sidang Komisi XI BPK bertugas untuk melakukan audit kepada Bank Century.</p>
<p><b>Pelantun Wacana :</b> Mukhammad Misbakhum</p>	<p>“...meski aroma politik begitu kuat di balik pengajuan hak angket skandal Century, namun upaya DPR untuk menyelidiki dana talangan atau <i>bailout</i> Bank Century tidak perlu disikapi berlebihan. Pasalnya, usulan hak</p>	<p><i>Lead</i>, kalimat pertama.</p>	<p>Melalui pernyataan ini memberikan kesan bahwa inisiator hak angket sendiri mengakui upaya penyelesaian kasus Bank Century melalui jalan pengusulan hak angket ini penuh dengan berbagai</p>

	<p>angket Century merupakan mekanisme demokratis yang ditempuh DPR dalam upaya mengakomodasi aspirasi publik.”</p> <p>“Pengajuan usulan hak angket Bank Century dimaksudkan agar talangan dana ke Bank Century bisa transparan.”</p> <p>“...dengan mengungkap masalah ini, justru lebih baik bagi pemerintah karena tidak lagi menjadi bola liar di masyarakat seperti munculnya wacana gerakan <i>people power</i>. Akan tetapi aspirasi publik ini bisa dilokalisasi di DPR melalui penggunaan hak angket.”</p> <p>“Pada prinsipnya hak angket Century dimaksudkan untuk membangun kredibilitas institusi Bank Indonesia dan Departemen Keuangan.”</p> <p>“...peran DPR sebagai perpanjangan aspirasi rakyat tidak boleh dipandang sebagai intrik politik. Namun, pemberian dana talangan sebesar Rp6,7 triliun kepada Bank Century perlu diselidiki secara transparan.”</p> <p>“...usulan angket Bank Century terburu-buru dan belum memiliki</p>	<p>Body, (paragraf 2 kal pertama)</p> <p>Body, (paragraf 3 kal pertama)</p> <p>Body, (paragraf 4 kal pertama)</p> <p>Body, (paragraf 5, kal pertama)</p>	<p>macam kepentingan.</p> <p>Pernyataan ini menguatkan tujuan utama dari hak angket kasus Bank Century yang sedang diusulkan ini.</p> <p>Pernyataan ini memberikan kesan bahwa hak angket ini tidak akan mempersulit kinerja pemerintah namun malah membantu pemerintah untuk lebih mendengar dan memperhatikan aspirasi dari rakyat.</p> <p>Pernyataan ini melemahkan wacana tujuan hak angket untuk memberhentikan pemerintahan, karena melalui pernyataan ini hak angket akan membantu pemerintah dalam membangun lembaga keuangan yang kredibel.</p> <p>Pernyataan ini memberikan kesan pandangan masyarakat terhadap DPR saat ini negatif sekaligus</p>
--	--	--	--

<p>Anas Urbaningrum</p>	<p>dasar hukum. Fraksi terbesar di DPR ini melihat tendensi politik lebih menonjol dalam usul hak angket itu.”</p> <p>“Bukankah audit BPK belum selesai? Fraksi Partai Demokrat konsisten dengan penegakan hukum melalui jalur hukum, bukan dengan jalur non hukum. Kami tidak setuju dengan politisasi.”</p> <p>“...usul hak angket itu biasa sebagai hak dewan, dan tidak perlu dikhawatirkan.”</p> <p>“fraksi-fraksi partai politik koalisi sama sikapnya dengan Fraksi Partai Demokrat, yakni menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kalau ada anggota fraksinya yang ikut mengusulkan hak angket, itu urusan internal masing-masing fraksi.”</p> <p>“Fraksi Partai Demokrat berpendirian bahwa siapa pun yang bersalah berdasarkan hasil audit, harus mendapatkan hukuman yang adil, tanpa kecuali. Kami ingin keadilan ditegakkan, tetapi tidak dengan jalan</p>	<p>Terdapat pada subjudul “Terburu-buru”, Body (paragraf 6, kal pertama)</p> <p>Body, (paragraf 7 kal pertama)</p> <p>Body, (paragraf 8 kal pertama)</p> <p>Body, (paragraf 8 kal kedua)</p>	<p>memperjelas fungsi DPR sebagai perpanjangan aspirasi rakyat.</p> <p>Lagi-lagi lantunan ini dipilih kembali untuk menegaskan sikap dari Fraksi Partai Demokrat yang menolak untuk menandatangani berkas usulan hak angket kasus Bank Century.</p> <p>Lantunan ini dipilih kembali untuk memberikan kesan bahwa Fraksi Partai Demokrat adalah fraksi yang menjunjung tinggi hukum.</p> <p>Lantunan ini memperkuat pernyataan dari Mukhammad Misbakhum yang menyatakan bahwa hak angket justru mempunyai manfaat yang baik untuk pemerintah.</p> <p>Pernyataan ini memperkuat fakta bahwa baru 139 anggota DPR saja yang menandatangani berkas usulan dan sikap tersebut belum bisa</p>
-------------------------	--	--	---

	politisasi.”	Closure, paragraf 9 kal pertama.	dikatakan mewakili fraksi.  Lantunan ini menguatkan kesan bahwa Fraksi Partai Demokrat merupakan fraksi yang menjunjung tinggi hukum dan bertujuan ingin menegakkan keadilan.
<p><b>SUB FRAME SELEKSI</b></p> <p>Dalam teks berita “Usulan Angket Century Tidak Perlu Disikapi Berlebihan”, Jurnal Nasional melakukan pemilihan terhadap dua pihak yang opininya saling mendukung satu sama lain. Pemilihan Jurnal Nasional terhadap salah satu inisiator dari partai koalisi (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) menguatkan kesan bahwa hak angket ini akan digunakan untuk mendukung kinerja pemerintahan. Secara kebetulan perusahaan milik Mukhammad Misbakhum (PT Selalang Prima Int) narasumber dari teks berita ini ternyata diduga menerima surat kredit impor L/C dari Bank Century senilai US \$ 22,5 juta pada tahun 2007.</p>			

## ANALISIS SALIANSI

STRUKTUR RETORIS	STRUKTUR SINTAKSIS	FUNGSI
<p><b>Catchphrases</b> (frasa yang menarik dan menonjol dari sebuah</p>		

<p>wacana)</p> <p>“...upaya DPR untuk menyelidiki dana talangan atau <i>bailout</i> Bank Century tidak perlu disikapi berlebihan.”</p> <p>“...usulan hak angket Century merupakan mekanisme demokratis yang ditempuh DPR.”</p> <p>“...usulan hak angket itu biasa sebagai hak dewan, dan tidak perlu dikhawatirkan.”</p> <p>“Kami ingin keadilan ditegakkan, tetapi tidak dengan jalan politisasi.”</p>	<p>Lead, kalimat pertama</p> <p>Lead, kalimat ketiga</p> <p>Body, (paragraf 8 kal pertama)</p> <p>Closure, kalimat kedua</p>	<p>Pernyataan ini memberikan penonjolan terhadap wacana hak angket yang tidak perlu disikapi berlebihan, penempatan pada <i>lead</i> menjadikan kalimat ini sebagai penentu wacana utama teks berita.</p> <p>Kalimat ini menguatkan kesan hak angket kasus Bank Century sebagai sesuatu yang wajar dan bagian dari proses deokratisasi di Indonesia.</p> <p>Pernyataan yang kembali ‘terpilih’ ini masih menguatkan kesan bahwa hak angket bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti oleh Fraksi Partai Demokrat sebagai fraksi pendukung pemerintah.</p> <p>Lantunan ini menjadi pilihan kembali dalam proses menguatkan kesan atas sikap Fraksi Partai Demokrat yang konsisten dalam proses penegakan hukum.</p>
<p><b>Keyword</b> (Sebuah kata / atau bisa juga frase yang menjadi inti sikap atau bingkai yang dibuat atas sebuah wacana. <i>Keyword</i> ini sangat mungkin bersifat denotatif karena lebih lugas dalam menyampaikan</p>		

<p>sikap.)</p> <p>“...meski <u>aroma politik</u> begitu kuat di balik pengajuan hak angket skandal Century...”</p> <p>“...tidak boleh dipandang sebagai <u>intrik politik</u>.”</p>	<p>Lead, kalimat pertama</p> <p>Body, (paragraf 5 kal pertama)</p>	<p>Pernyataan ini kembali menguatkan kesan bahwa pengusulan hak angket kasus Bank Century penuh dengan berbagai macam kepentingan politik tertentu dan tidak berdasarkan pada kepentingan rakyat.</p> <p>Penggunaan kata ‘intrik’ yang memiliki arti persekongkolan rahasia, pada pernyataan ini menonjolkan kesan bahwa terdapat arahan yang melihat pengusulan hak angket ini sebagai sarana untuk menjatuhkan lawan politik dalam proses pengusulan hak angket ini.</p>
<p><b>Exemplaar</b> (Perbandingan yang menguatkan bingkai, mengaitkan bingkai dengan contoh)</p> <p>“...justru lebih baik bagi pemerintah karena tidak lagi menjadi bola liar di masyarakat seperti munculnya wacana gerakan <i>people power</i>.”</p> <p>“fraksi-fraksi partai politik koalisi sama sikapnya dengan Fraksi Partai Demokrat, yakni menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)”</p>	<p>Body, (paragraf 3 kal pertama)</p> <p>Body, (paragraf 8 kal kedua)</p>	<p>Pernyataan ini menguatkan bingkai bahwa hak angket ini tidak akan ‘merepotkan’ pemerintah melainkan dapat menjadi penampung aspirasi rakyat yang sudah tersusun dengan rapi.</p> <p>Lantunan ini kembali digunakan untuk menonjolkan wacana bahwa partai koalisi masih memiliki sikap yang sama dengan pimpinannya yaitu Fraksi Partai Demokrat.</p>

<p><b>Depiction (to picture in words; describe)</b> (penggambaran oleh kata-kata, menguraikan, pelukisan melalui kata-kata sehingga memiliki kesan tertentu) “Pada prinsipnya hak angket Century dimaksudkan untuk membangun kredibilitas institusi Bank Indonesia dan Departemen Keuangan.”</p>	<p>Body, (paragraf 4 kal pertama)</p>	<p>Pernyataan ini menggambarkan tujuan mulia dari hak angket kasus Bank Century yang diusulkan demi kredibilitas lembaga pemerintahan.</p>
<p><b>Metafora</b> (Perumpamaan; pengandaian; kiasan)</p> <p>“...tidak lagi menjadi <u>bola liar</u> di masyarakat.”</p> <p>“...peran DPR sebagai <u>perpanjangan aspirasi</u> rakyat tidak boleh dipandang sebagai intrik politik.”</p>	<p>Body, (paragraf 3 kal pertama)</p> <p>Body, (paragraf 5 kal pertama)</p>	<p>Penggunaan frasa ‘bola liar’ menggambarkan bahwa persoalan kasus Bank Century ini memiliki potensi menggelinding ke segala arah dan tidak bisa dikendalikan lagi.</p> <p>Pernyataan ini menegaskan kembali fungsi dari DPR sebagai penampung aspirasi rakyat, bukan lembaga yang penuh dengan kepentingan politik.</p>
<p><b>SUB FRAME SALIANSI</b> Gagasan yang ditawarkan oleh Jurnal Nasional dalam teks berita “Usulan Angket Century Tidak Perlu Disikapi Berlebihan”, merupakan wacana seputar hak angket yang merupakan hak DPR yang wajar, tidak perlu dikhawatirkan, dan justru bisa mendukung kinerja pemerintah, selain itu gagasan yang menguatkan keputusan dari Fraksi Partai Demokrat yang belum menandatangani berkas usulan hak angket juga masih menjadi hal penting yang ikut ditonjolkan.</p>		

## **MEDIA FRAME**

<b>SUB FRAME SELEKSI</b>	<b>SUB FRAME SALIANSI</b>
<p>Dalam teks berita “Usulan Angket Century Tidak Perlu Disikapi Berlebihan”, Jurnal Nasional melakukan pemilihan terhadap dua pihak yang opininya saling mendukung satu sama lain. Pemilihan Jurnal Nasional terhadap salah satu inisiator dari partai koalisi (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) menguatkan kesan bahwa hak angket ini akan digunakan untuk mendukung kinerja pemerintahan. Secara kebetulan perusahaan milik Mukhammad Misbakhum (PT Selalang Prima Int) narasumber dari teks berita ini, belakangan diketahui diduga menerima surat kredit impor L/C dari Bank Century senilai US \$ 22,5 juta pada tahun 2007.</p>	<p>Gagasan yang ditawarkan oleh Jurnal Nasional dalam teks berita “Usulan Angket Century Tidak Perlu Disikapi Berlebihan”, merupakan wacana seputar hak angket yang merupakan hak DPR yang wajar, tidak perlu dikhawatirkan, dan justru bisa mendukung kinerja pemerintah, selain itu gagasan yang menguatkan keputusan dari Fraksi Partai Demokrat yang belum menandatangani berkas usulan hak angket juga masih menjadi hal penting yang ikut ditonjolkan.</p>
<p style="text-align: center;"><b>FRAME JURNAL NASIONAL</b></p> <p>Jurnal Nasional dalam teks beritanya yang berjudul “Usulan Angket Century Tidak Perlu Disikapi Berlebihan” mendiskripsikan bahwa pengusulan hak angket kasus Bank Century justru bermanfaat untuk mendukung kinerja pemerintah dan merupakan sesuatu yang wajar, tidak perlu dikhawatirkan.</p>	



## ANALISIS BERITA 5

**Judul Berita** : Audit Century Selesai Pekan Depan  
**Rubrik** : Halaman Muka  
**Edisi** : 21 November 2009  
**Penulis** : Andi Syahrir/Rhama Deny/Friedierich Batari

## ANALISIS SELEKSI

STRUKTUR SKRIPTURAL	STRUKTUR TEMATIS	STRUKTUR SINTAKSIS	FUNGSI
<p><b>Obyek Wacana :</b> Laporan audit BPK atas Bank Century yang akan selesai pada akhir November 2009 ini.</p> <p>Konferensi pers dari Fraksi Partai Demokrat DPR tentang sikap Demokrat terhadap usulan hak angket.</p>	<p><b>Jenis Wacana :</b> Pernyataan dari BPK yang akan menyerahkan laporan hasil auditnya pada akhir November 2009. (Moermahadi dan Hadi Purnomo) Pernyataan sikap dari pemerintah mengenai laporan hasil audit BPK dan mengenai kebijakan FPJP dan CAR. (Boediono)</p> <p>Pernyataan sikap Demokrat (Achsanul Qosasi, Ruhut Sitompul dan Ramadhan Pohan)</p>	<p><i>Lead</i>, sampai dengan paragraf ke 3.</p> <p>Body, (paragraf 4 - 10)</p> <p>Terdapat dalam sub judul “Hak Angket”, Body (paragraf 11-21)</p>	<p>Sebagai informasi awal yang ingin disampaikan dalam teks berita ini, namun pada akhirnya informasi ini hanya menjadi informasi tambahan yang utama karena hanya terdiri atas 3 paragraf, hal ini berbeda dengan informasi lain yang terdapat dalam paragraf 4 – 10, terdiri dari 6 paragraf yang pemaparannya lebih mendetail dari informasi pada paragraf 1-3.</p> <p>Pembentukan sub judul ini berfungsi sebagai informasi tambahan yang terkait dengan judul utama, namun pada akhirnya informasi inilah yang merupakan gagasan utama dari teks berita,</p>

	<p>Pernyataan sikap dari anggota partai koalisi mengenai nasib hak angket kasus Bank Century di DPR. (Nasir Jamil;F – PKS dan Masayak Johan;F - PPP)</p>	<p>Terdapat dalam sub judul “Penggembosan”, Body – Closure. (paragraf 22 - 26)</p>	<p>karena dipaparkan secara mendetail dan terdiri atas 10 paragraf.</p> <p>Pembentukan sub judul “Penggembosan” ini berfungsi untuk menguatkan gagasan yang terdapat dalam sub judul “Hak Angket”</p>
<p><b>Pelibat Wacana :</b></p> <p>Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang direpresentasikan oleh :</p> <p>Moermahadi</p> <p>Hadi Purnomo</p> <p>Pemerintah, yang direpresentasikan oleh :</p> <p>Boediono</p>	<p>Lead, sampai dengan paragraf 5.</p> <p>Lead, sampai dengan paragraf 2.</p> <p>Body, (paragraf 3)</p> <p>Body, (paragraf 4 - 10)</p> <p>Body, (paragraf 4 – 10)</p>	<p>Menjelaskan proses audit Bank Century yang akan segera selesai.</p> <p>Menjanjikan proses audit keuangan terhadap Bank Century yang akan selesai pada akhir bulan November 2009.</p> <p>Menanggapi proses audit terhadap Bank Century yang akan segera selesai dan mempercayakan kasus ini kepada BPK untuk menjelaskan aliran dana Bank Century sekaligus</p>	

<p>Gubernur Bank Indonesia</p>		<p>Body, (paragraf 6)</p>	<p>menjelaskan kebijakan pemberian FPJP dan CAR yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia saat ia menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.</p>
<p>Kebijakan FPJP dan CAR</p>		<p>Body, (paragraf 7 - 10)</p>	<p>Atribut yang dijabat oleh Boediono ketika mengeluarkan kebijakan FPJP dan CAR di Bank Indonesia.</p>
<p>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)</p>		<p>Body, (paragraf 7)</p>	<p>Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia saat proses penyelamatan Bank Century. Kebijakan ini menuai pro dan kontra.</p>
<p>Fraksi Partai Demokrat, yang direpresentasikan oleh:</p>		<p>Sub judul “Hak Angket”, body (paragraf 11 - 21)</p>	<p>Undang – undang yang mendasari kebijakan FPJP dan CAR yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.</p>
<p>Achsanul Qosasi</p>		<p>Body, (paragraf 11 - 18)</p>	<p>Menyatakan sikap Fraksi Partai Demokrat mengenai keputusan untuk tidak mendukung hak angket kasus Bank Century karena menurut fraksi tersebut dana Rp 6,7 trilyun bukan berasal dari APBN.</p>
<p>Ruhut Sitompul</p>		<p>Body, (paragraf 19 - 20)</p>	<p>Memberikan penjelasan mengenai</p>

Ramadhan Pohan	Body, (paragraf 21)	sikap F – PD yang tidak ingin didesak untuk segera menyetujui usulan hak angket.
Wakil Ketua Komisi XI DPR	Body, (paragraf 12)	Menjelaskan bahwa isu-isu mengenai adanya <i>bargaining</i> politik dalam proses pengusulan hak angket adalah tidak benar.
PMS	Body, (paragraf 12 - 14)	Atribut dari Achsanul Qosasi yang disebutkan dalam teks berita.
LPS	Body, (paragraf 12, 14, dan 16)	Dana Rp 6,7 trilyun yang digunakan untuk menyelamatkan Bank Century, dana ini berasal dari LPS, menurut F – PD merupakan dana PMS (Penyertaan Modal Sementara) ini.
APBN	Body, (paragraf 13 dan 15)	Lembaga yang memberikan dana Rp 6,7 trilyun kepada Bank Century, dana ini kemudian disebutkan sebagai PMS.
DPR	Body, (paragraf 11, 12, 16,	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumber yang oleh beberapa pihak disebutkan sebagai asal dari dana Rp 6,7 trilyun.
		Lembaga perwakilan rakyat yang

<p>Robert Tantular</p>		<p>19, 25) dan Closure (paragraf 26)</p> <p>Body, (paragraf 17)</p>	<p>berusaha untuk melakukan penyelesaian terhadap kasus Bank Century.</p> <p>Pemilik Bank Century yang dalam teks berita ini disebutkan telah melakukan tindakan kriminal.</p>
<p>Securitas Antha Boga</p>		<p>Body, (paragraf 17)</p>	<p>Perusahaan keuangan milik Robert Tantular yang disebutkan dalam teks berita, perusahaan ini dituduh melakukan tindakan penipuan terhadap nasabahnya.</p>
<p>Presiden</p>		<p>Body, (paragraf 18)</p>	<p>Sebagai pihak yang diduga terlibat dalam kasus Bank Century ini.</p>
<p>Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</p>		<p>Body, (paragraf 20)</p>	<p>Selain presiden partai ini juga merupakan pihak yang diduga terlibat dalam kasus Bank Century ini.</p>
<p>Ketua Dewan Pembina Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Taufik Kiemas</p>		<p>Body, (paragraf 20)</p>	<p>Sebagai Ketua Dewan Pembina PDIP yang belum menandatangani berkas usulan hak angket ini.</p>
<p>Pengusul hak angket Bank Century</p>		<p>Body, (paragraf 22)</p>	<p>Pihak yang memperkirakan terjadinya pengembosan hak angket saat rapat paripurna di DPR.</p>

Nasir Jamil, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera		Body, (paragraf 23 – 25)	Memberikan saran terhadap para pengusul hak angket agar lebih menguatkan tujuan utama diusulkannya hak angket.
Masayak Johan, anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan		Body, (paragraf 26 – 27)	Memberikan saran kepada para pengusul agar melakukan persiapan secara matang sebelum membahas pengusulan tersebut di rapat paripurna DPR
<b>Pelantun Wacana :</b>			
Moermahadi	“Hasilnya tunggu saja, paling lambat pekan depan sudah ada.”	Lead, (kal kedua)	Pernyataan dari pihak BPK yang mengumumkan bahwa audit atas Bank Century hampir selesai dilakukan.
	“semua pihak bersabar menunggu hasil kerja BPK karena tidak lama lagi akan dilansir ke publik.”	Body, (paragraf 2, kal pertama)	Pernyataan ini menguatkan kesan ketergesaan dari pihak yang berkepentingan (pengusul hak angket) terhadap laporan hasil audit BPK terhadap Bank Century ini.
Hadi Purnomo	“laporan final audit Bank Century akan rampung pada Desember, namun ternyata bisa dipercepat hingga pekan ketiga November ini.”	Body, (paragraf 3, kal pertama )	Pernyataan ini memberikan kesan bahwa BPK telah benar-benar mengusahakan penyelesaian audit BPK atas Bank Century.
Boediono	“Saya tidak mau jawab. Biar nanti	Body, (paragraf 4, kal 2 )	Kedua pernyataan ini

	<p>BPK dan sebagainya yang melakukan audit,”</p> <p>“Biar BPK saja.”</p> <p>“kebijakan fasilitas pembiayaan jangka pendek <i>menyantol</i> atau terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dikeluarkan Oktober 2008 untuk menanggapi keadaan darurat.”</p> <p>“Instrumen tersebut banyak dilakukan oleh berbagai negara pada masa krisis tahun lalu yang tujuannya membantu bank-bank yang menghadapi kesulitan saat krisis.”</p> <p>“kebijakan itu dilakukan setelah melihat perkembangan yang terjadi saat itu, yaitu memburuknya kualitas aset bank-bank yang berdampak kepada CAR. Dana pihak ketiga juga merosot,”</p> <p>“Kebijakan saat itu untuk</p>	<p>Body, (paragraf 5, kal pertama)</p> <p>Body, (paragraf 7, kal pertama)</p> <p>Body, (paragraf 8, kal pertama)</p> <p>Body, (paragraf 9, kal pertama)</p> <p>Body, (paragraf 10, kal 2)</p>	<p>mencerminkan sikap Boediono yang menyerahkan segala urusan mengenai kejelasan aliran dana <i>bailout</i> Bank Century sepenuhnya kepada BPK.</p> <p>Penjelasan Boediono ini menyatakan bahwa kebijakan FPJP dan CAR dibuat berdasarkan undang-undang sehingga bukan hanya sekedar karena permasalahan Bank Century saja.</p> <p>Penjelasan Boediono ini menguatkan statementnya mengenai kebijakan FPJP dan CAR yang dilakukan Bank Indonesia.</p> <p>Penjelasan ini memberikan kesan bahwa bank yang mengalami dampak dari memburuknya kualitas aset bank bukan hanya Bank Century saja.</p> <p>Pernyataan ini menguatkan</p>
--	---	---	---

<p>Achsanul Qosasi</p>	<p>merespons keadaan yang memburuk sangat cepat. Ini diberlakukan untuk semua bank dan sampai saat ini masih berlaku.”</p> <p>“beberapa hal yang menjadi alasan Demokrat menolak hak angket Century. Menurut dia, dana Century bukan dana <i>bail out</i>. Dana tersebut adalah Penyertaan Modal Sementara (PMS) dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan diperoleh dari premi beberapa bank anggota LPS.”</p> <p>“PMS bukan dana <i>bail out</i> dan tidak berasal dari APBN”</p> <p>“sesuai dengan prosedur PMS, maka Bank Century dikelola sementara oleh LPS selama tiga tahun. Setelah tiga tahun, akan dijual ke publik. Jika belum ada yang membeli, LPS akan mengelola selama dua tahun lagi.”</p> <p>” Hingga saat ini Bank Century dinilai sehat dan tidak terjadi</p>	<p>Sub judul “Hak Angket” Body, (paragraf 12, kal pertama)</p> <p>Body, (paragraf 13, kal pertama)</p> <p>Body, (paragraf 14, kal pertama)</p> <p>Body, (paragraf 15, kal pertama)</p>	<p><i>statement</i> sebelumnya bahwa terdapat dampak yang cukup <i>significant</i> terhadap bank-bank kecil lainnya sebelum kebijakan CAR diberlakukan.</p> <p>Pernyataan ini terdapat dalam sub judul “Hak Angket”, penggunaan sub judul ini berfungsi sebagai pengantar informasi lain yang juga terkait dengan judul utama “Angket Century Selesai Pekan Depan”</p> <p>Pernyataan pada paragraf awal (paragraf 12 - 16) sub judul ini dilantunkan oleh Achsanul Qosasi, dalam lantunannya ia memberikan alasan mengapa Fraksi Partai Demokrat menolak hak angket. Alasan tersebut melemahkan wacana yang berkembang bahwa dana talangan Bank Century merupakan uang negara yang berasal dari APBN. Selama ini yang menjadi fokus perhatian dari para pengusul hak angket adalah kerugian yang diderita oleh negara karena telah melakukan <i>bail out</i> atas Bank Century, namun melalui penjelasan dari Achsanul Qosasi</p>
------------------------	--	--	---



	<p>kerugian negara karena tidak diambil dari APBN.”</p> <p>“LPS merupakan lembaga independen sehingga otoritas pencairan dana yang ada pada lembaga tersebut tidak memerlukan izin DPR.”</p> <p>“Robert Tantular melakukan tidak kriminal karena menipu nasabah mereka melalui Securitas Antha Boga.”</p> <p>“Media dan masyarakat harus bisa berpikir jernih dalam kasus ini. Pemerintah saat ini butuh dukungan publik untuk menyukseskan program 100 hari.”</p>	<p>Body, (paragraf 16, kal pertama)</p> <p>Body, (paragraf 17, kal pertama)</p> <p>Body, (paragraf 18, kal kedua)</p>	<p>wacana ini dilemahkan dengan menyebutkan bahwa LPS (lembaga yang menangani penyelamatan Bank Century) merupakan lembaga independen, yang memiliki otoritas tersendiri dalam melakukan pencairan dana. Jurnal Nasional ternyata memberikan ruang yang cukup besar terhadap gagasan ini dalam <i>placementnya</i> di teks beritanya, hal ini terbukti dengan penempatannya pada paragraf 12 sampai dengan paragraf 16.</p> <p>Pernyataan ini memberikan kesan bahwa selama ini perusahaan keuangan yang melakukan penipuan terhadap nasabahnya bukanlah Bank Century melainkan Securitas Antha Boga.</p> <p>Pernyataan ini mengesankan bahwa selama ini media memandang pemerintah ikut bertanggungjawab terhadap kucuran dana Rp 6,7 trilyun ke Bank Century. Dalam pernyataan ini menggambarkan pula sikap masyarakat yang cenderung tidak mendukung</p>
--	--	---	---

<p>Ruhut Sitompul</p>	<p>“Demokrat tak menginginkan senjata pamungkas DPR seperti angket digunakan sia-sia seperti sebelumnya. Kami sendiri tidak takut sama sekali dengan penggunaan hak tersebut karena kami yakin bahwa tidak ada masalah dengan Bank Century,”</p> <p>“sikap PDIP yang memojokkan Demokrat dalam mendorong penggunaan hak angket. Sekarang saya tanya balik, Ketua Dewan Pembina PDIP Taufik Kiemas tidak tanda tangan sampai sekarang, masa kami didesak untuk tanda tangan.”</p>	<p>Body, (paragraf 19, kal pertama)</p> <p>Body,(paragraf 20,kal 1-2 )</p>	<p>kebijakan pemerintah.</p> <p>Pernyataan ini menggambarkan bahwa selama ini DPR terkesan tidak serius terhadap penggunaan hak angket sebelumnya dan Fraksi Partai Demokrat melalui Ruhut Sitompul dengan sikap yang terkesan bijaksana menjelaskan hal tersebut sekaligus menguatkan kesan bahwa hak angket ini bukan merupakan ancaman bagi Fraksi Partai Demokrat.</p> <p>Pernyataan ini mengesankan sikap F PDIP selaku inisiator hak angket yang terpecah belah dalam proses pengusulan hak angket kasus Bank Century ini.</p>
<p>Ramadhan Pohan</p>	<p>“Kami tegaskan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi karena kami mendukung penegakkan hukum. Kami tidak akan melindungi siapa pun yang salah,”</p>	<p>Body, (paragraf 21, kal kedua)</p>	<p>Pernyataan ini menangkis isu akan adanya <i>deal-deal</i> atau <i>bargaining</i> politik dengan partai lain yang memiliki kasus hukum, pernyataan ini mengesankan bahwa praktek politik tukar guling bisa saja terjadi dalam proses pengusulan hak</p>

<p>Nasir Jamil, anggota Fraksi PKS</p>	<p>“Jika orientasinya untuk mengungkap kebenaran dan transparansi terhadap masyarakat maka pengusul hak angket Century akan tetap solid”</p> <p>“...optimistis usulan hak angket Bank Century akan diagendakan pada rapat paripurna 1 Desember mendatang, meskipun masih ada perbaikan teknis penulisan surat usulan hak angket tersebut”</p> <p>“hak angket yang diusulkan anggota DPR periode sebelumnya kurang beruntung dan penyelesaiannya tidak jelas karena pengusulnya tidak solid.”</p>	<p>Body, (paragraf 23, kal pertama)</p> <p>Body, (paragraf 24, kal pertama)</p> <p>Body, (paragraf 25, kal pertama)</p>	<p>angket ini. Pernyataan ini juga memberikan kesan bahwa Fraksi Partai Demokrat merupakan pihak yang menjunjung tinggi hukum.</p> <p>Pernyataan ini menguatkan kesan bahwa para pengusul hak angket tidak satu suara dalam merumuskan tujuan awal penggunaan hak angket kasus Bank Century.</p> <p>Menguatkan kesan bahwa tidak akan terjadi penggemosan dalam upaya pengusulan hak angket kasus Bank Century ini.</p> <p>Menguatkan kesan bahwa hasil dari hak angket bisa melenceng sangat jauh dari tujuan awal yang telah ditetapkan.</p>
<p>Mayasak Johan, anggota Fraksi PPP</p>	<p>“agar usulan hak angket Bank Century solid dan mencapai sasaran, maka sebelum dibahas di rapat paripurna harus dipersiapkan secara matang.”</p>	<p>Body, (paragraf 26, kal pertama )</p>	<p>Memberikan kesan bahwa selama ini ada ketidaksiapan dari para pengusul hak angket terhadap tujuan maupun target dari hak angket itu sendiri.</p>

	<p>“Pada pengambilan keputusan di rapat paripurna, sebaiknya melalui mekanisme voting tertutup, sehingga para pengusul hak angket tetap bisa menggunakan haknya dengan nyaman meskipun fraksinya tidak mendukung.”</p>	<p>Closure, (paragraf 27, kal pertama )</p>	<p>Saran yang diberikan oleh Mayasak Johan dari Fraksi PPP sebagai partai koalisi ini menguatkan kesan bahwa dukungan terhadap hak angket ini belum sampai dalam tahap dukungan antar fraksi namun masih terdapat pada dukungan antar pribadi sesama anggota DPR.</p>
--	--	---	---

### SUB FRAME SELEKSI

Jurnal Nasional mendeskripsikan proses pengusulan hak angket sebagai suatu hal yang berlebihan dalam penanganan terhadap kasus Bank Century . Hal ini dapat terlihat dari seleksi Jurnal Nasional dalam teks berita berjudul “Audit Century Selesai Pekan Depan”, Jurnal Nasional melakukan *included* terhadap pernyataan sikap Boediono untuk menguatkan alasan rasional mengenai kebijakan Bank Indonesia serta opini dari Fraksi Partai Demokrat yang diberikan ruang cukup besar (10 paragraf) untuk menyampaikan gagasannya mengenai penolakan fraksi tersebut terhadap pengusulan hak angket oleh DPR.

### ANALISIS SALIANSI

STRUKTUR RETORIS	STRUKTUR SINTAKSIS	FUNGSI
<p><b>Catchphrases</b> (frasa yang menarik dan menonjol dari sebuah wacana)</p> <p>Demokrat menyebut bantuan Rp 6,7 trilyun kepada Bank Century bukan <i>bail out</i>.</p>	<p><i>Bridging</i>. (penghubung antara judul utama dengan teks berita)</p>	<p>Kalimat ini merupakan <i>bridging</i> yang menunjukkan hubungan berita dengan informasi yang terkandung dalam kalimat tersebut. Sehingga berita tidak hanya mengandung informasi yang terdapat pada</p>

<p>“Biar BPK saja.”</p>	<p>Body, (paragraf 3, kal pertama)</p>	<p>judul saja, namun juga informasi yang terkait dengan judul teks berita di atas. <i>Bridging</i> ini menggarisbawahi dan menegaskan gagasan dari Fraksi Partai Demokrat mengenai dana bantuan untuk Bank Century Rp 6,7 trilyun.</p>
<p>“...kebijakan itu berlaku untuk semua bank dan yang parah antara lain Bank Century.”</p>	<p>Body, (paragraf 10, kal pertama)</p>	<p>Pernyataan yang dilantunkan oleh Boediono ini memberikan gambaran bahwa audit laporan keuangan Bank Century telah diserahkan sepenuhnya kepada BPK.</p>
<p>“PMS bukan dana <i>bail out</i> dan tidak berasal dari APBN”</p>	<p>Terdapat dalam sub judul ‘Hak Angket’, Body (paragraf 13, kal pertama)</p>	<p>Lantunan ini menggambarkan bahwa kebijakan FPJP dan CAR dilakukan bukan hanya untuk menyelamatkan Bank Century saja, namun juga untuk menyelamatkan bank-bank kecil lainnya.</p>
<p>“..LPS merupakan lembaga independen sehingga otoritas pencairan dana yang ada pada lembaga tersebut tidak memerlukan izin DPR.”</p>	<p>Body (paragraf 16 kal pertama)</p>	<p>Pernyataan ini melemahkan isu yang berkembang di masyarakat bahwa dana Rp 6,7 trilyun merupakan dana yang berasal dari APBN.</p> <p>Pernyataan ini menguatkan fakta bahwa dana Rp 6,7 trilyun bukan berasal dari APBN, melainkan dana LPS sehingga tidak perlu ada campur tangan dari DPR.</p>

<p>“Robert Tantular melakukan tidak kriminal karena menipu nasabah mereka melalui Securitas Antha Boga.”</p>	<p>Body (paragraf 17, kal pertama)</p>	<p>Pernyataan ini menggambarkan bahwa pihak yang bersalah dalam kasus Bank Century adalah Robert Tantular dengan perusahaan keuangannya yang bernama Securitas Antha Boga.</p>
<p><b>Keyword</b> (Sebuah kata / atau bisa juga frase yang menjadi inti sikap atau bingkai yang dibuat atas sebuah wacana. <i>Keyword</i> ini sangat mungkin bersifat denotatif karena lebih lugas dalam menyampaikan sikap.)</p> <p>“Hingga saat ini Bank Century dinilai <u>sehat</u> dan tidak terjadi kerugian negara karena tidak diambil dari APBN.”</p> <p>“Kami sendiri <u>tidak takut sama sekali</u> dengan penggunaan hak tersebut karena...”</p> <p>“..isu akan adanya <u>deal-deal</u> dan <u>bargaining politik</u> dengan partai-partai pendukung angket yang kebanyakan memiliki masalah hukum.”</p>	<p>Terdapat dalam sub judul ‘Hak Angket’ Body (paragraf 15, kal pertama)</p> <p>Body (paragraf 19, kal pertama)</p> <p>Body (paragraf 21, kal pertama)</p>	<p>Penggunaan kata <u>sehat</u> dalam lantunan pernyataan ini melemahkan isu yang berkembang bahwa Bank Century merupakan bank yang bermasalah atau lebih dikenal publik sebagai bank yang sakit.</p> <p>Pernyataan ini melemahkan dugaan bahwa ada keterlibatan Partai Demokrat dalam kasus Bank Century ini sekaligus melemahkan anggapan bahwa hak angket ini merupakan sebuah ancaman bagi Partai Demokrat.</p> <p>Pernyataan ini memberikan kesan bahwa politik tukar guling yang digambarkan sebagai <u>deal-deal</u> dan <u>bargaining politik</u> mungkin terjadi dalam proses pengusulan</p>

<p><b>Exemplaar</b> (Perbandingan yang menguatkan bingkai, mengaitkan bingkai dengan contoh)</p> <p>“Instrumen tersebut banyak dilakukan oleh berbagai negara pada masa krisis tahun lalu yang tujuannya membantu bank-bank yang menghadapi kesulitan saat krisis.”</p> <p>“Demokrat tak menginginkan senjata pamungkas DPR seperti angket digunakan sia-sia seperti sebelumnya.”</p> <p>“Sekarang saya tanya balik, Ketua Dewan Pembina PDIP Taufik Kiemas tidak tanda tangan sampai sekarang, masa kami didesak untuk tanda tangan.”</p> <p>“Jika orientasinya untuk mengungkap kebenaran dan transparansi terhadap masyarakat maka pengusul hak angket Century akan tetap solid.”</p>	<p>Body, (paragraf 8, kal pertama)</p> <p>Terdapat dalam sub judul ‘Hak Angket’ Body (paragraf 19, kal pertama)</p> <p>Body (paragraf 20, kal kedua)</p> <p>Terdapat dalam sub judul ‘Penggembosan’ Body (paragraf 23, kal pertama)</p>	<p>hak angket ini.</p> <p>Pernyataan ini menggambarkan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terkait dengan FPJP dan CAR lumrah dan wajar dilakukan oleh negara-negara lain ketika menghadapi krisis keuangan.</p> <p>Pernyataan ini merupakan peringatan kepada publik bahwa hak angket tidak selalu bermuara terhadap tujuan utama yang telah dirumuskan sebelumnya, namun juga memiliki kemungkinan untuk gagal.</p> <p>Pernyataan ini menonjolkan kesan bahwa Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang selama ini bertindak sebagai inisiator hak angket tidak memiliki satu suara dalam proses perjuangan hak angket ini ke tahap berikutnya.</p> <p>Kesan yang tertangkap dalam pernyataan ini adalah terdapat multi orientasi yang mewakili banyak kepentingan dalam proses pengusulan hak angket kasus Bank Century ini.</p>
--	---	---

<p>“...hak angket yang diusulkan anggota DPR periode sebelumnya kurang beruntung dan penyelesaiannya tidak jelas karena pengusulnya tidak solid.”</p>	<p>Body (paragraf 25, kal pertama)</p>	<p>Pernyataan ini mengesankan adanya keraguan dalam upaya penyelesaian kasus Bank Century melalui hak angket, terlebih apabila dihubungkan dengan pernyataan Ruhut yang mengesankan bahwa inisiator hak angket sendiri tidak memiliki satu suara dalam mendukung pengusulan hak angket ini.</p>
<p><b>Depiction (to picture in words; describe)</b> (penggambaran oleh kata-kata, menguraikan, pelukisan melalui kata-kata sehingga memiliki kesan tertentu)</p> <p>Mengenai kebijakan fasilitas pembiayaan jangka pendek dan rasio kecukupan modal (CAR) saat itu, Boediono mengatakan kebijakan fasilitas pembiayaan jangka pendek <i>menyantol</i> atau terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dikeluarkan Oktober 2008 untuk menanggapi keadaan darurat.</p> <p>“Media dan masyarakat harus bisa berpikir jernih dalam kasus ini. Pemerintah saat ini butuh dukungan publik untuk menyukseskan program 100 hari.”</p>	<p>Body (paragraf 7, kal pertama)</p> <p>Terdapat dalam sub judul ‘Hak Angket’ Body (paragraf 18 , kal pertama)</p>	<p>Gambaran yang diberikan oleh Boediono terkait dengan pengambilan kebijakan FPJP dan CAR ini dikuatkan dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sehingga penjabaran alasan ini terkesan rasional dan masuk akal.</p> <p>Lantunan ini menggambarkan bahwa terdapat kesimpang siuran pada pemberitaan di media mengenai kasus Bank Century ini, sehingga masyarakat ikut terjebak dalam ketidakjelasan kasus ini.</p>
<p><b>Metafora</b> (Perumpamaan; pengandaian; kiasan)</p>		



<p>“...tak menginginkan <u>senjata pamungkas</u> DPR...”</p>	<p>Body (paragraf 13, kal pertama)</p>	<p>Penggunaan kata ‘senjata pamungkas’ dalam lantunan ini memberikan kesan bahwa adanya perlawanan sehingga harus sampai menggunakan senjata untuk menghadapinya, hak angket dianggap sebagai alat terakhir untuk melakukan perlawanan, padahal masih terdapat hak lain seperti hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh DPR.</p>
<p><b>SUB FRAME SALIANSI</b></p> <p>Jurnal Nasional berulang kali melakukan penekanan gagasan yang mendukung keputusan Fraksi Partai Demokrat untuk menolak penggunaan hak angket sebagai sarana penyelesaian kasus Bank Century, selain itu gagasan yang menyebutkan adanya kemungkinan dari hak angket untuk gagal juga ditonjolkan dalam teks berita berjudul “Angket Century Selesai Pekan Depan” ini.</p>		

**MEDIA FRAME**

<p><b>SUB FRAME SELEKSI</b></p>	<p><b>SUB FRAME SALIANSI</b></p>
<p>Jurnal Nasional mendiskripsikan proses pengusulan hak angket sebagai suatu hal yang berlebihan dalam penanganan terhadap kasus Bank Century . Hal ini dapat terlihat dari seleksi Jurnal Nasional dalam teks berita berjudul “Audit Century Selesai Pekan Depan”, Jurnal Nasional melakukan <i>included</i> terhadap pernyataan sikap Boediono untuk menguatkan alasan rasional mengenai kebijakan Bank Indonesia serta opini dari Fraksi Partai</p>	<p>Jurnal Nasional berulang kali melakukan penekanan gagasan yang mendukung keputusan Fraksi Partai Demokrat untuk menolak penggunaan hak angket sebagai sarana penyelesaian kasus Bank Century, selain itu gagasan yang menyebutkan adanya kemungkinan dari hak angket untuk gagal juga ditonjolkan dalam teks berita berjudul “Angket Century Selesai Pekan Depan” ini.</p>

Demokrat yang diberikan ruang cukup besar (10 paragraf) untuk menyampaikan gagasannya mengenai penolakan fraksi tersebut terhadap pengusulan hak angket oleh DPR.

#### **FRAME JURNAL NASIONAL**

Jurnal Nasional mendiskripsikan proses pengusulan hak angket sebagai sesuatu yang tidak berguna, karena tidak memiliki arah dasar dan tujuan yang kuat untuk dijadikan sebagai sarana penyelesaian kasus Bank Century. Deskripsi ini menguatkan alasan Fraksi Partai Demokrat untuk belum menandatangani berkas pengusulan hak angket karena gagasan-gagasannya dapat terakomodir dengan baik melalui teks berita berjudul “Angket Century Selesai Pekan Depan” ini.

## ANALISIS BERITA 6

**Judul Berita** : Presiden Ingin Kasus Century Dibuka  
**Rubrik** : Halaman Muka  
**Edisi** : 23 November 2009  
**Penulis** : Yanuar Jatnika

## ANALISIS SELEKSI

STRUKTUR SKRIPTURAL	STRUKTUR TEMATIS	STRUKTUR SINTAKSIS	FUNGSI
<p><b>Obyek Wacana :</b>                      Silaturahmi Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dengan pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Negara.</p>	<p><b>Jenis Wacana :</b>                      Pernyataan sikap Presiden SBY terkait dengan kasus Bank Century.</p> <p>Pernyataan sikap dari Presiden SBY terkait dengan kasus hukum yang menimpa petinggi KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit S Rianto</p>	<p>Lead, sampai dengan paragraf 10.</p> <p>Terdapat dalam sub judul “Kasus Bibit dan Chandra” body, paragraf 11 – 20.</p>	<p>Sebagai gagasan utama yang ingin disampaikan dalam teks berita ini karena penempatannya terdapat dalam paragraf awal (<i>lead</i> – paragraf 10)</p> <p>Sebagai informasi tambahan yang berasal dari obyek wacana. Informasi tambahan karena penempatannya pada sub judul pertama “Kasus Bibit dan Chandra”, dan hanya terdiri dari 9 paragraf, lebih sedikit 1 paragraf daripada informasi pada teks berita judul utama.</p>
<p><b>Pelibat Wacana :</b>                       Presiden Susilo Bambang</p>		<p>tersebar secara merata dari</p>	<p>Menyatakan sikapnya terhadap</p>

<p>Yudhoyono</p> <p>Kasus dana talangan (<i>bail out</i>) Bank Century</p> <p>Dewan Perwakilan Rakyat</p> <p>Tim Sukses Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009.</p>		<p>lead sampai dengan closure</p> <p>Lead, dan Body (paragraf 2, 4, 5, 7, 8, dan 10)</p> <p>Lead, dan Body (paragraf 10)</p> <p>Body (paragraf 3 dan 4)</p>	<p>kasus dana talangan Bank Century serta membantah rumor yang menyebutkan bahwa tim suksesnya menerima dana yang berasal dari dana talangan Bank Century (<i>lead</i> sampai dengan paragraf 10) selain itu beliau juga memberikan penjelasan mengenai penyelesaian kasus hukum yang menimpa petinggi KPK Chandra M Hamzah dan Bibit S Rianto.(paragraf 11 - 20)</p> <p>Kasus yang saat ini sedang menjadi pemberitaan di berbagai media, menjadi topik utama dalam teks berita ini, terbukti dengan penyebarannya secara merata dari <i>lead</i> sampai dengan paragraf 10.</p> <p>Mempertanyakan kepada pemerintah mengenai kejelasan dari kasus dana talangan Bank Century melalui pengusulan hak angket.</p> <p>Isu yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa tim sukses ini menerima dana talangan Bank Century dalam teks berita ini, isu tersebut dibantah oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.</p>
--	--	---	--

<p>Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)</p>		<p>Body (paragraf 6)</p>	<p>Pencantuman kedua lembaga keuangan ini dalam lantunan presiden memberikan kesan bahwa pemerintah bersikap serius terhadap penyelesaian kasus Bank Century ini.</p>
<p>Bank Century</p>		<p>Body (paragraf 6)</p>	<p>Keberadaan masyarakat atau rakyat dalam teks berita ini sebagai penguat isu bahwa terdapat dugaan keterlibatan pemerintah dalam kasus Bank Century ini.</p>
<p>Rakyat Indonesia, masyarakat</p>		<p>Lead, dan Body (paragraf 6, 7)</p>	<p>Paradigma yang digunakan oleh pemerintah ketika memandang permasalahan kasus Bank Century.</p>
<p>Krisis keuangan global</p>		<p>Body (paragraf 7)</p>	<p>Sebagai sarana lain untuk mengungkap arah aliran dana talangan Bank Century.</p>
<p>Laporan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)</p>		<p>Body (paragraf 8)</p>	<p>Sarana yang diusulkan oleh beberapa anggota DPR dalam penyelesaian kasus Bank Century ini.</p>
<p>Hak angket dana talangan Bank Century</p>		<p>Body (paragraf 10)</p>	<p>Merupakan informasi tambahan, perpanjangan informasi yang berawal dari <i>bridging</i> (dicantumkan di bawah judul utama)</p>
<p>Kasus Bibit dan Chandra</p>		<p>Terdapat dalam sub judul “Kasus Bibit dan Chandra” Body dan closure (paragraf 11, 14, 16, 18, 19,20 )</p>	

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Body (paragraf 12 dan 13 )	Sebagai sebuah lembaga pemberantasan korupsi yang 2 wakil ketuanya mengalami kasus hukum.
Pemerintah	Body (paragraf 13)	Sebagai penguat wacana 100 hari pemerintahan bebas korupsi.
Kepolisian Kejaksaan Agung Pengacara	Body (paragraf 12 dan 14) Body (paragraf 12 dan 14 ) Body (paragraf 14 )	Beberapa sarana penegakan hukum yang terdapat di Indonesia.
Amnesti dan Abolisi	Body (paragraf 15)	Salah satu kewenang presiden yang dapat dilakukan dengan pertimbangan dari DPR
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	Body (paragraf 15)	Memberikan pertimbangan kepada presiden untuk melakukan kewenangan pemberian amnesti dan abolisi.
Grasi dan Rehabilitasi	Body (paragraf 15)	Salah satu kewenangan presiden yang dapat dilakukan dengan pertimbangan dari MA.
Mahkamah Agung (MA)	Body (paragraf 15)	Memberikan pertimbangan kepada presiden untuk melakukan kewenangan pemberian grasi dan rehabilitas.

<p>Kapolri Bambang Hendarso Danuri          Jaksa Agung Hendarman Supanji          Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahmud MD          Ketua Mahkamah Agung (MA), Harifin A Tumpa</p> <p>Rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Chandra – Bibit atau Tim Delapan</p>		<p>Body (paragraf 18)</p> <p>Body (paragraf 18)</p> <p>Body (paragraf 19)</p> <p>Body (paragraf 19)</p> <p>Body (paragraf 20)</p>	<p>Ke empat pimpinan lembaga penegakkan hukum Indonesia ini diundang oleh presiden dalam upaya penyelesaian kasus hukum Bibit dan Chandra</p> <p>Hasil dari Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Chandra – Bibit yang akan dilaporkan kepada presiden.</p>
<p><b>Pelantun Wacana :</b>          Presiden Susilo Bambang Yudhoyono</p>	<p>“Saya juga ingin tahu aliran dana talangan ke mana saja, buka semua apa adanya. Sekali lagi untuk mengetahui <i>proper</i> atau tidak. Apa ada yang menyimpang atau semua sesuai dengan yang ditentukan. Buka semua,”</p> <p>“Saya harus katakan malam ini, tentu sesuatu yang tercela seorang Presiden mendapatkan dana atau meminta dana atau berharap ada dana dari sumber-sumber yang tidak semestinya. Dengan demikian itu cacat bagi saya kalau itu sebagaimana yang beredar</p>	<p>Body (paragraf 2 kal kedua)</p> <p>Body (paragraf 5 kal pertama)</p>	<p>Pernyataan ini memberikan kesan bahwa kepala negara <i>concern</i> terhadap penyelesaian kasus Bank Century.</p> <p>Penjelasan presiden menggambarkan bahwa ia sendiri secara pribadi memandang, jika seorang presiden mendapatkan dana dari sumber-sumber yang tidak semestinya, hal itu merupakan suatu hal yang sangat tidak pantas. Hal ini kemudian melemahkan rumor yang</p>

	<p>sekarang ini dikait-kaitkan. Saya ingin dibuka seluruhnya,”</p> <p>“mempersilakan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bank Century untuk membuka semua catatan rekeningnya.”</p> <p>“Saya tidak ingin ada halangan psikologis antara rakyat dan kepala negara dan keadilan tegak di negeri ini, sambil mencari siapa yang tidak <i>proper</i> di dalam menjalankan tugasnya”</p> <p>“saya kalau itu ada yang diklarifikasi, dijelaskan, dan dipertanggungjawabkan, yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan. Supaya jelas,”</p> <p>“mempersilakan DPR untuk</p>	<p>Body (paragraf 6 kal pertama)</p> <p>Body (paragraf 6 kal kedua)</p> <p>Body (paragraf 9 kal pertama)</p> <p>Body (paragraf 10 kal</p>	<p>beredar mengenai keterkaitan dirinya dan kasus Bank Century.</p> <p>Pernyataan ini merupakan wujud kongkrit dari keinginan beliau untuk membuka kasus Bank Century ini, maka pernyataan ini menguatkan niat presiden tersebut.</p> <p>Lantunan ini berfungsi sebagai penjaga citra dari seorang presiden, melalui pernyataan ini menggambarkan betapa presiden sangat memperhatikan hubungan beliau dengan rakyatnya sehingga terus berupaya agar tercipta hubungan yang positif antara presiden dengan rakyatnya, karena selama ini permasalahan Bank Century cukup menimbulkan wacana penurunan kinerja pemerintah di masyarakat.</p> <p>Pernyataan ini menguatkan keinginan presiden untuk membuka permasalahan kasus Bank Century.</p> <p>Pernyataan ini memberikan kesan</p>
--	--	---	--



	<p>menggunakan hak angket dana talangan Bank Century jika itu merupakan jalan terbaik agar masalah Bank Century menjadi terang benderang.”</p> <p>“Mudah-mudahan keputusan yang saya ambil besok merupakan putusan yang tepat, walaupun saya sadari pasti ada kontroversi, ada yang pro dan kontra, tapi saya memang harus bersikap sesuai dengan kewenangannya saya,”</p> <p>“tidak ada pemikiran sedikit pun dalam dirinya untuk melemahkan institusi pemberantasan korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan sebagainya.”</p> <p>“Pemberantasan korupsi merupakan salah satu prioritas pemerintahan dalam 100 hari, jadi</p>	<p>pertama)</p> <p>Terdapat dalam sub judul “Kasus Bibit dan Chandra” body (paragraf 11 kal kedua)</p> <p>Body (paragraf 12 kal pertama)</p> <p>Body (paragraf 13 kal pertama)</p>	<p>bahwa presiden akan mendukung adanya hak angket di DPR namun penggunaan kata ‘jika’ memberikan kesan bahwa terdapat syarat yang harus dipenuhi bahwa hak angket itu mampu menjawab pokok permasalahan yang terjadi. Penggunaan kata ‘jika’ menguatkan kesan bahwa sebenarnya presiden belum seratus persen merestui DPR untuk menggunakan hak angket.</p> <p>Pernyataan ini terkait dengan keputusan presiden dalam menanggapi rekomendasi tim delapan untuk menyelesaikan kasus hukum Bibit dan Chandra. Kesan</p> <p>Pernyataan ini melemahkan adanya dugaan pelemahan lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK.</p> <p>Pernyataan ini melemahkan wacana adanya upaya dari pemerintah untuk melemahkan fungsi KPK sebagai</p>
--	---	--	---

	<p>tidak bisa dimengerti kalau ada yang berpendapat Kepala Negara bermaksud melemahkan insitusi tersebut”</p> <p>“Saya tidak bisa memasuki batas kewenangan tersebut walaupun saya punya posisi sebagai Presiden”</p> <p>“Dalam ranah hukum, sesuai dengan perundang-undangan, kewenangan Presiden hanya dalam memberikan amnesti dan abolisi setelah berkonsultasi dengan DPR serta grasi dan rehabilitasi setelah berkonsultasi dengan Mahkamah Agung. Di luar itu, bukan kewenangan saya, meski saya tidak boleh abstain bersikap,”</p> <p>“penyelesaian kasus Bibit dan Chandra, harus dilakukan dengan menghasilkan kebenaran dan keadilan yang hakiki dan mengandung koreksi dan perbaikan di masa mendatang.”</p> <p>“keputusan yang diambil dilakukan secara mendalam dan komprehensif, serta dapat</p>	<p>Body (paragraf 14 kal kedua)</p> <p>Body (paragraf 15 kal pertama )</p> <p>Body (paragraf 16 kal pertama)</p> <p>Body (paragraf 17 kal pertama)</p>	<p>lembaga pemberantasan korupsi.</p> <p>Pernyataan ini menguatkan sikap bahwa presiden memahami dan mengerti batas-batas dan kewenangannya dalam bertindak.</p> <p>Pernyataan ini merupakan penguat keterangan di atas, namun penyampaiannya lebih <i>mendetail</i> .</p> <p>Pernyataan ini menguatkan sikap presiden bahwa ia serius dalam upaya penyelesaian kasus hukum yang menimpa Candra dan Bibit.</p> <p>Sikap presiden ini menggambarkan bahwa keputusan yang diambil merupakan suatu keputusan yang</p>
--	---	--	--

Wartawan	<p>menghilangkan disharmonisasi antara lembaga pemberantasan korupsi.”</p> <p>“kasus aliran dana talangan (<i>bail out</i>) Bank Century yang kini dipermasalahkan DPR dan menjadi isu hangat di tengah-tengah masyarakat”</p>	Lead (kalimat pertama)	<p>adil dan tidak merugikan pihak manapun.</p> <p>Penggambaran kasus Bank Century oleh wartawan ini memberikan kesan bahwa kasus tersebut sebenarnya bukanlah masalah yang cukup besar.</p>
----------	--	------------------------	---

#### SUB FRAME SELEKSI

Jurnal Nasional menempatkan kasus Bank Century sebagai topik utama dan penting dalam teks berita ini, selain itu Jurnal Nasional memberikan ruang pertama kepada Presiden SBY untuk menjelaskan permasalahan kasus Bank Century dengan menempatkan gagasan tersebut terlebih dahulu penjelasan Presiden SBY mengenai kasus hukum yang menimpa petinggi KPK Chandra M Hamzah dan Bibit S Rianto.

#### ANALISIS SALIANSI

STRUKTUR RETORIS	STRUKTUR SINTAKSIS	FUNGSI
<p><b>Catchphrases</b> (frasa yang menarik dan menonjol dari sebuah wacana)</p> <p>“Sekali lagi untuk mengetahui <i>proper</i> atau tidak. Apa ada yang menyimpang atau semua sesuai dengan yang ditentukan. Buka semua,”</p> <p>“...tentu sesuatu yang tercela seorang Presiden mendapatkan dana atau meminta dana atau</p>	<p>Body (paragraf 2, kal 3)</p> <p>Body (paragraf 5, kal pertama )</p>	<p>Menegaskan kembali keinginan dari presiden untuk membuka seluruh data-data aliran dana talangan Bank Century.</p> <p>Melemahkan rumor yang berkembang di masyarakat mengenai keterkaitan presiden</p>

<p>berharap ada dana dari sumber-sumber yang tidak semestinya.”</p>		<p>dengan dana talangan Bank Century yang diduga dipergunakan untuk kampanye presiden dan partainya.</p>
<p><b>Keyword</b> (Sebuah kata / atau bisa juga frase yang menjadi inti sikap atau bingkai yang dibuat atas sebuah wacana. <i>Keyword</i> ini sangat mungkin bersifat denotatif karena lebih lugas dalam menyampaikan sikap.)</p> <p>“kasus aliran dana talangan (<i>bail out</i>) Bank Century yang kini <u>dipermasalahan</u> DPR”</p>	<p>Lead (kalimat pertama )</p>	<p>Penggunaan kata ‘dipermasalahan’ memiliki arti bahwa kasus aliran dana talangan tersebut bukanlah suatu masalah namun sengaja dibuat untuk bermasalah. Terdapat pemikiran bahwa kasus aliran dana talangan Bank Century bukanlah sebuah masalah.</p>
<p><b>Exemplaar</b> (Perbandingan yang menguatkan bingkai, mengaitkan bingkai dengan contoh)</p> <p>“mempersilakan DPR untuk menggunakan hak angket dana talangan Bank Century jika itu merupakan jalan terbaik agar masalah Bank Century menjadi terang benderang.”</p>	<p>Body (paragraf 10, kal pertama )</p>	<p>Bingkai yang ditonjolkan dalam kalimat ini adalah <i>permission with condition</i> yang diketahui melalui penggunaan kata ‘jika’. Artinya hak angket belum disetujui seratus persen oleh presiden untuk digunakan dalam upaya penyelesaian kasus Bank Century, namun ada kesan bahwa presiden telah menyetujui penggunaan hak angket tersebut.</p>

<p><b>Depiction (to picture in words; describe)</b> (penggambaran oleh kata-kata, menguraikan, pelukisan melalui kata-kata sehingga memiliki kesan tertentu)</p> <p>“tentu sesuatu yang tercela seorang Presiden mendapatkan dana atau meminta dana atau berharap ada dana dari sumber-sumber yang tidak semestinya. Dengan demikian itu cacat bagi saya kalau itu sebagaimana yang beredar sekarang ini dikait-kaitkan. Saya ingin dibuka seluruhnya,”</p> <p>“Saya tidak ingin ada halangan psikologis antara rakyat dan kepala negara dan keadilan tegak di negeri ini, sambil mencari siapa yang tidak <i>proper</i> di dalam menjalankan tugasnya”</p> <p>” Bagi saya kalau itu ada yang diklarifikasi, dijelaskan, dan dipertanggungjawabkan, yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan. Supaya jelas”</p> <p>“harus dilakukan dengan menghasilkan kebenaran dan keadilan yang hakiki dan mengandung koreksi dan perbaikan di masa mendatang.”</p>	<p>Body (paragraf 5, kal pertama)</p> <p>Body (paragraf 6, kal kedua)</p> <p>Body (paragraf 9, kal pertama)</p> <p>Terdapat dalam sub judul “Kasus Bibit dan Chandra” Body (paragraf 16, kal pertama)</p>	<p>Penggambaran sikap presiden terhadap rumor yang berkembang tentang dirinya ini menegaskan bahwa hal itu sama sekali tidak benar.</p> <p>Menegaskan keinginan kepala negara untuk menuntaskan kasus Bank Century ini, sekaligus memperbaiki hubungannya dengan rakyat yang memburuk seiring berkembangnya rumor yang mengaitkan dirinya dengan kasus Bank Century.</p> <p>Penggambaran mengenai kasus Bank Century ini, menegaskan kembali sikap presiden yang ingin agar semua masalah kasus Bank Century menjadi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait. Hal ini memberikan kesan atas sikap presiden yang tegas dalam bertindak.</p> <p>Kesan yang tertangkap dari pernyataan ini adalah sikap kepala negara yang konsisten akan proses penegakkan hukum di Indonesia.</p>
--	---	---

<p>“agar keputusan yang diambil dilakukan secara mendalam dan komprehensif, serta dapat menghilangkan disharmonisasi antara lembaga pemberantasan korupsi.”</p>	<p>Body (paragraf 17, kal pertama)</p>	<p>Lanjutan ini merupakan penggambaran atas keputusan presiden dalam menanggapi kasus hukum Bibit dan Chandra yang memberikan kesan bahwa keputusan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sehingga tidak asal menyelesaikan kasus, kepala negara melakukan pertimbangan yang matang dalam proses pengambilan keputusan.</p>
<p><b>Metafora</b> (Perumpamaan; pengandaian; kiasan)</p> <p>“...kasus yang kini menjadi <u>isu hangat</u> di tengah-tengah masyarakat”</p>	<p>Lead (kalimat pertama)</p>	<p>Kata ‘isu’ yang digunakan mempunyai arti suatu kabar yang tidak dijamin kebenarannya hal ini menguatkan bahwa dugaan keterkaitan Presiden dan Partai Demokrat dengan kasus Bank Century sama sekali tidak benar. Kata ‘hangat’ yang ditambahkan di belakang kata ‘isu’ memperkuat kesan bahwa dugaan ini sedang ramai dibicarakan di masyarakat.</p>
<p><b>Visual Images</b></p> <p>Foto Presiden SBY sedang memberikan salam dengan mengatupkan kedua tangannya di depan dada kepada para pimpinan media massa Indonesia, diikuti dengan berbagai macam ekspresi dari para pimpinan media massa tersebut.</p>	<p>Halaman Muka</p>	<p>Foto ini menggambarkan bahwa SBY sangat menghormati dan menghargai para pimpinan media massa yang diundang hadir ke Istana Negara, maka para pimpinan media masa seharusnya juga menghormati Presiden SBY dengan</p>

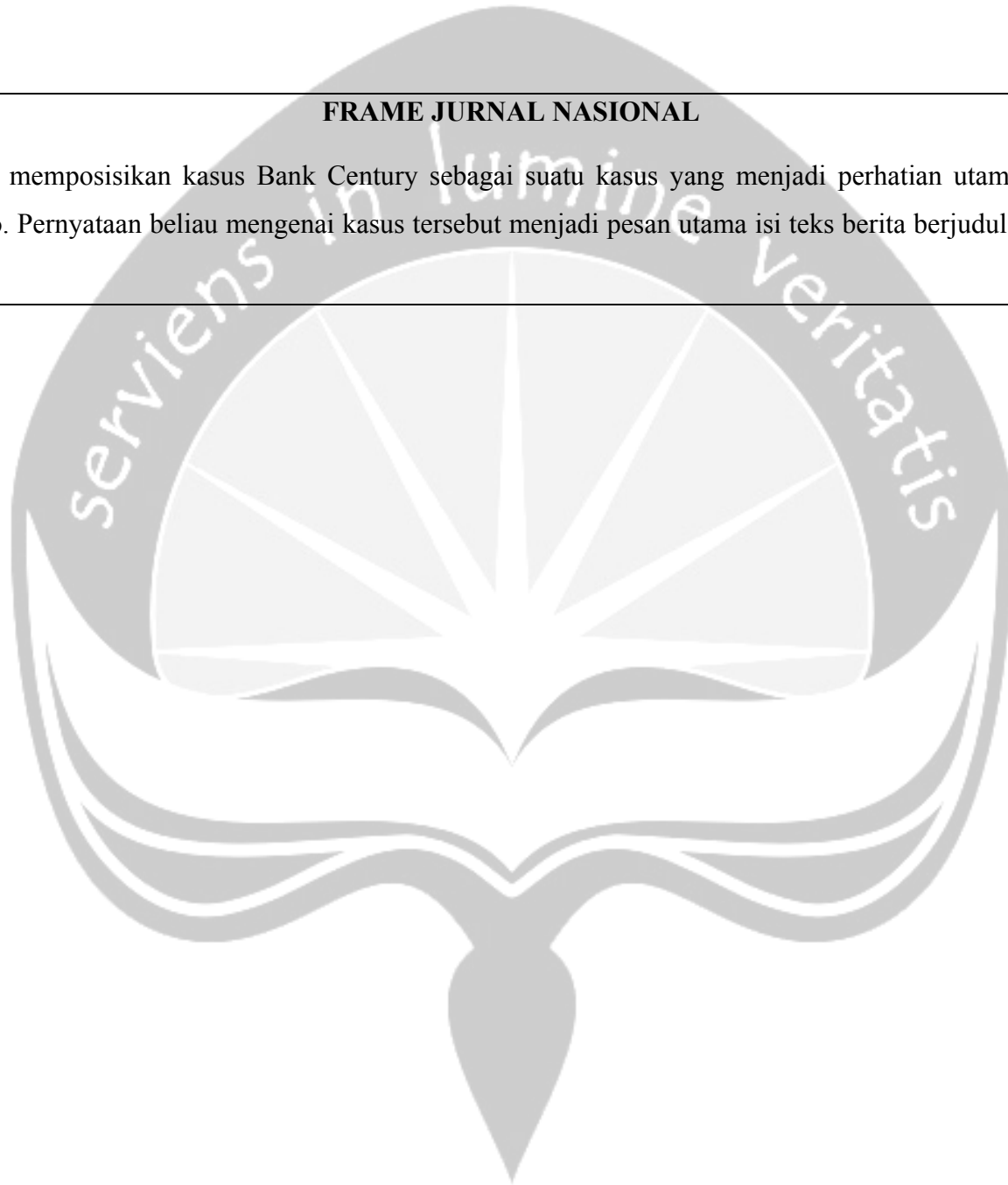
	menampilkan pemberitaan yang positif seputar kinerja pemerintah.
<p><b>SUB FRAME SALIANSI</b></p> <p>Gagasan – gagasan yang ditawarkan dalam teks berita ini merupakan pernyataan sikap dari presiden SBY mengenai dua kasus yang saat ini menjadi topik utama dalam pemberitaan media massa. Namun, Jurnal Nasional cenderung melakukan penonjolan terhadap gagasan Presiden SBY mengenai kasus Bank Century, hal ini bisa tampak melalui gagasan beliau yang cenderung ditampilkan secara lebih merata dalam teks berita judul utama, selain itu penggambaran mengenai kasus Century oleh Presiden SBY juga ditampilkan lebih ‘berisi’ daripada penggambaran beliau mengenai kasus Bibit dan Chandra.</p>	

**MEDIA FRAME**

<b>SUB FRAME SELEKSI</b>	<b>SUB FRAME SALIANSI</b>
<p>Jurnal Nasional menempatkan kasus Bank Century sebagai topik utama dan penting dalam teks berita ini, selain itu Jurnal Nasional memberikan ruang pertama kepada Presiden SBY untuk menjelaskan permasalahan kasus Bank Century dengan menempatkan gagasan tersebut terlebih dahulu penjelasan Presiden SBY mengenai kasus hukum yang menimpa petinggi KPK Chandra M Hamzah dan Bibit S Rianto.</p>	<p>Gagasan – gagasan yang ditawarkan dalam teks berita ini merupakan pernyataan sikap dari presiden SBY mengenai dua kasus yang saat ini menjadi topik utama dalam pemberitaan media massa. Namun, Jurnal Nasional cenderung melakukan penonjolan terhadap gagasan Presiden SBY mengenai kasus Bank Century, hal ini bisa tampak melalui gagasan beliau yang cenderung ditampilkan secara lebih merata dalam teks berita judul utama, selain itu penggambaran mengenai kasus Century oleh Presiden SBY juga ditampilkan lebih ‘berisi’ daripada penggambaran beliau mengenai kasus Bibit dan Chandra.</p>

### **FRAME JURNAL NASIONAL**

Jurnal Nasional memposisikan kasus Bank Century sebagai suatu kasus yang menjadi perhatian utama dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pernyataan beliau mengenai kasus tersebut menjadi pesan utama isi teks berita berjudul “Presiden Ingin Kasus Century Dibuka” ini.





## ANALISIS BERITA 7

**Judul Berita** : SBY Sambut Angket Century  
**Rubrik** : Halaman Depan : Fokus Hari Ini  
**Edisi** : 24 November 2009  
**Penulis** : Yanuar Jatmika/Friederich Batari /Rhama Deny

## ANALISIS SELEKSI

STRUKTUR SKRIPTURAL	STRUKTUR TEMATIS	STRUKTUR SINTAKSIS	FUNGSI
<b>Obyek Wacana :</b> Pidato Presiden SBY di Istana Negara untuk menanggapi rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Bibit dan Chandra, sekaligus pernyataan sikap terkit dengan kasus Bank Century	<b>Jenis Wacana :</b> Pernyataan sikap Presiden SBY terkait dengan proses pengusulan hak angket kasus Bank Century oleh DPR. (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono)  Pernyataan sikap dari Fraksi Partai Demokrat terkait dengan proses pengusulan hak angket kasus Bank Century. (Anas Urbaningrum) Pernyataan dukungan terhadap hak angket kasus Bank Century dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. (Marwan Jafar) Pernyataan sikap dari Ketua DPR terkait dengan laporan hasil audit	Lead, sampai dengan paragraf 7.  Body, (paragraf 8 - 11)  Body, (paragraf 12 - 14)  Body, (paragraf 15)	Memberikan gagasan mengenai informasi utama yang ingin disampaikan dalam teks berita ini.  Merupakan informasi tambahan yang menguatkan informasi utama.

	Bank Century dari BPK. (Marzuki Alie) Pernyataan sikap dari Wakil Ketua DPR terkait dengan laporan hasil audit Bank Century dari BPK. (Pramono Anung dan Priyo Budi Santoso)	Body, (paragraf 16-18)	
<b>Pelibat Wacana :</b>			
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono		Lead, sampai dengan paragraf 7	Memberikan pernyataan sikap mengenai pengusulan hak angket Century setelah diteruskannya laporan hasil audit BPK terhadap Bank Century.
Anggota DPR		Lead,body (paragraf 8)	Mengusulkan hak angket sebagai salah satu upaya penyelesaian kasus Bank Century.
Pemerintah		Body, (paragraf 3)	Sebagai pihak yang juga turut berupaya untuk menyelesaikan kasus Bank Century melalui pengusulan hak angket.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)		Body, (paragraf 3, 9, 12, 15, 16,17), Closure (paragraf 18)	Telah menyerahkan laporan hasil audit Bank Century kepada DPR maupun pemerintah.
DPR		Lead, Body (paragraf 8, 15, 16, 17)	Sebagai sebuah lembaga penampung aspirasi rakyat yang

<p>Pengelola Bank Century</p>		<p>Body, (paragraf 4 )</p>	<p>juga berupaya menyelesaikan persoalan Bank Century.</p> <p>Dalam teks berita ini pengelola Bank Century disebutkan sebagai pihak yang bersalah atas kasus Bank Century dan segera akan diproses secara hukum.</p>
<p>Jaksa Agung Kapolri</p>		<p>Body, (paragraf 4 ) Body, (paragraf 4 )</p>	<p>Kedua pimpinan lembaga penegakan hukum di Indonesia ini mendapatkan instruksi dari presiden untuk segera melakukan proses hukum kepada pengelola Bank Century.</p>
<p>Dana kampanye Partai Demokrat dan Calon Presiden SBY</p>		<p>Body, (paragraf 6)</p>	<p>Melalui rumor yang beredar, sumber ini menerima dana yang berasal dari dana talangan Bank Century.</p>
<p>Fraksi Partai Demokrat</p>		<p>Body, (paragraf 8, 9, 10)</p>	<p>Salah satu fraksi yang sebelumnya menyatakan bahwa tidak akan mendukung pengusulan hak angket, namun ketika laporan hasil audit BPK sudah selesai dan ditemukan kejanggalan maka fraksi ini pun kemudian mendukung pengusulan hak angket.</p>
<p>Laporan Hasil Pemeriksaan</p>		<p>Body, (paragraf 3, 9,12, 15,</p>	<p>Hal yang menjadi dasar beberapa</p>

Investigatif Kasus Bank Century dari BPK.	16, 17), Closure (paragraf 18)	pihak (Presiden SBY, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa) untuk akhirnya menyetujui pengusulan hak angket oleh DPR.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum	Body, (paragraf 9, 10, 11)	Memberikan pernyataan terkait dengan perubahan sikap Fraksi Partai Demokrat terhadap pengusulan hak angket kasus Bank Century.
Seluruh anggota F PD	Body, (paragraf 10 )	Mendapat instruksi dari Ketua Fraksi Partai Demokrat untuk menyetujui pengusulan hak angket kasus Bank Century.
Partai Demokrat	Body, (paragraf 6, 11)	Sebagai salah satu pihak yang diduga memperoleh dana talangan Bank Century.
Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa, Marwan Jafar	Body, (paragraf 12 - 14)	Menjelaskan alasan dari F PKB untuk mendukung pengusulan hak angket kasus Bank Century.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Body, (paragraf 12, 13)	Salah satu fraksi yang mendukung pengusulan hak angket.
PPATK	Body, (paragraf 13)	Salah satu lembaga keuangan yang mengetahui arah aliran dana talangan Bank Century.

<p>Ketua DPR Marzuki Alie</p> <p>Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau Komisi XI</p> <p>Wakil Ketua DPR Pramono Anung</p> <p>Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso</p>		<p>Body, (paragraf 15)</p> <p>Body, (paragraf 15 )</p> <p>Body, (paragraf 16)</p> <p>Body, (paragraf 17), Closure (paragraf 18)</p>	<p>Memberikan penjelasan terkait dengan laporan hasil audit BPK terhadap Bank Century.</p> <p>Sebuah lembaga dimana laporan hasil audit BPK terhadap Bank Century akan diserahkan kepada lembaga tersebut.</p> <p>Memberikan penjelasan mengenai laporan hasil audit BPK terhadap Bank Century.</p> <p>Memberikan penjelasan mengenai laporan hasil audit BPK terhadap Bank Century, serta memperkirakan nasib hak angket.</p>
<p><b>Pelantun Wacana :</b></p> <p>Presiden Susilo Bambang Yudhoyono</p>	<p>“Tujuannya jelas, yakni agar perkara ini mendapatkan kejelasan serta sekaligus untuk mengetahui apakah ada tindakan-tindakan yang keliru dan tidak tepat”</p> <p>“pemerintah akan melakukan</p>	<p>Body, (paragraf 2, kal pertama)</p> <p>Body, (paragraf 3, kal</p>	<p>Pernyataan ini menyatakan tujuan dari penggunaan hak angket kasus Bank Century. Memberikan kesan bahwa Presiden benar-benar memahami kasus Bank Century, sehingga mempunyai dasar dalam pengambilan keputusan untuk mendukung penggunaan hak angket kasus Bank Century oleh DPR.</p> <p>Pernyataan ini memberikan kesan</p>

	<p>sejumlah langkah dan tindakan internal berangkat dari hasil dan temuan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah diserahkan ke DPR dan Presiden kemarin.”</p> <p>“Saya telah menginstruksikan Jaksa Agung dan Kapolri untuk melaksanakan tugas penting ini”</p> <p>“ingin mengetahui apakah penyertaan modal sementara Rp6,7 triliun itu ada yang “bocor” atau tidak sesuai dengan peruntukannya”</p> <p>“Fitnah yang sungguh kejam dan sangat menyakitkan,”</p>	<p>pertama)</p> <p>Body, (paragraf 4, kal kedua)</p> <p>Body, (paragraf 5, kal pertama)</p> <p>Body, (paragraf 6, kal kedua)</p>	<p>bahwa pemerintah juga memiliki upaya untuk menyelesaikan atau mengungkap permasalahan Bank Century tersebut.</p> <p>Pernyataan ini kembali menegaskan sikap pemerintah yang segera bertindak secara nyata dengan memberikan instruksi kepada pimpinan dua lembaga penegakan hukum di Indonesia.</p> <p>Pernyataan ini menguatkan sikap pemerintah yang ingin mengungkap permasalahan Bank Century tersebut sekaligus melemahkan rumor yang beredar mengenai keterkaitan Presiden SBY dan Partai Demokrat dalam kasus Bank Century.</p> <p>Lantunan yang berasal dari Presiden SBY ini kembali menguatkan kesan bahwa dugaan keterkaitan Presiden SBY dan Partai Demokrat dalam kasus Bank Century memang hanyalah kabar burung semata dan hal itu sama sekali tidak benar. Lantunan ini</p>
--	---	--	--

<p>Anas Urbaningrum</p>	<p>“masalah Bank Century diselesaikan dengan baik, dalam koridor konstitusi, hukum dan perundang-undangan yang berlaku, seraya memerhatikan dan mendengarkan aspirasi dan pendapat umum.”</p> <p>“Kami sudah mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Kasus Bank Century dari BPK. Kesimpulannya ditemukan banyak kekurangan, kelemahan dan kesalahan penerapan standar aturan penanganan bank bermasalah,”</p> <p>“Atas dasar itu, FPD berketetapan untuk mendukung usul angket kasus Bank Century. Kami akan mendukung seratus persen angket Bank Century. Seluruh anggota FPD kami instruksikan untuk ikut</p>	<p>Body, (paragraf 7, kal pertama)</p> <p>Body, (paragraf 9, kal pertama)</p> <p>Body, (paragraf 10, kal pertama)</p>	<p>memberikan kesan bahwa rumor tersebut telah menyakiti perasaan Presiden SBY.</p> <p>Pernyataan ini menguatkan pernyataan dari Presiden SBY sebelumnya mengenai upaya pemerintah dalam mengungkap kasus Bank Century.</p> <p>Pernyataan ini merupakan alasan yang mendasari Fraksi Partai Demokrat kemudian mendukung pengusulan hak angket kasus Bank Century. Lantunan ini memberikan kesan bahwa Fraksi Partai Demokrat benar-benar memikirkan secara mendetail dan matang dalam melakukan pengambilan keputusan mengenai pengusulan hak angket kasus Bank Century ini.</p> <p>Pernyataan ini menguatkan lantunan yang dinyatakan oleh Anas Urbaningrum dalam teks berita beberapa hari lalu yang berjudul “Usulan Angket Century Tak Perlu Disikapi Berlebihan” bahwa siapa</p>
-------------------------	---	---	---

<p>Marwan Jafar</p>	<p>tandatangan usul angket Bank Century,”</p>		<p>pun yang bersalah berdasarkan hasil audit, harus mendapatkan hukuman tanpa kecuali. Maka, hak angket sebagai salah satu sarana untuk mengetahui pihak – pihak yang bersalah, pengusulannya pun kemudian didukung oleh seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat.</p>
	<p>“Demokrat tak terkait persoalan dana talangan Century sebesar Rp6,7 triliun. Partai Demokrat tidak akan melindungi para pelaku bila ditemukan penyelewengan dana talangan pemerintah ke Bank Century.”</p>	<p>Body, (paragraf 11, kal pertama)</p>	<p>Pernyataan ini berfungsi untuk kembali menegaskan bahwa tidak ada hubungan sama sekali Partai Demokrat dengan dana talangan Bank Century sebesar Rp 6,7 trilyun sekaligus menguatkan sikap Partai Demokrat yang menjunjung tinggi keadilan, bahwa siapa yang bersalah harus dijatuhi hukuman.</p>
	<p>“F-PKB mendukung hak angket dengan alasan, antara lain mendalami kontroversi aliran dana Bank Century, termasuk juga mendorong dewan memanggil PPATK dan pihak-pihak terkait,”</p>	<p>Body, (paragraf 13, kal pertama)</p>	<p>Pernyataan dari salah satu anggota partai koalisi pimpinan Fraksi Partai Demokrat ini menegaskan kembali alasan dari F PKB untuk memberi dukungan terhadap pengusulan hak angket.</p>
<p>“Jika dalam perjalanan pengusutan ditemukan adanya indikasi tindak pidana, seharusnya diserahkan dan diproses secara hukum.”</p>	<p>Body, (paragraf 14, kal pertama)</p>	<p>Pernyataan ini menguatkan pernyataan dari Fraksi Partai Demokrat mengenai proses penegakan hukum, sekaligus menegaskan kesan bahwa partai</p>	



<p>Marzuki Alie</p>	<p>“DPR segera menindaklanjuti audit investigasi BPK terhadap Bank Century untuk diputuskan apakah hasil audit akan diserahkan ke Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau Komisi XI.”</p>	<p>Body, (paragraf 15, kal pertama)</p>	<p>koalisi memiliki sikap yang sama dengan pimpinannya yaitu Fraksi Partai Demokrat.</p> <p>Pernyataan dari Ketua DPR ini menguatkan kesan atas respon yang cepat dari DPR mengenai laporan hasil audit BPK terhadap Bank Century.</p>
<p>Pramono Anung</p>	<p>“meskipun audit BPK tidak mencakup aliran dana Bank Century, dia bersama anggota lain akan menelusuri lebih jauh aliran dana dan membuktikan bahwa hak angket memang diperlukan.”</p>	<p>Body, (paragraf 16, kal pertama)</p>	<p>Memberikan kesan bahwa hasil audit BPK belum bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai arah aliran dana Bank Century sekaligus menekankan upaya dari DPR untuk menelusuri arah aliran dana dan membuktikan bahwa hak angket memang diperlukan untuk mengungkap kasus Bank Century ini.</p>
<p>Priyo Budi Santoso</p>	<p>“diserahkannya hasil audit investigasi BPK yang mengindikasikan adanya pelanggaran proses <i>bail out</i> Bank Century, maka usulan penggunaan hak angket tidak mungkin dibendung lagi.”</p> <p>“Hasil audit investigasi BPK</p>	<p>Body, (paragraf 17, kal pertama)</p> <p>Closure, (paragraf 18)</p>	<p>Menegaskan kembali alasan yang mendasari anggota DPR untuk mengusulkan hak angket.</p> <p>Menguatkan dasar dari pentingnya</p>

	makin menguatkan dugaan adanya pelanggaran prosedur dalam proses pelaksanaan bailout”	hak angket untuk mengungkap kasus Bank Century oleh DPR.
--	---	--

**SUB FRAME SELEKSI**

Jurnal Nasional memosisikan hak angket sebagai salah satu upaya yang harus dilakukan dalam penyelesaian kasus Bank Century setelah melalui laporan hasil audit BPK, diketahui ada ketidakberesan dalam proses pemberian dana talangan (*bail out*). Gagasan ini dapat ditemukan dalam pernyataan Presiden SBY, Anas Urbaningrum, Marwan Jafar, Pramono Anung dan Priyo Budi Santoso yang selalu menyebutkan hubungan antara pengusulan hak angket dengan laporan hasil audit Bank Century.

**ANALISIS SALIANSI**

<b>STRUKTUR RETORIS</b>	<b>STRUKTUR SINTAKSIS</b>	<b>FUNGSI</b>
<p><b>Catchphrases</b> (frasa yang menarik dan menonjol dari sebuah wacana)</p> <p>“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyambut baik usulan anggota DPR untuk menggunakan hak angket terhadap kasus Bank Century.”</p> <p>“Ia meminta percepatan proses hukum bagi para pengelola Bank Century dan segera dapat dikembalikannya dana penyertaan modal Rp6,7 triliun itu kepada negara.”</p>	<p>Lead, kalimat pertama</p> <p>Body, (paragraf 4, kal pertama)</p>	<p>Presiden memandang positif akan adanya pengusulan hak angket kasus Bank Century oleh DPR. Hal ini melemahkan rumor yang beredar bahwa ada dugaan keterkaitan Presiden SBY dan Partai Demokrat dalam kasus Bank Century.</p> <p>Menguatkan wacana bahwa dana talangan Bank Century sebesar Rp 6,7 trilyun merupakan uang negara yang digunakan untuk menyelamatkan Bank Century.</p>

<p>“Fitnah yang sungguh kejam dan sangat menyakitkan,”</p>	<p>Body, (paragraf 6, kal kedua)</p>	<p>Menguatkan kesan bahwa dugaan keterkaitan antara Presiden SBY dan Partai Demokrat dalam kasus Bank Century, telah menyakiti perasaan Presiden SBY sekaligus menegaskan kesan bahwa Presiden SBY merupakan seorang yang teraniaya oleh karena rumor tersebut.</p>
<p><b>Keyword</b> (Sebuah kata / atau bisa juga frase yang menjadi inti sikap atau bingkai yang dibuat atas sebuah wacana. <i>Keyword</i> ini sangat mungkin bersifat denotatif karena lebih lugas dalam menyampaikan sikap.)</p> <p>“...antara lain mendalami <u>kontroversi</u> aliran dana Bank Century,”</p>	<p>Body, (paragraf 13, kal pertama)</p>	<p>Penggunaan kata ‘kontroversi’ menegaskan bahwa aliran dana Bank Century merupakan hal yang masih diperdebatkan dan belum terdapat kesepakatan mengenai status aliran dana tersebut.</p>
<p><b>Exemplaar</b> (Perbandingan yang menguatkan bingkai, mengaitkan bingkai dengan contoh)</p> <p>“Kami akan mendukung seratus persen angket Bank Century.”</p>	<p>Body, (paragraf 10, kal kedua)</p>	<p>Pernyataan ini menguatkan kesan dukungan penuh yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat terhadap pengusulan hak angket kasus Bank Century oleh DPR.</p>

<p><b>Depiction (to picture in words; describe)</b> (penggambaran oleh kata-kata, menguraikan, pelukisan melalui kata-kata sehingga memiliki kesan tertentu)</p> <p>“pemerintah akan melakukan sejumlah langkah dan tindakan internal berangkat dari hasil dan temuan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah diserahkan ke DPR dan Presiden kemarin.”</p> <p>“masalah Bank Century diselesaikan dengan baik, dalam koridor konstitusi, hukum dan perundang-undangan yang berlaku, seraya memerhatikan dan mendengarkan aspirasi dan pendapat umum.”</p> <p>“antara lain mendalami kontroversi aliran dana Bank Century, termasuk juga mendorong dewan memanggil PPATK dan pihak-pihak terkait”</p>	<p>Body, (paragraf 3, kal pertama)</p> <p>Body, (paragraf 7, kal pertama)</p> <p>Body, (paragraf 13, kal pertama)</p>	<p>Pernyataan ini menggambarkan upaya pemerintah dalam mengatasi kasus Bank Century. Melalui pernyataan ini pemerintah terkesan sangat cepat dalam merespon hasil laporan audit BPK terhadap Bank Century yang mengindikasikan adanya pelanggaran dalam proses <i>bailout</i> Bank Century.</p> <p>Lantunan ini memberikan kesan bahwa jalur hukum merupakan jalan utama dalam proses penyelesaian kasus Bank Century, dan hak angket merupakan sarana tambahan dalam upaya penyelesaian kasus Bank Century ini.</p> <p>Pernyataan merupakan <i>excuse</i> dari Fraksi Kebangkitan Bangsa dalam rangka dukungannya terhadap hak angket. Lantunan ini menggambarkan upaya keras F PKB dalam mengungkap pihak-pihak mana yang terlibat dalam kasus Bank Century ini melalui hak angket.</p>
<p><b>Metafora</b> (Perumpamaan; pengandaian; kiasan)</p>		

<p>“ingin mengetahui apakah penyertaan modal sementara Rp6,7 triliun itu ada yang <u>“bocor”</u> atau tidak sesuai dengan peruntukannya”</p>	<p>Body, (paragraf 6, kal pertama)</p>	<p>Penggunaan kata ‘bocor’ dan penggunaan tanda petik “...” menguatkan kesan bahwa aliran dana tersebut tidak digunakan dengan semestinya.</p>
<p>“...maka usulan penggunaan hak angket tidak mungkin <u>dibendung</u> lagi.”</p>	<p>Body, (paragraf 17, kal pertama)</p>	<p>Kata ‘dibendung’ dalam arti harafiah biasa digunakan dalam konteks menahan aliran air. Pemilihan kata ‘dibendung’ menguatkan kesan bahwa hak angket telah disetujui oleh seluruh anggota DPR sehingga tidak ada alasan lagi untuk menolaknya.</p>

**SUB FRAME SALIANSI**

Dalam teks berita ini Jurnal Nasional melakukan penonjolan pada gagasan pemerintah yang konsisten dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus Bank Century, baik itu melalui jalur hukum maupun tanggapan positif pemerintah atas penggunaan hak angket oleh DPR.

**MEDIA FRAME**

<p><b>SUB FRAME SELEKSI</b></p>	<p><b>SUB FRAME SALIANSI</b></p>
<p>Jurnal Nasional memposisikan hak angket sebagai salah satu upaya yang harus dilakukan dalam penyelesaian kasus Bank Century setelah melalui laporan hasil audit BPK, diketahui ada ketidakberesan dalam proses pemberian dana talangan (<i>bail out</i>). Gagasan ini dapat ditemukan dalam pernyataan Presiden SBY, Anas Urbaningrum, Marwan Jafar, Pramono Anung dan Priyo</p>	<p>Dalam teks berita ini Jurnal Nasional melakukan penonjolan pada gagasan pemerintah yang konsisten dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus Bank Century, baik itu melalui jalur hukum maupun tanggapan positif pemerintah atas penggunaan hak angket oleh DPR.</p>

Budi Santoso yang selalu menyebutkan hubungan antara pengusulan hak angket dengan laporan hasil audit Bank Century.

#### **FRAME JURNAL NASIONAL**

Jurnal Nasional dalam teks berita berjudul “SBY Sambut Angket Century” mendeskripsikan hak angket sebagai salah satu sarana untuk mengungkap kasus Bank Century, selain upaya melalui jalur hukum yang ditempuh oleh pemerintah. Dalam menggambarkan upaya tersebut Jurnal Nasional melakukannya melalui contoh yang riil sehingga terkesan pemerintah sangat konsisten dalam menangani kasus ini.

## ANALISIS BERITA 8

**Judul Berita** : Demokrat Resmi Dukung Angket Century  
**Rubrik** : Politik Hukum Keamanan  
**Edisi** : 1 Desember 2009  
**Penulis** : Rhama Deny

## ANALISIS SELEKSI

STRUKTUR SKRIPTURAL	STRUKTUR TEMATIS	STRUKTUR SINTAKSIS	FUNGSI
<b>Obyek Wacana :</b> Penyerahan dukungan dari Fraksi Partai Demokrat yang diwakili oleh Anas Urbaningrum terhadap penggunaan hak angket DPR mengenai kasus Bank Century kepada salah satu inisiator hak angket, Maruara Sirait.	<b>Jenis Wacana :</b> Pernyataan sikap dari Fraksi Partai Demokrat mengenai dukungannya terhadap penggunaan hak angket kasus Bank Century oleh DPR. (Anas Urbaningrum) Pernyataan dari inisiator hak angket mengenai dukungan dari para anggota DPR terhadap penggunaan hak angket. (Maruara Sirait)  Prediksi dari Direktur State Budget Watch mengenai masa depan hak angket kasus Bank Century di DPR. (Ramson Siagian) Pernyataan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang	Lead, sampai dengan paragraf 3.  Body, paragraf 4.  Terdapat dalam sub judul "Tidak Jelas" Body, paragraf 5 – 7.  Body, paragraf 8	Merupakan informasi utama yang ingin disampaikan dalam teks berita ini.       Merupakan informasi tambahan untuk memperkuat informasi utama yang terdapat pada awal teks berita.

	<p>membantah menyudutkan SBY dan Partai Demokrat dalam kasus Bank Century ini. (Anis Matta)</p> <p>Pernyataan mengenai kepentingan-kepentingan politik yang melatarbelakangi penggunaan hak angket untuk mengungkap skandal Bank Century. (internal Partai Demokrat yang enggan disebutkan namanya)</p>	<p>Body, paragraf 9-10 sampai dengan closure, paragraf 11.</p>	
<p><b>Pelibat Wacana :</b></p> <p>Fraksi Partai Demokrat</p> <p>Hak angket kasus Bank Century</p> <p>144 anggota Fraksi Partai Demokrat</p> <p>Anas Urbaningrum</p>		<p>Lead, body (paragraf 2, 3, dan 4)</p> <p>Lead, body (paragraf 4, 5)</p> <p>Lead, body (paragraf 4)</p> <p>Lead, body (paragraf 2,3,dan 4)</p>	<p>Memberikan dukungan atas penggunaan hak angket kasus Bank Century di DPR sekaligus menyatakan harapan mengenai kinerja pansus di masa depan.</p> <p>Salah satu hak DPR yang akan digunakan untuk mengungkap kasus Bank Century.</p> <p>Jumlah anggota fraksi Partai Demokrat yang memberikan dukungan terhadap penggunaan hak angket.</p> <p>Ketua Fraksi Partai Demokrat yang menyatakan dukungan dan</p>



<p>Inisiator hak angket dari Fraksi PDIP, Maruara Sirait.</p>		<p>Lead, body (paragraf 4)</p>	<p>harapannya terhadap penggunaan hak angket kasus Bank Century.</p> <p>Menerima berkas dukungan penggunaan hak angket kasus Bank Century dari Fraksi Partai Demokrat dan kemudian akan membawa draft pengusulan hak angket ini ke rapat paripurna DPR.</p>
<p>Fraksi anggota koalisi</p>		<p>Body, (paragraf 3)</p>	<p>Membelot pada partai pimpinan koalisi yaitu Fraksi Partai Demokrat karena mengarahkan seolah aliran dana Bank Century ditujukan kepada Presiden SBY dan Partai Demokrat.</p>
<p>Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)</p>		<p>Body, (paragraf 3 dan 8)</p>	<p>Sebagai pihak yang tersudutkan karena diduga menerima aliran dana talangan Bank Century.</p>
<p>Partai Demokrat</p>		<p>Body, (paragraf 3, 8 dan 9)</p>	<p>Sebagai pihak yang tersudutkan karena diduga menerima aliran dana talangan Bank Century.</p>
<p>9 Fraksi di DPR</p>		<p>Body, (paragraf 4)</p>	<p>Jumlah fraksi di DPR yang mendukung penggunaan hak angket sebagai sarana untuk mengungkapkan kasus Bank Century.</p>

502 anggota DPR		Body, (paragraf 4)	Jumlah anggota DPR yang mendukung penggunaan hak angket sebagai saran untuk mengungkapkan kasus Bank Century.
Direktur State Budget Watch		Terdapat dalam sub judul “Tidak Jelas”, body, (paragraf 5 )	Atribut yang digunakan oleh Ramson Siagian ketika menyatakan prediksinya mengenai nasib penggunaan hak angket di masa depan, penambahan atribut ini berguna untuk menguatkan pernyataan yang ia keluarkan.
Komisi XI DPR		Body, (paragraf 5)	Jabatan lama dari Ramson Siagian sebelum ia menjabat sebagai Direktur State Budget Watch, yang juga memperkuat pernyataannya sebagai seorang yang ahli dalam hal anggaran keuangan negara.
Ramson Siagian		Body, (paragraf 5 dan 7)	Memberikan prediksi bahwa penggunaan hak angket untuk mengungkap kasus Bank Century akan mengalami kelunturan.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani		Body, (paragraf 5, 10) dan closure (paragraf 11)	Sebagai pihak yang dituding bertanggungjawab terhadap dana talangan Bank Century sebesar Rp

Tokoh-tokoh Senayan		Body, (paragraf 5)	6,7 trilyun, sekaligus sebagai pihak yang menjadi target untuk suatu kepentingan dalam penggunaan hak angket ini. Saham Bumi Resources jatuh oleh karena salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Sri Mulyani.
Proyek APBN ( anggaran pembangunan di Departemen PU, Dephub dan program listrik masuk desa di Dept ESDM)		Body, (paragraf 5)	Sebagai kata ganti untuk para anggota DPR. Proyek-proyek pemerintah yang terkait dengan permainan para anggota DPR.
Tokoh – tokoh nasional		Body, (paragraf 7)	Sebagai kata ganti dari Gus Dur, Megawati dan JK yang mendapatkan kunjungan dari inisiator hak angket agar turut mendukung upaya penggunaan hak angket kasus Bank Century di DPR.
Pansus Angket Century		Body, (paragraf 2 dan 7)	Tim khusus yang terbentuk setelah hak angket diresmikan oleh DPR, berfungsi untuk mengumpulkan data dan fakta seputar kasus Bank Century, sekaligus memeriksa pihak-pihak yang terkait dengan kasus Bank Century.

Sekjen PKS, Anis Matta		Body, (paragraf 8)	Membantah adanya upaya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk menyudutkan Presiden SBY dan Partai Demokrat dalam isu dugaan keterlibatan kedua pihak tersebut dalam kasus Bank Century.
Internal Partai Demokrat		Body, (paragraf 9) dan closure (paragraf 11)	Memaparkan akan adanya kepentingan-kepentingan terselubung dalam penggunaan hak angket kasus Bank Century ini.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		Body, (paragraf 9 )	Disebutkan oleh sumber internal Partai Demokrat sebagai salah satu pihak yang mempunyai kepentingan lain dalam upaya penggunaan hak angket ini.
Bank Indonesia		Body, (paragraf 9 )	Sebagai lembaga yang jajaran pimpinannya banyak berasal dari kader PDIP.
Kader PDIP		Body, (paragraf 9 )	Pihak yang menduduki jajaran pimpinan Bank Indonesia.
Golkar		Body, (paragraf 10) dan closure (paragraf 11)	Disebutkan oleh sumber internal Partai Golkar juga sebagai salah satu pihak yang mempunyai kepentingan lain dalam upaya penggunaan hak angket ini.

Saham Bumi Resources		Body, (paragraf 10) dan closure (paragraf 11)	Harga dari saham ini sempat anjlok oleh karena kebijakan yang dikeluarkan oleh Sri Mulyani.
Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie		Body, (paragraf 10) dan closure (paragraf 11)	Sebagai Ketua Umum Partai Golkar sekaligus pemilik dari perusahaan tambang Bumi Resources.
Saham Newmont		Body, (paragraf 10) dan closure (paragraf 11)	Saham yang akan divestasi oleh Bumi Resources.
<b>Pelantun Wacana :</b>  Anas Urbaningrum	<p>“Fraksi Demokrat berharap pansus angket kali ini jangan jadi pansus-pansusan dan tidak jelas hasil kerjanya,”</p> <p>“Partai Demokrat baru akan menentukan sikap mengenai hal itu nanti, termasuk mengenai kemungkinan adanya <i>resufle cabinet</i> yang dikaitkan dengan kinerja parpol pendukung,”</p>	<p>Body, (paragraf 2, kal pertama)</p> <p>Body, (paragraf 3 kal kedua)</p>	<p>Pernyataan ini memberikan kesan bahwa Partai Demokrat tidak menginginkan hak angket ini digunakan secara sia-sia tanpa ada hasil yang nyata.</p> <p>Lantunan ini memberikan kesan mengenai bahwa koalisi yang dibentuk oleh Partai Demokrat mulai rapuh karena adanya isu dugaan keterkaitan Partai Demokrat dengan kasus Bank Century isu ini kemudian dimanfaatkan oleh partai anggota koalisi untuk menyerang Partai Demokrat. Pernyataan ini juga menggambarkan tindakan yang dilakukan Partai Demokrat</p>

<p>Maruara Sirait</p>	<p>“Semua fraksi di DPR sudah menyatakan dukungannya dengan jumlah keseluruhan pendukung hak angket mencapai 502 orang. Ini adalah dukungan yang sangat signifikan dan kita segera bawa ke paripurna DPR,”</p>	<p>Body, (paragraf 4, kal kedua)</p>	<p>dalam menghadapi “tingkah” partai anggota koalisi.</p> <p>Penjelasan dari salah satu inisiator hak angket ini menggambarkan dukungan dari seluruh anggota DPR baik dari fraksi maupun perorangan yang mendukung penggunaan hak angket ini dalam pengungkapan kasus Bank Century. Lantunan ini hanya diberikan satu paragraf dalam penjabarannya membuat informasi ini seperti tenggelam di tengah – tengah informasi lainnya.</p>
<p>Ramson Siagian</p>	<p>“Hak Angket Century bakal mengalami kelunturan. Hal ini menurutnya karena Menkeu Sri Mulyani menyimpan kartu truf. Sri Mulyani dan staf intinya kemungkinan mengetahui betul tentang permainan tokoh-tokoh Senayan, terkait berbagai proyek APBN. Misalnya, soal anggaran pembangunan di Departemen PU, Dephub, dan program listrik masuk desa di Departemen ESDM.”</p>	<p>Terdapat dalam sub judul “Tidak Jelas”, body, (paragraf 5, kal pertama - ketiga)</p>	<p>Pernyataan ini memberikan kesan bahwa penggunaan hak angket untuk membongkar kasus Bank Century tidak akan memperoleh hasil yang cukup signifikan karena terdapat kasus-kasus yang menimpa para anggota DPR akibat permainan mereka pada proyek-proyek pemerintah diketahui oleh Sri Mulyani. Hal ini tentunya akan menjadi sesuatu yang menguntungkan Sri Mulyani mengingat posisinya saat ini sebagai pihak yang dituding harus bertanggungjawab terhadap dana</p>

<p>Anis Matta</p>	<p>“Selain itu juga pembangunan gedung di Depkeu dan beberapa proyek di departemen lain, serta kegiatan yang berkaitan dengan pembagian dana optimalisasi Rp4,2 triliun untuk beberapa Pemda oleh Panja Daerah.”</p> <p>“Jadi, pada waktu pembentukan opini dan kunjungan ke tokoh-tokoh nasional, memang warna Pansus Angket Century cukup jelas, tetapi begitu pansus terbentuk dan berjalan beberapa langkah, bisa saja ada potensi warnanya menjadi tidak jelas,”</p> <p>“...membantah bahwa fraksi PKS menyudutkan SBY dan Partai Demokrat yang seolah menerima aliran dana Bank Century.”</p>	<p>Body, (paragraf 6, kal pertama)</p> <p>Body, (paragraf 7, kal pertama)</p> <p>Body, (paragraf 8, kal pertama)</p>	<p>talangan Bank Century sebesar Rp 6,7 trilyun. Pernyataan ini melemahkan harapan dari Fraksi Partai Demokrat mengenai hasil dari penggunaan hak angket.</p> <p>Pernyataan yang menggambarkan beberapa proyek pemerintah ini menguatkan pernyataan Ramson Siagian sebelumnya mengenai prediksi kelunturan hak angket.</p> <p>Pernyataan ini memberikan kesan bahwa perubahan orientasi dalam rangka penyelesaian kasus Bank Century dengan jalan penggunaan hak angket bisa terjadi dan memiliki potensi yang cukup besar. Hal ini sekaligus menguatkan pernyataan awal dari Ramson Siagian mengenai kelunturan hak angket.</p> <p>Pernyataan ini kontra dengan pernyataan dari Anas Urbaningrum pada paragraf awal yang menyatakan bahwa fraksi anggota koalisi menyudutkan Fraksi Partai Demokrat dan Presiden SBY terkait</p>
-------------------	---	--	---

<p>Anonim, Internal Partai Demokrat</p>	<p>“bahwa banyak kepentingan partai-partai politik yang bermain dalam kasus ini.”</p> <p>“PDIP terkesan <i>ngotot</i> mendukung angket ini, karena adanya kekhawatiran PDIP akan adanya pergantian jajaran pimpinan di Bank Indonesia yang kebanyakan kader PDIP.”</p> <p>“yang diinginkan Golkar hanyalah menggulingkan Menkeu Sri Mulyani. Ini terkait dengan tindakan Sri Mulyani beberapa waktu lalu yang membuat saham Bumi Resources sempat di <i>suspend</i> yang membuat rontok harga saham perusahaan tambang milik ketua umum Golkar, Aburizal Bakrie.”</p>	<p>Body, (paragraf 9, kal pertama)</p> <p>Body, (paragraf 9, kal kedua)</p> <p>Body, (paragraf 10, kal pertama)</p>	<p>dengan isu keterlibatan kedua pihak ini dalam kasus Bank Century.</p> <p>Menguatkan kesan akan perubahan orientasi dalam proses penggunaan hak angket kasus Bank Century. Pengungkapan pada publik mengenai kejelasan kasus Bank Century bukanlah menjadi tujuan utama.</p> <p>Pernyataan ini menguatkan kesan akan adanya kepentingan politik yang mendasari dalam penggunaan hak angket kasus Bank Century. Penyebutan nama partai politik berikut kepentingan politik yang mendasarinya turut menguatkan kesan bahwa kepentingan politik tersebut nyata adanya.</p> <p>Pernyataan ini semakin memperjelas akan adanya kepentingan politik dalam mendasari penggunaan hak angket kasus Bank Century, disertai dengan penyebutan nama tokoh dan penjabaran secara jelas kepentingan tersebut semakin menguatkan akan adanya niat terselubung dalam penggunaan hak angket kasus Bank Century oleh DPR.</p>
---	---	---	---



	“Ical juga gerah dengan tindakan Sri Mulyani yang menghambat divestasi saham Newmont oleh Bumi Resources,”	Closure, (paragraf 11, kal pertama)	Pernyataan ini memperkuat pernyataan di atasnya mengenai kepentingan terselubung Partai Golkar dalam penggunaan hak angket kasus Bank Century ini.
<b>SUB FRAME SELEKSI</b>			
<p>Jurnal Nasional mendiskripsikan penggunaan hak angket sebagai sebuah sarana dalam mengungkap kasus Bank Century merupakan hal yang sia – sia karena akan mengalami kelunturan dan sarat akan kepentingan politik yang melingkupi penggunaan hak angket, hal ini tampak pada keseluruhan opini yang terdapat dalam teks berita ini memiliki arah untuk memprediksi kelunturan hak angket kasus Bank Century tersebut.</p>			

## ANALISIS SALIANSI

STRUKTUR RETORIS	STRUKTUR SINTAKSIS	FUNGSI
<p><b>Catchphrases</b> (frasa yang menarik dan menonjol dari sebuah wacana)</p> <p>“...yang ditandatangani oleh 144 anggota FPD”,</p>	Lead, (kalimat kedua)	Keterangan ini merupakan bukti konsistensi dari Fraksi Partai Demokrat yang pada berita sebelumnya mengatakan akan mendukung seratus persen penggunaan hak angket dalam penyelesaian kasus Bank Century.

<p>“Fraksi Demokrat berharap pansus angket kali ini jangan jadi pansus-pansusan dan tidak jelas hasil kerjanya,”</p>	<p>Body, (paragraf 2, kal pertama)</p>	<p>Pernyataan ini memberikan kesan bahwa sebenarnya Partai Demokrat melihat peluang akan adanya kelunturan dalam proses penggunaan hak angket untuk mengungkap kasus Bank Century, oleh karena itu fraksi ini kemudian berharap agar peluang kelunturan penggunaan hak angket tersebut dipersempit bahkan ditiadakan.</p>
<p><b>Keyword</b> (Sebuah kata / atau bisa juga frase yang menjadi inti sikap atau bingkai yang dibuat atas sebuah wacana. <i>Keyword</i> ini sangat mungkin bersifat denotatif karena lebih lugas dalam menyampaikan sikap.)</p> <p>“banyak kepentingan partai-partai politik yang bermain dalam kasus ini”</p> <p>“PDIP terkesan <i>ngotot</i> mendukung angket ini, karena adanya kekhawatiran PDIP...”</p>	<p>Body, (paragraf 9, kal pertama)</p> <p>Body, (paragraf 9, kal kedua)</p>	<p>Penggunaan kata ‘bermain’ dalam pernyataan ini mengesankan sikap ketidakseriusan partai politik dalam mengusahakan penyelesaian kasus Bank Century ini. Kasus Bank Century dijadikan sebagai alat untuk melawan kekuatan politik lain yang lebih besar.</p> <p>Kata ‘<i>ngotot</i>’ digunakan untuk menggambarkan sikap dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menjadi salah satu inisiator dalam pengusulan hak angket kasus Bank Century. Kata ini menggambarkan sikap PDIP yang berusaha keras dalam proses</p>

<p>“...yang diinginkan Golkar hanyalah menggulingkan Menkeu Sri Mulyani.”</p>	<p>Body, (paragraf 10, kal pertama)</p>	<p>pengusulan hak angket, hal ini bukanlah sesuatu yang istimewa karena memang PDIP merupakan partai oposisi yang berusaha untuk mencari celah kesalahan pemerintah yang dalam DPR diwakili oleh Fraksi Partai Demokrat.</p> <p>Penggunaan kata ‘menggulingkan’ menguatkan kesan bahwa upaya tersebut benar-benar bertujuan untuk menjatuhkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dari jabatannya.</p>
<p><b>Exemplaar</b> (Perbandingan yang menguatkan bingkai, mengaitkan bingkai dengan contoh)</p> <p>“Semua fraksi di DPR sudah menyatakan dukungannya dengan jumlah keseluruhan pendukung hak angket mencapai 502 orang”</p>	<p>Body, (paragraf 4, kal kedua)</p>	<p>Memperkuat kelanjutan hak angket untuk lolos pada saat rapat paripurna DPR.</p>
<p><b>Depiction (to picture in words; describe)</b> (penggambaran oleh kata-kata, menguraikan, pelukisan melalui kata-kata sehingga memiliki kesan tertentu)</p> <p>“...pada waktu pembentukan opini dan kunjungan ke tokoh-tokoh nasional, memang warna Pansus Angket Century cukup jelas, tetapi begitu pansus terbentuk dan berjalan beberapa langkah, bisa saja ada potensi warnanya menjadi tidak jelas,”</p>	<p>Body, (paragraf 7, kal pertama)</p>	<p>Menggambarkan adanya perubahan orientasi dalam penggunaan hak angket, hal ini kemudian sejalan dengan berbagai kepentingan yang muncul dan melingkupi para inisiator hak angket.</p>

<p><b>Metafora</b> (Perumpamaan; pengandaian; kiasan)</p> <p>“Menkeu Sri Mulyani menyimpan kartu truf”</p>	<p>Terdapat dalam sub judul “Tidak Jelas”, body, (paragraf 5, kal kedua)</p>	<p>Dalam kalimat ini Sri Mulyani diumpamakan sebagai pemegang kartu truf. Kartu truf sendiri dalam permainan <i>bridge</i> merupakan jenis kartu yang dimenangkan atas ketiga jenis kartu lainnya, sehingga pemain yang memperoleh kartu berjenis ini dipastikan keluar sebagai pemenang. Dalam konteks kalimat ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani secara otomatis telah dinyatakan sebagai pemenang dalam ‘permainan’ kasus Bank Century yang ‘dimainkan’ oleh para anggota DPR.</p>
--	--	--

**SUB FRAME SALIANSI**  
 Jurnal Nasional melakukan penonjolan pada gagasan bahwa penggunaan hak angket untuk mengungkapkan kasus Bank Century akan mengalami kelunturan karena adanya kepentingan politik yang melingkupi para inisiator maupun anggota panitia khusus hak angket Century.

**MEDIA FRAME**

<b>SUB FRAME SELEKSI</b>	<b>SUB FRAME SALIANSI</b>
<p>Jurnal Nasional mendiskripsikan penggunaan hak angket sebagai sebuah sarana dalam mengungkap kasus Bank Century merupakan hal yang sia – sia karena akan mengalami kelunturan dan sarat akan kepentingan politik yang melingkupi penggunaan hak angket, hal ini tampak pada keseluruhan opini yang terdapat</p>	<p>Jurnal Nasional melakukan penonjolan pada gagasan bahwa penggunaan hak angket untuk mengungkapkan kasus Bank Century akan mengalami kelunturan karena adanya kepentingan politik yang melingkupi para inisiator maupun anggota panitia khusus hak angket Century.</p>

dalam teks berita ini memiliki arah untuk memprediksi kelunturan hak angket kasus Bank Century tersebut.

#### **FRAME JURNAL NASIONAL**

Jurnal Nasional memposisikan penggunaan hak angket untuk mengungkap kasus Bank Century oleh DPR, akan mengalami kelunturan karena pada akhirnya, kepentingan politik akan mengalahkan orientasi atau tujuan awal penggunaan hak angket ini. Pesan utama dari teks berita ini adalah sikap pesimis terhadap penggunaan hak angket, hal ini ditunjukkan dengan adanya prediksi maupun dugaan yang secara tidak langsung telah melunturkan tujuan utama hak angket itu sendiri.

## **Interview Guide**

### **Pertanyaan umum seputar kinerja rutinitas SKH Umum Jurnal Nasional**

1. Biodata narasumber yang diwawancarai (Pengalaman organisasi, pengalaman kerja, sebelum jadi wartawan apakah ada pelatihan terlebih dahulu? Apakah ada penekanan khusus dalam dalam pelatihan tentang kasus apa yang baik untuk diberitakan dan bagaimana pemberitaannya? )
2. Sejarah dan data (perkembangan SKH Jurnal Nasional sampai saat ini dan visi misi)
3. Rutinitas organisasi dari pra – pasca peliputan (alur proses produksi berita)
4. Sistem seleksi berita (bagaimana seleksi terhadap pemuatan berita)
5. Sistem rubrikasi, penentuan rubrik dalam Jurnal Nasional
6. Sistem rapat redaksi dan kebijakan redaksional tertentu?
7. Menurut anda, apa saja yang menjadi ciri khas dari Jurnal Nasional dalam pemberitaannya?
8. Pernahkah Jurnal Nasional diprotes oleh pihak-pihak yang diberitakan? Bagaimana menyikapinya?

### **Pertanyaan tentang pemberitaan pengusulan hak angket di SKH Jurnal Nasional**

1. Bagaimana pendapat anda mengenai pengusulan hak angket?
2. Apakah anda setuju dengan hak angket ? alasannya?
3. Apakah dalam pemberitaannya Jurnal Nasional memberikan porsi yang sama (*cover both side*) ?
4. Pandangan Jurnal Nasional tentang pengusulan hak angket kasus Bank Century oleh DPR, berbeda dengan surat kabar nasional lainnya, mengapa?
5. Apa yang melatarbelakangi pemberitaan sehingga masuk dalam halaman muka selama 3 hari?
6. Apa yang menjadi pertimbangan dalam memilih wartawan yang ditugaskan meliput?
7. Bagaimana posisi Jurnal Nasional terkait dengan pengusulan hak angket ini?
8. Bagaimana menentukan narasumber yang dipilih? mengapa kecenderungan berasal dari Partai Demokrat ?
9. Dalam memilih foto atau visual images apa yang dipertimbangkan?
10. Dalam memilih judul, apa yang dipertimbangkan? otoritas wartawan atau keputusan redaksi?
11. Menurut anda, apa saja yang menjadi ciri khas dari Jurnal Nasional dalam pemberitaannya?
12. Pernahkah Jurnal Nasional diprotes oleh pihak-pihak yang diberitakan? Bagaimana menyikapinya?

13. Kendala apa yang ditemui saat proses produksi berita?
14. Bagaimana anda memandang kasus pengusulan hak angket century oleh DPR ini?
15. Berdasarkan pemberitaan mengenai pengusulan hak angket? Opini apa yang sebenarnya ingin dibentuk oleh Jurnal Nasional?

#### **Pertanyaan untuk wartawan**

1. Bagaimana anda melihat pengusulan hak angket ini secara personal?
2. Secara pribadi apakah anda setuju dengan pengusulan hak angket ini? alasan?
3. Bagaimana pemilihan narasumber dalam penulisan berita mengenai pengusulan hak angket ini?
4. Siapa saja narasumber yang ditemui ketika meliput pengusulan hak angket ini?
5. Apakah ada hambatan dalam penulisan berita mengenai pengusulan hak angket ini? Bagaimana pengalaman anda?
6. Adakah rutinitas organisasi SKH Umum Jurnal Nasional yang mempengaruhi anda dalam membuat berita?
7. Seberapa besar pengaruh isu mengenai keterlibatan Presiden SBY dan Partai Demokrat dalam kasus Bank Century ini dalam pemberitaan yang dilakukan SKH Umum Jurnal Nasional?
8. Bagaimana SKH Umum Jurnal Nasional memandang isu tersebut?
9. Sebagai wartawan apakah pernah menerima suap?
10. Apakah frame sebenarnya yang ingin dibentuk oleh Jurnal Nasional pada pemberitaan mengenai pengusulan hak angket kasus Bank Century ini?
11. Apa yang mendasari frame tersebut?
12. Bagaimana frame itu dijelaskan kepada wartawan?
13. Apa saja yang dibahas dalam rapat redaksi?
14. Siapa yang memimpin rapat redaksi? Apakah semua wartawan wajib datang? Bagaimana suasana rapat redaksi?

#### **Pertanyaan yang berhubungan dengan teks berita**

##### **Berita I**

Demokrat : Usul Angket Century Terburu-buru

1. Mengapa menitikberatkan pada wacana hak angket terburu-buru, yang notabene merupakan argumen dari Partai Demokrat?
2. Mengapa tidak ada pernyataan dari inisiator hak angket?
3. Melalui berita ini, apa yang anda ingin sampaikan kepada pembaca? Alasan?

## **Berita II**

Pemerintah Siap Jernihkan Angket Century

1. Mengapa Jurnal Nasional melakukan penonjolan terhadap wacana hak angket yang wajar dan tidak perlu dikhawatirkan?
2. Melalui teks berita ini, pandangan Jurnal Nasional terhadap pengusulan hak angket sebenarnya bagaimana?
3. Mengapa lantunan dari Taufik Kiemas ikut disertakan dalam teks berita ini?
4. Pernyataan dari Anas Urbaningrum juga kembali diikuti sertakan dalam teks berita ini?
5. Hal apa yang mendasari pemilihan foto Boediono dalam teks berita ini?

## **Berita III**

Proses Hak Angket Century Masih Panjang

1. Dalam teks berita ini, mengapa Jurnal Nasional berulang kali menonjolkan wacana proses hak angket yang masih panjang? hal ini tampak melalui pandangan beberapa pakar yang opininya mendukung satu sama lain?
2. Mengapa porsi untuk narasumber dari fraksi Partai Demokrat lebih mendominasi daripada narasumber yang lain?
3. Apakah dengan ini lantas Jurnal Nasional mendukung keputusan Fraksi Partai Demokrat untuk belum menandatangani berkas pengusulan hak angket maupun gagasannya mengenai pengusulan hak angket ini? Mengapa?

## **Berita IV**

Usulan Angket Century Tak Perlu Disikapi Berlebihan

1. Mengapa memilih opini dari inisiator yang merupakan anggota dari partai koalisi? Mengapa tidak Fraksi PDIP yang jelas-jelas merupakan inisiator utama dari hak angket ini?
2. Mengapa lantunan opini dari Anas Urbaningrum kembali diikutsertakan? Seberapa pentingnya opini ini sampai muncul di tiga teks berita?
3. Mengapa memilih narasumber Mukhammad Misbakhum? Yang belakangan diduga diduga menerima surat kredit impor L/C dari Bank Century senilai US \$ 22,5 juta pada tahun 2007?

## **Berita V**

Audit Century Diumumkan Pekan Depan

1. Mengapa menggunakan judul yang berhubungan dengan audit BPK, sedangkan keseluruhan isi berita mengemukakan mengenai gagasan partai demokrat yang tidak menyetujui dana talangan century merupakan bailout?
2. Mengapa isi berita menitikberatkan pada gagasan dari partai demokrat?



3. Mengapa partai demokrat diberikan ruang cukup besar untuk mengemukakan gagasannya?
4. Dan mengapa pihak – pihak yang mengemukakan alasannya merupakan pihak yang memiliki pandangan sama dengan Partai Demokrat?

#### **Berita VI**

Presiden Ingin Kasus Century Dibuka

1. Mengapa Jurnal Nasional menempatkan kasus Bank Century menjadi tema utama dalam teks berita ini, (Kasus Bibit Chandra menjadi topik kedua dalam teks berita ini) bersama dengan informasi mengenai pengusulan hak angket Bank Century oleh DPR?
2. Apakah melalui teks berita ini Jurnal Nasional memberikan kesempatan kepada presiden untuk melakukan konfirmasi atas isu-isu yang berkembang terhadap dirinya?

#### **Berita VII**

SBY Sambut Angket Century

1. Mengapa teks berita ini menitikberatkan pada dukungan presiden terhadap hak angket kasus Bank Century?
2. Mengapa teks berita ini masuk dalam kolom fokus hari ini di rubrik halaman muka?

#### **Berita VIII**

Demokrat Resmi Dukung Angket Century

1. Mengapa opini atau gagasan yang dimunculkan dalam teks berita ini mengarah pada kemungkinan lunturnya hak angket kasus Bank Century?
2. Apakah dengan munculnya opini dan gagasan tersebut, SKH Umum Jurnal Nasional merasa pesimis terhadap hasil dari penggunaan hak angket Century oleh DPR? Mengapa?
3. Mengapa berita ini ditempatkan pada kolom politik hukum dan keamanan?
4. Mengapa Jurnal Nasional memilih untuk melindungi narasumber terakhir dalam berita ini dengan tidak menyebutkan namanya? Seberapa pentingkah pernyataan yang ia sampaikan?

**Transkrip wawancara langsung tanggal 19 Mei 2010 dengan :**  
**Redaktur halaman satu SKH Jurnal Nasional Jan Prince Permata,**  
**Reporter SKH Jurnal Nasional Frederich Batari**  
**dan penanggung jawab surat pembaca SKH Jurnal Nasional Veri Hardiman**

Keterangan

- A : Penulis, Yudit Mahargyaningtyas  
B : Jan Prince Permata  
C : Very Hardiman  
D : Friederich Batari

- B : “Jadi gini garis besarnya, jadi kau dah tau Jurnas itu koran sapa? Biar kamu paham biar gak ada ini...”
- A : “Setau aku dari yang aku baca di Tempo itu,...setelah ada buku Gurita itu..”
- B : “Ya,...nggak papa..”
- A : “Setau aku emang yang mendirikan ini kan Blora Institute,kan?”
- B : “Sama Brighten Institute”
- A : “Jadi otomatis...”
- B : “Kalo Brighten kamu tau siapa?”
- A : “Asto Sunu siapa gitu,mas...”
- B : “Ok,kamu tau Brighten itu lembaganya siapa kamu tau?”
- A : “Tau..”
- B : “Yang Blora juga kamu tau? Ya oke..”
- A : “Jadi ini koran pastinya yang punya lembaga itu tadi.”
- B : “Afiliasinya ke SBY,ya?”
- A : “Ya”
- B : “Ya udah berarti kamu dah tau awalnya,kan? Jadi bener koran ini dulu sejarahnya memang yang mendirikan Blora dan Brighten. Brighten itu dulu tim ekonominya SBY, waktu SBY sekolah di IPB dulu. Tim ekonomi salah satu yang membentuk dari Brighten itu jadi gitu kan? Jadi koran ini memang didirikan untuk mendukung gagasan – gagasan politik ekonomi SBY, cita-citanya dulu begitu dalam prosesnya dia memang membela kebijakan politik ekonominya SBY.”
- A : “Semuanya?”
- B : “Kebijakan SBY terutama kebijakan politik ekonominya SBY, sehingga termasuk untuk Century koran ini sama sebangun sikapnya dengan SBY. Koran ini menilai kebijakan Century itu bener, kita lihat karena itu adalah...”
- A : “Bailoutnya itu bener?”
- B : “Karena itu kebijakan untuk melakukan penyelamatan perekonomian, analoginya kan gini...ini cerita,ya... Kita kan masuk dalam suatu sistem ekonomi pasar yang memang ada metodologi, ketika melihat problem-problem ekonomi pasti ada metodologi dan alat untuk melihat itu. Nah, dalam

pendekatan itu memang lazimnya kalo ada problem dalam perbankan mereka akan melakukan apa,ya? mereka takut berdampak sistemik terhadap sistem perekonomian. Nah, kita berangkat dari cara berpikir itu, jadi kita menganggap bahwa itu adalah sebuah penyelamatan sistem yang tepat. Nah, saya tidak tahu alasan yang tidak setuju itu karena apa,ya? Kita berangkat dari wilayah itu dulu jangan ke problem politiknya, sama seperti misalnya saat ini kalo kamu baca Tony Prasentono yang terbaru soal bagaimana Yunani, negara yang kecil mau nggak mau diselamatkan oleh uni eropa karena yang terjadi di Yunani bisa berdampak terhadap Eropa secara keseluruhan, seperti itu yang mencoba dilihat sebagai dampak dari Century itu. Akhirnya kalo DPR melihat dalam kerangka berpikir seperti itu, tapi kan DPR melakukan vonis politik. Bagi Jurnas tetep kalo memang kebijakan itu keliru tetep harus dilihat dari masalah hukumnya, bagi kita sikap kita kebijakan bailout itu tepat karena memang untuk penyelamatan perekonomian. Jadi kalo kamu baca Jurnas semua yang ditulis Jurnas adalah...”

- A : “dan pilihan *angle* nya memang yang mendukung kebijakan SBY itu tadi,ya?”  
B : “Ya, karena memang ini. tapi kan kita juga gak ini, tapi kan kita merasa pilihan *angle* jurnas itu memang ...”  
A : “beresiko?”  
B : “Untuk menunjukkan bahwasanya kita memang membela terhadap keputusan itu dengan penjelasan-penjelasan ekonomi karena memang ada ekonom-ekonom yang juga menyatakan kebijakan Century itu tepat,tha? Kalo kamu baca misalnya riset di semua medialah, saya sih yakin,ya...? Dari ya..mungkin sekitar 70 % ekonom setuju terhadap penyelamatan Century. Setuju, karena termasuk kalangan perbankan, pelaku ekonomi menyetujui itu. Nah, memang menjadi masalah ketika dia masuk ke DPR karena saya lihat itu tadi saya nggak tau apakah mereka-mereka yang di DPR itu memahami kerangka kerja perekonomian, karena memang kalau kita melihat sistem perekonomian kita sekarang dari kacamata di luar itu, misalnya kita itu kan ekonomi pasar, memang kalo kita melihat ekonomi pasar misalnya dari ekonomi kerakyatan terminologinya, memang kalo ada problem di sini pasti kalo didekati dengan cara-cara ekonomi pasar pasti akan keliru. Nah,saya melihat memang banyak mereka-mereka yang kritis itu dan itu ben,..nggak salah mereka mengkritisi itu kebijakan itu, tetapi alangkah ininya kalo kebijakan itu seandainya Century itu tidak diselamatkan dan dampaknya begitu besar terhadap perekonomian, bayangkan apa yang akan terjadi di Indonesia kan seperti itu. Jurnas sejak awal dalam diskusi kita mengambil pilihan itu, jadi memang kita mengambil pilihan segala hal terkait dengan Century kita akan mendorong termasuk dari ekonom maupun dari politisi untuk meyakinkan publik bahwa pilihan ini benar demi penyelamatan ekonomi. Nah, itu posisi kita dan gak bergeming kita, makanya memang dibanding dengan koran-koran lain akhirnya kita beda sendiri.”

- A : “Nah, itu yang bikin aku tertarik penelitian karena itu tadi korannya beda sendiri, trus dilihat dari narasumbernya juga orang-orang Demokrat kemudian lantunannya satu dengan yang lain itu saling melengkapi.”
- B : “Kan gini,dit? Kalo dia politisi narasumbernya, ada pengamat politik, ada ekonom, tentu ada dari pemerintah, kalo kita bisa bagi-bagi,ya...politisinya kamu lihat Demokrat rata-rata,ya? “
- A : “Iya,..sebenarnya yang bikin aku penasaran lagi kenapa mau-maunya bikin koran yang kalo dilihat dari segi pasar itu nggak untung.”
- B : “Nggak untung, ya? Kenapa mau, ya? Makanya kalo bertanya kenapa mereka bikin koran ya mungkin itu tadi, sulit ya jawabnya tapi kan harusnya ditanya kepada yang punya modal, paling pas kamu tanya ke situ,ya? Kalo saya kan yang sehari-hari bergelut editing di halaman satu, kalo kamu tanya kenapa mau-maunya ini, ya..gimana,ya..mungkin ya bagi saya ya....Saya ini secara pribadi juga punya pandangan politik ekonomi mungkin berbeda terkadang dengan koran ini, karena saya bukan yang punya koran. Tapi kan saya sudah mengumumkan sebuah kontrak untuk masuk ke sini kan? Kontrak, saya sudah paham gitu,ya? Saya dulu dari Seputar Indonesia, Harian Merdeka, pernah di Pikiran Rakyat. Ketika saya memutuskan di sini, saya bukan anggota Partai Demokrat itu pasti, pas pemilu pun saya milih tiga partai salah satunya Demokrat. Kita ketika ada di sini ya memang harus mengikuti aturan yang ada di sini, etika...arah kebijakan pemerintah kita, tetapi mungkin kalo kamu liat belakangan ini karena kita sedang ada proses pergantian pemimpin redaksi ini agak beragam kalo kamu baca jurnas hari-hari terakhir ini.
- A : “ Aku lihat yang baner di bawah koran itu ada tulisan perubahan gitu,mas...”
- B :“ Kebetulan masih saya yang megang pada saat proses pergantian dari pemred Ramadhan Pohan ke Asro Kamal Rokan yang bekas dirut Antara, dia bukan anggota Partai Demokrat. Kalo dulu Ramadhan Pohan kebetulan dia dulu pengurus Partai Demokrat, kalo Asro enggak, jadi kalo kamu mau lihat Jurnas hari-hari ini ya dia akan lebih beragam,ya? tetapi tetep untuk problem-problem prinsip seperti Sekretariat Gabungan Koalisi ya Jurnas tetap akan menyertakan (tertawa). Sergap itu untuk intervensi bukan kemenangan Golkar tapi itu sebagai sebuah upaya untuk membuat politik itu mempunyai komunikasi yang baik lalu membuat politik lebih stabil agar program-program pemerintah tetap berjalan misalnya tidak terjadi kasus-kasus seperti Century dimana masing-masing partai itu..
- A : “Berbeda-beda..”
- B : “Ketika mereka itu memang sudah sepakat untuk koalisi ya..Sergap itu memang untuk itu, kalo koran-koran lain kan enggak itu merupakan kealahannya pemerintah karena Golkar bisa masuk, ini satu, pembagian kekuasaan, ini kompromi politik. Tapi Jurnas enggak memang uniknya Jurnas dia akan mengambil wilayah begitu, ya memang pilihannya Jurnas memang sudah begitu dia kadang-kadang ya akan menjadi sendiri dalam ranah,...tapi toh tetep juga itu Jurnas ada yang baca tu saya lihat, orang masih mau baca

Jurnas saya lihat dan unikny mungkin orang yang berkepentingan dengan SBY akan membaca Jurnas, yang pastinya dibaca di DPR.”

A : “Karakter pembaca dari Jurnas itu sendiri seperti apa?”

B : “Tentara, itu satu. Pembaca Jurnas itu salah satunya adalah tentara, kedua itu...pasar kita awalnya kan menengah ke atas,ya? kita bukan menengah ke bawah,ya? maka pilihannya adalah tentara, pegawai birokrat, pegawai pemerintahan karena memang Jurnas itu masuk ke semua departemen-departemen beredarnya di Jabotabek,kan? Ya itu dia tipikalnya itu dan masyarakat umum yang membaca Jurnas juga saya kira mereka yang apa yang merasa punya kaitan juga saya akui dengan SBY dan Partai Demokrat yang tertarik dengan gagasan-gagasan itu dan masyarakat umum lain yang pengen tau juga isi Jurnas hari ini apa? Jadi karakter pembacanya seperti itu dan masih agak spesifik sampai saat ini,ya? tapi memang kita sedang ingin keluar dari itu, kita akan melakukan perubahan-perubahan ini.”

A : “masih di Jakarta ini?”

B : “Ya, Jakarta.. di Bogor kita punya cabang Jurnal Bogor, di Depok. Jadi karakternya Jurnas itu begitu dan unikny pemberitaan kita itu gak pernah ditegur oleh Dewan Pers dan kita nggak pernah melanggar itu etika jurnalistik dan memang dalam pers itu memang dibenarkan,kan melakukan pembelaan terhadap ini, misalnya di Amerika kalo aku ngeliat Washington Post lebih kepada Demokrat kalo gak salah dan yang satu itu lebih kepada Republik, kan seperti itu tetap ada pilihan-pilihannya. Dan kalo kamu baca pemberitaan soal Century Tempo itu lebih garang dari Jurnas belain ini.lho? Kalo kamu riset Tempo itu hampir sama sikapnya dengan Jurnas soal kasus Century, ya kamu bisa baca kenapa sikapnya. Belakangan Tempo memang lagi marak karena Sri Mulyani akhirnya ikut Bank Dunia. Nah saya nggak tau kamu cari tahu apa hubungan tempo dengan Sri Mulyani jadi begitu ada kaitan-kaitannya seperti itu. Jadi gitu.lho..”

A : “Kalo proses produksi beritanya sendiri gimana,mas? Dari awal wartawan mencari berita kemudian setelah itu rapat dan sebagainya.”

B : “Jadi begini kan,gini kan...kalo ini kan biasa kerja wartawan itu...wartawan, wartawan itu kan di lapangan Cuma kalo biasanya kan kita ada rapat, rapat redaksi,ya? Biasanya jadi begini,aaaa...kita kan gak bisa menciptakan apa,ya? sebenarnya kita kan gak bisa tiba-tiba membuat sebuah berita kan? Semuanya pasti berdasarkan fakta yang terjadi tapi kita memang bisa mendorong dalam suatu berita kita bisa memberikan arahan berita kita bisa, tapi berita itu sendiri kan sebuah kejadian kan? Jadi nggak bisa direkayasa, fakta itu nggak bisa kita rekayasa tetapi bisa kita buat dalam sebuah sudut pandang yang menurut kita bisa berbeda dengan orang itu tergantung kita giring ke arah mana tapi fakta sendiri tidak bisa dibuat atau direkayasa itu pasti hukumnya kan begitu.”

A : “Tapi bisa dibolak-balik...”

B : “Misalnya orang tabrakan kamu sendiri tidak bisa diubah menjadi nggak tabrakan kan? Keputusan bailout century terjadi kamu tidak bisa diubah kalo

gak ada bailout kan enggak!! Cuma Jurnas itu memang ya seperti ini wartawan bekerja kita...mereka memberikan laporan kepada seperti saya (redaktur) di halaman satu, memberikan laporan mengenai proses politik ekonomi politik, berita itu kemudian dibuat matrixnya dan kemudian kita rapat, kita diskusikan jadi begitu sama seperti koran yang lain, nggak ada yang istimewa jadi sama reportase melaporkan kepada editornya, editor melakukan edit, redaktur pelaksana yang melihat kemudian terakhir dilihat oleh wapimred, pimred baru kemudian turun ke bawah masuk ke proses cetak. Jadi nggak ada yang istimewa.”

A : “kalo rubrikasinya sendiri?”

B : “Rubrikasinya ? kamu dah liat Jurnas yg baru kan? Kita kasih nama politik, ekonomi, keuangan, hukum, sosial budaya, ada halaman kota, ada ...rakyat, sosok dan ada satu aaa... rubrikasi olahraga khusus 8 halaman.”

A : “Top Soccer itu, ya?”

B : “Ya, Top Soccer dan itu memang kita akui upaya Jurnas untuk mencoba merambah pasar, ya? karena ketika kita mengambil pilihan sebagai koran politik waktu itu kan semakin terbatas ini ruangnya, kan? Kamu politik lagi, kamu SBY lagi kan orang ini waaa.... baca Jurnas pasti ini baca ini SBY baca Jurnas pasti nanti diajar-ajarin lagi pembaca kan mesti mikir begitu, kan? Mereka kan nggak bisa kita ajar-ajarin, kan? Pembaca, kan kalo kamu mau membeli sesuatu kamu pasti akan memilih yang menurut kamu....ya mosok kamu diarah-arahan, pasti gitu kan? Ini korannya pasti gini, kan? Ya,..akhirnya kita mencoba mengambil trobosan...ya Top Soccer itu, levelnya sebenarnya pembacanya menengah ke bawah kan bola itu, ya? tapi itu sangat laku juga, kalo kamu nanti perlu sedikit Top Soccer nanti saya panggil penanggungjawabnya.”

A : “Orang waktu kemarin saya beli Jurnas di Senen, dikasihnya aku bingung koq Top Soccer? Ternyata setelah di balik ada Jurnasnya.”

B : “Karena kalo Jurnas aja nggak laku, pengalamannya selalu begitu, tapi sejak pergantian pimred memang kita ini ya melakukan perubahan-perubahan misalnya ini, ya? Saya ceritain ke kamu, dulu kan selalu kan..hmm apa, ya? Siapa yang memimpin itu pasti kan yang memimpin koran itu pasti terkait dengan organisasi di bawahnya, karena yang memimpin itu adalah Pak Ramadhan Pohan, sekarang dia di DPR Komisi I yang kemudian terkenal dengan George Aditjondro itu, ya? Jadi politiknya saat itu kental dengan politik Demokratnya memang sangat kental saya akui, ya? Sehingga foto di depan pun presiden, istrinya, tapi belakangan ini setelah terjadi proses pergantian pemimpin redaksi kita juga melakukan perubahan sehingga foto depan nggak harus SBY, SBY kalo tidak terlalu kuat juga nggak harus kita paksa tapi kalo SBY ke luar negeri kita mencoba untuk tetep mendorong karena menurut kita itu peristiwa penting, ya? SBY ke luar negeri kita paling, kalo saya sejak ada perubahan itu paling foto SBY di depan itu kalo misalnya hal-hal yang sangat besar misalnya upacara kenegaraan seperti itu, dia ke luar negeri sekarang foto apa saja bisa,

bahkan kongres PDIP kemarin kita juga melakukan peliputan-peliputan. Kamu tau,kan?”

A : “Nggak tau, gak baca,mas..”

B : “Saya yang berangkat waktu itu kongres PDI di Bali dan kita melakukan peliputan juga, melaporkan juga jadi seperti itu.”

A : “Itu koq diganti kenapa pimrednya?”

B : “Ya memang,...kan nggak boleh rangkap jabatan, Ramadhan dah jadi anggota DPR, masak dia terus jadi kan seperti itu? Jadi nggak ada masalah apa-apa, normal-normal aja dan sekarang kebetulan Asro Kamal Rokan ini dulu dirut Antara, bekas pimred Republika dan kita bisa lebih bebas memberitakan itu, gitu.lho?”

A : “Sebenarnya ciri khas dari Jurnas itu bagaimana? Berita positif seperti itu?”

B : “Ya..dulu kan gini dulu..*good news is news*,...slogannya, berita yang positif itu adalah berita yang,..yang,..kalo memang berita itu baik ya beritakan baik kalo enggak ya enggak kan seperti itu. Jurnas sejak awal memang mau mengambil ideologinya ya itu. Nah,..saya..karena bukan saya yang saya kan Cuma sejak awal kan Cuma bekerja di sini, bukan saya yang merancang ya...”

A : “Berapa tahun bekerja di sini,mas?”

B : “Sudah sejak awal, sejak 1 Juni 2006, saya sejak 1 Mei di sini, tapi saya bukan yang merancang koran ini,lho? Jadi kenapa *good news is news* ya, karena kabar dulu begini alasan yang saya tangkap itu jadi pendirian koran ini memang melakukan, kalo kamu baca Tempo pasti kamu tau proses diskusi dengan presiden ada SBY ada,kan?”

A : “Ada..”

B : “Kabarnya ya,..konon kabarnya SBY itu,ya...ngeliat berita koq koran itu selalu jelek tentang pemerintah,kan? Misalnya ada kemiskinan 15 %, ya kan? Turun menjadi 14 % ya beritakan lah..misalnya turun tapi nggak, kemiskinan masih 14 % itu pilihan koran dan itu nggak salah juga? Kenapa nggak dibuat Jurnas ini memberitakan kemiskinan turun 1 % ya itu kan bener gitu.lho? Sehingga buatlah itu, jadi seperti itu *good news* itu ya begitu kita beritakan yang inilah karena kalo memang bener ada jangan mengambil sisi yang ekstreem,..sesuatu yang negatifnya saja, kira-kira begitu ”

A : “Pasti yang bagus-bagus..”

B : “Ya bagus-bagus kalo kamu kan pasti nggak menarik,kan?”

A : “Nggak ada konfliknya”

B : “Jurnas itu melakukan perubaha-perubahan juga karena hukumnya pers itu kan memang nggak bisa diatur-atu,kan? Naa,..jadi begitu.. kamu bosan juga kali,ya? koq sama terus jawabannya.. Apa menariknya kamu menganalisis ini kamu dah tau korannya ini,koq..saya orangnya ya ngomong apa adanya aja, saya nggak bisa ngomong kita ini begini-begini,..nggak tau juga koq mereka ngasih wawancaranya ke aku, soalnya saya redaktur halaman satu mungkin,ya?”

A : “Berita yang aku analisis juga kebanyakan dari halaman satu.”

- B : “Tapi sekarang kalo kamu tanya? Mas, suka sama SBY nggak? Pasti jawabannya beda, kebetulan saya kerja di sini ya,kan? Kan kayak gitu,..”
- A : “Berarti secara otomatis kalo di sini, kan nggak mungkin kan wartawan menelorkan apa yang ia pikirkan bener-bener murni? “
- B : “Mungkin aja, ruang itu tetap ada jadi diskusi lanjut tetap ada, tapi kalo akhirnya itu tidak tertuang dalam tulisan itu problem lain, memang tetep terjadi,..Saya itu sering ngotot ngamuk-ngamuk trus orang-orang marahin saya,..waaaa.. ini memang resiko yang harus saya tanggung karena saya tanggung jawab saya adalah seperti itu kan. Sering terjadi dinamika itu sering terjadi, mungkin...kita nggak menutup ruang koq? Emang kamu tau wartawan di sini yang nyoblos PKS, nyoblos PDIP? Mang ada yang tau kan enggak,kan? Dan ternyata orang-orang di Jurnas itu bukan dari partai, ada yang dulu di Tempo, Jakarta Post dan tetep orang pers yang pikirannya berbeda.”
- A : “Beda-beda tapi nulisnya harus...itu..”
- B : “Ya itu ketika dia masuk ke Jurnas kan di harus begitu,..ya dia memang sudah memilih kan? Dia memang harus bisa ngatur, kalo nggak ya..kalo masih pengen bebas menulis ya monggo keluar kan kayak gitu, ya memang itu harus begitu memang unik ini, Cuma mana tau di sini ada yang PKS, ini aja nggak tau kan? Mana bisa?”
- A : “Berdasarkan berita-berita yang seperti itu opini yang diharapkan dari orang setelah baca itu kemudian mereka berpikir positif terhadap pemerintahan kembali lagi?”
- B : “Ya enggak, ya kita nggak tau kita opini publik yang terbentuk, jadi gini itu belum pernah diteliti satu,kan? Pembaca jurnas itu kan? Tapi kalo kamu baca surat pembaca yang masuk itu koq senada dengan semua pemberitaan kita,..ya itu artinya kan berarti ada pembaca setia koran ini kan ada..keluarga tentara itu tadi ya ada, buktinya surat pembaca semua ini kan dan kita nggak nyeleksi,lho? Surat pembaca itu memang,..saya juga unik itu koq surat pembaca,..coba saya telepon penanggung jawab surat pembaca itu,ya? Saya suruh ke sini.. tapi banyak,lho yang mau nulis di Jurnas rektor-rektor ini..., banyak yang tertarik menulis...  
Bung, posisi di mana bung? Ooo,bukan di kantor,ya? eh, bung..saya mau tanya itu surat pembaca itu yang masuk ke kita,..saya sedang diwawancara oleh mahasiswi ini namanya Yudit dari Atma Jaya dia pengen bikin skripsi soal pemberitaan jurnas terutama terkait century, saya mau tanya surat – surat pembaca yang masuk ke kita yang bung tangani itu dari pembaca Jurnas kan,ya? soal opininya itu ,...tapi yang terbaru itu memang pembaca Jurnas sendiri yang mengirimkan itu,ya? “
- C : “Iya, mereka yang kirim...”
- B : “Dan nggak ada yang kita rekayasa dari yang kita tampilkan kan,ya?”
- C : “Nggak,nggak...”
- B : “Seperti itu,ya?”
- C : “Ada satu dua yang kalau misalnya hari tertentu itu baru kita buat..”



- B : “Tapi faktanya saat ini semuanya tetep dari pembaca artinya ada pembaca yang setuju dengan pemberitaan-pemberitaan dan sikap-sikap kita seperti itu,ya? kira-kira...”
- C : “Terutama mereka yang kirim surat opini ke sini,..”
- B : “Rata-rata itu,bung? Keluarga tentara,ya? bukan? “
- C : “,...tapi itu tentara soalnya mereka lebih banyak tulis tentang TNI gitu, tapi mereka nggak sebutkan soal identitas cuman dari isi suratnya itu seperti itu..”
- B : “Oke bung kalo gitu, thank you,ya? jadi itu,..ini calon pastor gagal ini dari NTT...  
Bener kan dia bilang, ya? banyak orang membacanya kemudian menulis surat pembaca, jadi itu ada,...”
- A : “Yang penting ada efeknya juga ternyata,...”
- B : “Ada efeknya,kan? Kamu tau nggak sampe George Aditjondro itu nulis Jurnas yang dibagikan gratis di pesawat Garuda, kalo kamu naik Garuda itu Jurnas itu ada, saya pernah ke ini ke Canberra, Sidney ada Jurnas, karena Garuda nyampe di sana,kan? Di dalam pesawat disajikan Jurnas, jadi seperti itu jadi pembaca kita ya saya bilang tadi tentara keluarga tentara, mirip dengan karakter pemilih SBY juga mungkin kan banyak yang berasal dari tentara.”
- A : “Kemudian apakah dari pembaca yang tentara tersebut mempengaruhi gaya penulisan di beritanya?”
- B : “Enggak, saya aktivis GMNI, saya bukan tentara, saya nulis bebas-bebas aja cuman karena saya lagi menumpangkan hidup saya di sini ya saya berdialog dengan situasi yang ada di sini jadi nggak ada.”
- A : “Berarti bisa dibilang kalo di sini itu otomatis kamu harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sini.”
- B : “Jadi aturannya sama,ya? Cuman memang itu tadi politik pemberitaannya itu bagi yang ingin menjadi koran yang bebas ya itu sulitnya, poinnya di situ dan yaa akhirnya begitu,..eeee nggak tau kamu bisa tanyain satu-satu mereka nggak nanti? Yaa mungkin nanti jawabannya bisa dibayar lebih tinggi atau apa kan bisa aja kan? Kalo saya pribadi menjadi,...saya suka politik dan koran ini koran presiden dan *mainstream* politiknya sangat tinggi saya kerja di sini dan menurut saya,..saya setelah di Jurnas saya bisa wawancara Joseph Stiglitz waktu saya di sini, nggak tau anak Kompas pernah enggak wawancara Stiglitz, saya wawancara langsung itu sama Stiglitz, jadi bagi saya orang memandang koran politik ternyata nggak juga menurut saya tetep ya tergantung kita bisa memahami fenomena apa dalam jurnalisme itu sendiri. Kita nggak ada dipaksa untuk masuk Jurnas. Masuk jurnas kan orang nggak dipaksa kan? Masuknya juga direkrut kamu lihat di webnya, di Kompas ini baru banyak penerimaan ini orang masuk Jurnas, diseleksi, seleksinya dibuat bagus ip nya sekian dan di sini rata-rata universitas negeri rata-rata UI, UGM, IPB ya kalau swastanya ya Atma Jaya, UNPAR gitu.lho? Jadi ya kalo kerja di sini juga bukan dari kampus-kampus yang ini,..bahkan dulu ada lulusan terbaik adik kelas saya di IPB lulusan terbaik dia kerja di sini dan sekarang dia ambil kuliah di Taiwan.”

- A : “Mas, dulu di IPB?”
- B : “Ya dulu di IPB. Banyak,koq? Sekarang ada yang di NU, ada yang pindah juga ke TV One...muda-muda seperti kamu ini baru lulus kuliah masuk Jurnas, saya juga bingung koq pada mau kerja di Jurnas gimana gitu,lho?”
- A : “Buat cari pengalaman juga kali,mas?”
- B : “Pengalaman kerja dan nggak ada yang nglarang dan paksaan di sini koq enak-enak aja koq di sini. Harus milih SBY nggak ada itu,..harus milih Demokrat nggak ada!! “
- A : “Tapi beritanya harus seperti itu...”
- B : “Ya, tapi kan berita nggak harus berita Demokrat dan SBY, berita yang lainkan kita beritakan sama porsinya kan? Berita ekonomi, ada tabrakan itu,...memang untuk wilayah kebijakan pemerintah kita mengambil wilayah yang berbeda dengan yang lain, itu aja, yang lain kita sama koq. ya memang kalo untuk kebijakan itu dan kita memang memilih untuk membela itu,ya? nggak salah,kan? Dan ada yang baca juga itu.lho?”
- A : “Dulu di IPB jurusan apa,mas?”
- B : “Saya di Sosial Ekonomi”
- A : “Koq bisa jadi wartawan?”
- B : “Pemred kompas itu dulu dari IPB.lho? Pertama kalo saya, nggak pernah bermimpi jadi wartawan juga, saya selesai kuliah,...saya dari Medan, uang kiriman orang tua nggak ada saya tu kan harus mikir gimana ini? Waktu saya kuliah itu saya malas juga itu, tapi waktu saya kuliah saya bikin semacam koran/majalah independent ternyata laku kita jual, dari kost-kostan biasalah yang isinya soal petani, nelayan, orang-orang gelandangan di Bogor. Ya kita ada temen-temen dari PMKRI, GMNI ya gitu-gitu kan? Kita bikin terbitan biaya sendiri dan orang mau beli jadi ini bukan dari kampus juga. Saya juga bukan mahasiswa yang pintar, ada lamaran wartawan, ya sudah saya masukin keterima dan sekarang udah jadi wartawan.”
- A : “Jadi wartawan dulu pertama wartawan apa,mas?”
- B : “Pertama itu saya dulu wartawan di Merdeka yang sekarang menjadi Rakyat Merdeka dari Merdeka saya ke Pikiran Rakyat,...eh, itu ada wartawan juga kamu perlu wawancara nggak itu wartawan? Aku panggil,ya? “
- A : “Iya, perlu-perlu...”
- B : “Ini Fredy bekas presidium PMKRI, di sini bekas kumpulan aktivis,...kamu tanya aja..”
- A : “Nama saya Yudit,mas? Saya dari Atma Jaya, Yogya. Saya mau penelitian skripsi tentang pemberitaan pengusulan hak angket Century di Jurnas”
- D : “Ya,..”
- A : “Pos tugas liputannya di mana,mas?”
- D : “Politik, hukum keamanan dan khusus saya di DPR.”
- A : “Kalo mas Fredy melihat pengusulan hak angket secara pribadi itu bagaimana,mas?”
- D : “Dalam konteks politik, pendapat pribadi,ya?”

A : “Iya, pendapat pribadi...”

D : “Hemat saya itu menjadi sah-sah saja karena memang dijamin oleh undang-undang, angket itu bagian dari hak atau fungsi yang di,...bagian skup besar fungsi pengawasan DPR, untuk itemnya itu kan ada namanya interpelasi, hak menyatakan pendapat, hak angket dan sebagainya. Nah, kurang lebih itu, pada tingkat kebijakan itu saya kira nggak ada masalah dalam konteks penempatan regulasi,ya? Nah, ketika dikaitkan dengan fakta karena ini implikasinya pada kebijakan pemerintah, tentu saja menurut saya, semua pihak diajak juga untuk melihat secara jernih apakah gagasan usulan itu murni untuk menegakkan aturan-aturan itu tidak atau ada motif politik di balik itu menggunakan haknya yang secara konstitusi dijamin, tetapi kalo motivasinya hanya sekedar menjatuhkan rezim, saya kira publik perlu mengkritisi itu kurang lebih begitu.”

A : “Berarti, mas, melihat ada potensi untuk itu menjatuhkan rezim?”

D : “Sebuah gerakan politik tentu saja ada banyak varian, banyak motif di balik gerakan itu, ada mungkin saja melihat karena menurut pendapat dia itu salah karena itu perlu dilakukan hak dalam konteks tidak terpengaruh dan ada juga yang menumpang hak angket itu untuk gerakan politik menggulingkan rezim atau paling tidak ada posisi tertentu karena melibatkan ada pejabat yang terlibat menduduki posisi-posisi politik tertentu. Nah, itu yang tentunya saya kira harus berimbang dalam konteks pers melihat itu, jangan sekedar mengikuti wacana publik sekedar *massive*, lalu kemudian juga kalo kita perhatikan pemberitaan media secara umum itu,kan? Opini publik yang juga perlu ditelusuri track record dari orang-orang yang menggulirkan itu juga kan bermasalah ceritanya karna itu kita ini kan perimbangan supaya berita ini seimbang.”

B : “Artinya kan tiap wacana itu ada motif ekonomi dan politik di baliknya, gitu,dit? Jadi kan, sama misalnya orang membela pansus membela bailout ada motif ekonomi politiknya,kan? Sama dengan orang yang menolak kebijakan itu kan? Ada motif ekonomi politiknya di situlah peran media ada di dalam, media untuk menjelaskan,..nah kamu bisa bertanya sendiri..., nah masyarakat kan membaca apa yang disajikan media itu, masyarakat kan pasti punya nalar logika melihat itu jadi kan itu semua membuat masyarakat menjadi cerdas,kan? Kalo memang prosesnya tertentu seperti itu ya,...Jurnas mengambil pilihan berita balik lagi seperti yang telah diterangkan oleh Frederich tadi DPR mengajukan menggulirkan hak angket itu tadi kan ya pasti punya motivasi-motivasi kan,ya? Nah kalo memang ada, bisa saja motivasinya itu mencurigai adanya kekeliruan dari kebijakan itu, itu bisa aja,kan? Tapi bisa juga motivasinya memang *totally* politik, bukan untuk menjernihkan masalah, ya kalo memang menjernihkan masalah seperti yang saya bilang tadi kita nggak bisa menolak sistem ekonomi pasar dan dalam pendekatan ekonomi pasar itu setiap ada gejolak-gejolak ekonomi itu dikhawatirkan bisa merembet ke hal yang lain dan itu memang hukumnya sistem ekonomi pasar itu dia harus melakukan intervensi kan, beda halnya kalo kita melihat itu dalam kacamata ekonomi yang bukan pasar dan banyak yang berbeda memang akan sangat,...maka Hendrawan Supratikno

melihat dari terminologi yang berbeda sehingga pasti hasilnya akan berbeda. Nah...presiden, pemerintah mengambil kebijakan itu dan dia bela ya nggak salah,dong!! Memang faktanya secara politik mereka kalah di DPR itu kan fakta politik, tapi kalo kamu tanya rakyatmu di mana-mana misalnya ke desa malah nggak tau apa itu bailout Century,..bener,kan? Jadi itu bisa jadi pembelaan kami terhadap pemberitaan yang kami lakukan karena kami membela itu. Kan bisa jadi jernih kan, ya? proses,...

- A : “Terkait dengan berita Century narasumber yang paling sering ditemui itu siapa?”
- D : “Jurnas tidak pernah mengkapling ini narasumber, terbuka secara umum,ya? lintas fraksi mungkin saja dari segi ini akan melihat dari segi pemikirannya sesuai dengan posisi Jurnas tadi bagaimana melihat apakah prosesnya, apakah kebijakan atau pada tingkatan implementasi dan seorang ekonom itu otomatis yang mengerti mengenai kebijakan fiskal dan bagaimana pandangan mereka pada saat situasi ekonomi saat kebijakan itu diambil, saya kira itu menjadi suatu pertimbangan. Nah, apakah memang kebijakan bailout itu diambil situasi ekonomi dalam negeri resesi dunia, kira-kira paling tidak kebijakan bailout ini ada latar belakangnya sebelumnya. Nah, mungkin kita kan bisa mengikuti perkembangan komentar berbagai pengamat itu kan? Saat krisis itu bahkan jauh sebelum diambil bailout itu kan sejumlah pengamat yang kemudian mengkritisi itu juga waktu itu memprediksi bahwa ketika Amerika itu anjlok kondisi ekonominya bahkan mereka yang sekarang ini mengkritik kebijakan bailout ketika sudah stabil sebelumnya pernah menyatakan bahwa waaa...ini bisa bakalan terulang lagi jauh melebihi situasi tahun '98 misalnya itu coba kita lihat. Nah ketika memang terkadang dalam pemilihan narasumber ada narasumber yang memang tidak konsisten, jadi antara pernyataan dari beberapa waktu sebelumnya pada isu yang sama ada inkonsistensi komentar karena itu mungkin bisa aja hanya untuk saat itu. Kita nggak memilih untuk dia tuk diwawancara tetap ada narasumber lain misalnya.”
- B : “Termasuk inkosistensi sikap koran-koran,...”
- D : “Hahahahaha.....”(tertawa)
- B : “Kalo kamu baca Jurnas itu konsisten dia yang membela Century konsisten, coba kamu baca Kompas itu kan melompat-lompat logikanya.”
- D : “ikuti alurnya...”
- B : “Karena memang akan menjadi repot ketika koran nggak punya sikap gitu,kan? Jurnas itu konsisten soal Century nggak akan berubah. Membuat saya juga sebagai editor nggak capek, ya kita sudah jelas..dan uniknya PDIP tau Jurnas itu koran siapa tapi masih mau diwawancara,..benar nggak,bung?”
- D : “Iya,..”
- B : “Dan itu nggak ada masalah. Ya misalnya ini, saya tu pernah ditelpon sama ketua DPP PDIP, “Jan, saya mau ngomong supaya SBY tau sikap kita, kau tulis di koranmu!!” jadi nggak ada masalah..”

- A : “Seberapa besar pengaruh isu keterlibatan SBY dalam kasus Bank Century ini dalam penulisan berita?”
- D : “Kita itu antara isu politik dan hukum mestinya,...itu menurut saya wartawan tidak hanya sekedar kebijakan redaksi, wartawan di lapangan mestinya harus tau, itu harus mulai dari proses penyaringan, paling tidak memilah isu ini kadang-kadang kita tidak hanya sekedar komentar si A, sesuai dengan kepentingan, lalu ditransfer secara langsung, kita harus verifikasi apakah ada landasan hukumnya tidak kan kadang-kadang kan ketika itu kita harus *cross check* dari segi regulasinya aturan yang mendasari sebelumnya dengan situasi politik yang berkembang. Misalnya itu perlu di komparasi dalam konteks tapi lagi-lagi pertanyaan tadi untuk menjawab tentu saja menurut saya harus dilihat pada kalau isu kan lagi-lagi rumor,ya? karna kita negara hukum tentu saja kita nggak bisa men-*judge* bahwa seorang itu bersalah sebelum ada putusan hukum yang tetap, apalagi ini lagi-lagi bukan proses hukum di pengadilan. “
- B : “Politik,ya?”
- D : “Ini proses politik yang lagi-lagi kita mencurigai ada berbagai motivasi di belakang itu karena itu posisi kita dalam menulis khususnya saya di lapangan berkoordinasi dengan pimpinan misalnya, redaktur tentu saja kita tetap secara jernih melihat itu menulis itu, karena kita juga tidak ingin menggiring opini publik yang justru menyesatkan publik juga karena koran itu adalah fakta,ya? dalam hati pembaca,ya? jangan sampai juga dampak dari pemberitaan kita menyesatkan pembaca.”
- B : “Artinya pilihan Jurnas untuk menyatakan kebijakan Century itu membela kebijakan Century bukan semata-mata karena SBY nya memerintah bela itu, karena kita juga punya landasan berpikir untuk membela itu tadi,kan? Ada alasan-alasan ekonominya yang kita paparkan karena ekonom 70 % ekonom itu mendukung kebijakan Century. Apalagi pelaku pasar perbankan itu mereka malah mendukung. Nah kita lihat itu sah, kalo mereka yang sehari-hari bergelut dengan situasi-situasi ekonomi sendiri akan menyatakan itu sesuatu yang tepat, kenapa mereka yang kerjanya menyusun undang-undang memandang itu tidak tepat dan mereka nggak di denger di DPR kan? DPR mana ngasih kesempatan pelaku pasar untuk bicara? Ada nggak,bung?”
- D : “Kalo saya ikuti,ya? karena ini kasus 2008, itu artinya periode DPR 2004 – 2009”
- A : “Yang lalu berarti,ya?”
- B : “Kenapa baru sekarang diributin?”
- D : “Sekarang ini anggota DPR periode 2009-2014 ada hak historis dalam konteks keputusan lembaga meskipun orang berbeda tetapi lembaga yang memutuskan adalah tidak bisa oooo...ini periode yang lalu, tetap DPR lembaga DPR tetap. Sebagai contoh saat pengambilan keputusan waktu itu *fifty-fifty*, 4 fraksi menolak, 4 fraksi mendukung dan 2 fraksi abstain dan saat itu tidak ada keputusan tegas menolak atau tidak.”
- A : “Ini yang pas kapan,mas?”

- D : “DPR paripurna DPR,...”
- A : “Yang buat mbahas angket itu?”
- D : “Ya waktu itu kan sempet pembicaraan soal Perpu JPSK.”
- B : “Kegunaan Perpu JPSK itu landasan hukum pengambilan bailout itu, ditolak,ya? ditolak oleh DPR pada waktu itu, yang diajukan oleh presiden.”
- D : “Waktu itu tidak ada keputusannya tapi kemudian baru 2009 surat resmi dari DPR yang ditandatangani oleh Pak Agung Laksono menyatakan menolak, otomatis kebijakan selama itu kan tidak ada keputusan tegas menolak atau tidak. Nah itu posisi paripurna kalo nggak salah 12 Desember 2008.”
- B : “Harusnya DPR menyelesaikan waktu itu,dong?”
- D : “Ambigu waktu itu,...”
- B : “Mereka malah menjadikan itu,...kamu artiin sendirilah?”
- A : “Mungkin itu dijadiin senjata,...”
- B : “Yaaa... artinya kan kamu sudah bisa melihat apa yang ada di DPR tidak semata-mata,...memang ada wacana yang direkayasa juga di sana kan? Dan itu wartawan datang mengutip memberitakan makanya menjadi wartawan itu sebenarnya nggak gampang jadi wartawan itu harus orang –orang bisa menyaring persoalan kan, karena wartawan kan kerjanya kan seperti peneliti juga,kan? Dia melakukan kerja-kerja ilmiah, karena yang saya bilang tadi fakta kan nggak bisa kita rekayasa orang tabrakan nggak bisa dibilang keserempet aja kan kayak gitu? Ini kerja-kerja ilmiah verifikasi, ricek, kros cek semua harus dilakukan dan wartawan yang bener menjalankan itu. Nah, kalo akhirnya pilihannya membela century itu urusan pilihan sikap tapi untuk menyatakan kita membela itu tidak...berita itu kita kroscek bener sehingga bisa dikatakan itu kerja jurnalistik sehingga itu kita pertanggungjawabkan di Jurnal Nasional sampai saat ini nggak ada yang protes itu dan itu menjadi ukuran bahwa kita menjalankan itu.”
- D : “Nggak ada yang dapet somasi juga,...”
- B : “Dan di wartawan nggak ada itu di kepalanya ketika mau wawancara orang PDIP waduh SBY, nggak ada itu! Berita yang wawancara aja itu. SBY juga presiden Indonesia, presiden kepala negara koq..nggak ada masalah juga bela kepala negara koq, kita bela bukan karena di ketua Demokrat,kan? Jadi ya..kita punya alasan-alasan...”
- A : “Sudah berapa tahun di Jurnas,mas?”
- D : “2006, November jadi mau jalan 4 tahun, November ini 4 tahun.”
- B : “Kita mau ulang tahun ini 1 Juni 2010 ulang tahun yang ke 4, usianya masih muda tapi dah bikin rame Indonesia.”
- D : “Tadi barusan saya dari Kuala Lumpur naik pesawat di sana ada Jurnas di pesawat.”
- B : “Di Garuda ada, saya nggak bohong,kan? Kamu keliling dunia di Garuda itu ada Jurnas ke Eropa ke Afrika. Nggak tau Kompas ada nggak tadi?”
- D : “Nggak ada yang ada tu hanya Jurnas dengan Straight Times”
- B : “Straight Times Singapore,ya? bergengsi juga kita,ya?”

- D : “Hanya dua tadi koran.”
- B : “Apa,ya? saya mau ngomong apa lagi,ya? soal...ya itu tadi,ya? nggak bisa ya, dan hukumnya pers itu kan nggak bisa dimanipulasi hukumnya jurnalistik itu kan nggak bisa direkayasa karena jurnalistik sendiri itu kan ingin membuktikan sesuatu berdasarkan apa adanya,kan? Dia nggak akan bisa di ini,..maksudnya Jurnas melakukan rekayasa,..nggak akan bisa gitu.lho?”
- A : “tapi memilih bisa.”
- B : “Memilih bisa dan kamu nggak bisa memanipulasi pembaca karena pembac,..Jurnas memberitakan begini-begini koran lain,kan? Memberitakan juga kan?”
- D : “Ada penyeimbang.”
- B : “Penyeimbang, jadi kita nggak bisa membohongi orang yang baca gitu.lho? tapi kita memilih ini ada argumentasi yang kita paparkan itu bisa, tapi itu bukan melakukan penggiringan-penggiringan enggak, kita memilih jalan ada kiri kanan.”
- D : “Mungkin juga kalau perhatikan konten Jurnas tidak hanya soal sikapnya tetapi juga narasumber, tidak pernah pakai sumber anonim, menurut sumber yang tidak mau disebutkan namanya.”
- B : “Pake nama,ya?”
- A : “Tapi kemarin ada narasumber Partai Demokrat yang enggan disebutkan namanya.”
- B : “Halaman berapa?”
- A : “Halaman Politik Hukum dan Keamanan.”
- B : “Halaman politik,ya? bukan halaman satu pastinya..bukan Bung Frederick yang nulis juga pastinya.”
- D : “Tapi seingat saya nggak pernah..”
- B : “Coba lihat,..coba lihat...”
- D : “Seingat saya memang nggak pernah menulis itu dan posisi Jurnas memang nggak pernah pake itu, coba tanggal berapa?”
- A : “Ini fotokopian dari sini,..yang waktu...”
- D : “Rhama Deny, 1 Desember 2009”
- B : “Rhama Deny ,...hihihiii “(ketawa..)”
- A : (membaca korannya) “Sementara itu salah seorang di internal Partai Demokrat yang enggan disebutkan namanya..”
- B : “Kecolongan berarti itu..”
- D : “Ya kecolongan, tapi seingat saya sejak awal kita itu memang nggak pakai,..”
- B : “Sumber Kompas, Tempo, ...”
- D : “Harus jelas siapa namanya dan jabatannya yang memberikan komentar, artinya ini juga untuk menghindari apa ini kepentingan pers untuk menggiring opini bertopang di balik menurut sumber itu juga perlu ini bagian dari akuntabilitas.”
- B : “Ini yang kayak kasus Raymon itu,kan? Yg menggugat tujuh media itu,kan?”
- A : “Yang salah satunya media online itu ya,mas?”

B&D: “Ya, itu salah satunya.”

D : “Trus juga soal kayak kasus TV One, ya? Markus palsu.”

B : “Kita masih punya integritaslah orang-orangnya”

A : “Meskipun tadi itu, ...”

B : “Ya itu kan pilihan sikapnya, ya? kan nggak salah bersikap.”

A : “Iya nggak salah.”

B : “Daripada nggak bersikap sama sekali kan repot itu.”

A : “Mas Fredy sebelum di Jurnas di koran apa?”

D : “Saya itu koresponden ada satu tabloid di Kupang, trus saya bekerja di semacam lembaga swadaya masyarakat di lebih banyak masalah advokasi masalah HAM Timor Timur, trus setelah di Jakarta 2004-2006, saya aktif di ormas PMKRI karena itu saya berkesempatan untuk berkomunikasi dengan teman-teman aktivis yang lain seperti HMI, PMI, GMNI, IBNU, IPPNU dan temen-temen yang lainlah kayak IMM dari situ baru masuk Jurnas.”

A : “Kalo kuliahnya dulu?”

D : “Saya dulu di Kupang di Undana, Universitas Cendana.”

A : “Fakultas?”

D : “FISIP, jurusan Sosiologi.”

B : “Sosiologi, ya?”

A : “Kalo rapat redaksi itu semua wartawan dateng gak, mas?”

B : “Enggak, yang dateng redaktur, redpel, wapimred, pimred.”

A : “Kalo dari rapat itu baru ntar koordinasi masalahnya apa?”

B : “Oh... enggak jadi rapat redaksi itu membawa apa yang sudah dilaporkan oleh reporter, kan? Kan mereka sejak pagi sudah melaporkan apa yang didapat, jadi kalo rapat redaksi ya kita diskusikan, ..apa ini? listing semua desk, iya kan? Kemudian kita pertandingkan mana yang kira-kira kuat untuk kita jual tapi tetep prosesnya seperti itu.”

D : “Kalo perhatikan mulai Maret 2010 dari segi konten dan wajahnya itu isinya itu , posisinya itu.”

B : “Apalagi nanti sejak 3 Juni logo kita berubah, nanti kita punya *news room*, kita akan rekrut sekitar 30 wartwan/reporter. Nanti...kita akan buat *news room* nanti. *News room* itu kayak model koran sekarang kan, jadi nanti berita yang nanti dicetak perkembangan dari news room itu aja reporter melaporkan 55:40 yang muncul apa nanti tinggal pendalaman dari berita-berita yang ada di *news room*. Jurnas juga sedang beranjak ke situ, kantor ini akan pindah ke Menteng sebentar lagi mudah-mudahan kita akan punya gedung sendiri juga.

A : “Ini gedung siapa, mas?”

B : “Gedungnya? nyewa.”

A : “Kalo nggak salah di halaman pertama dulu ada kolom Fokus Hari ini.”

B : “Ya betul, sekarang tinggal Fokus, ya?”

A : “Itu dulu beritanya SBY ngomong di kasih situ gitu?”

B : “Ya, memang saya bilang tadi pemimpinya kan berubah, memang begitu, dulu..ya dulu kan memang pemimpin redaksi punya kebijakan seperti itu kan?”



Tapi sekarang kita kan lebih umum apa saja bisa kita munculkan itu akan dihapus koq fokusnya karena sudah nggak menarik juga.”

**Wawancara via email pertama  
dengan redaktur halaman 1 SKH Jurnal Nasional,  
Jan Prince Permata tanggal 25 Mei 2010**

- A : Dalam sehari rapat redaksi di Jurnal Nasional itu diadakan berapa kali? Pihak yang wajib manghadiri rapat redaksi siapa aja? Pihak mengambil keputusan dalam rapat redaksi itu siapa? Yang biasanya mimpin rapat redaksi itu siapa?
- B : Rapat redaksi dalam sehari biasanya kita lakukan dua kali. Pertama, pukul 13.00, yang diikuti oleh seluruh redaktur, redaktur pelaksana, wakil pemimpin redaksi, pemimpin redaksi, sekretaris redaksi, foto, litbang, dan desain/grafis. Ini untuk membahas tema-tema apa yang akan kita turunkan di halaman depan, dan halaman lainnya. Rapat biasanya dipimpin pemimpin redaksi, atau wakil pemimpin redaksi. Jika keduanya berhalangan, akan dipimpin redaktur pelaksana. Keputusan rapat diambil bersama berdasarkan musyawarah dan perdebatan-perdebatan tentunya. Dasarnya berita yang kuat yang kita utamakan. Rapat kedua biasanya dilakukan sekitar pukul 18.00, untuk mematangkan berita halaman 1. Biasanya Cuma diikuti Pemred, Wapemred, Redpel dan redaktur halaman 1.
- A : Sebelum melakukan suatu peliputan, apakah wartawan mendapat pengarahan? Kalo iya, siapa yang mengarahkan dan bagaimana mengarahkannya?
- B : Wartawan pasti mendapat pengarahan sebelum meliput esok hari. Yang memberikan pengarahan, atasannya masing-masing, yaitu para redaktur berdasarkan desk yang ada, politik, hukum, keamanan, ekonomi, sosial, budaya. Cara mengarahkannya ya berdiskusi tentang poin-poin utama yang dikejar ke nara sumber dan pengembangan-pengembangannya.
- A : Dalam proses pemilihan berita, apakah pernah ada kasus mengenai pengemasan berita tertentu yang ternyata kurang sesuai dengan yang diinginkan oleh pimred, sehingga terpaksa harus diubah kembali oleh redaktur?
- B : Soal proses produksi berita, soal berita yang tak sesuai dengan harapan memang wajar terjadi. Bukan hanya tak sesuai harapan Pemred, tapi terkadang berita yang sudah kita rapatkan secara kolektif, hasilnya bisa saja tak sesuai dengan harapan. Data-data, fakta-fakta yang terkumpul tak lengkap, tak akurat, hal jamak terjadi. Jadi, tak tertentu berdasarkan keinginan Pemred seperti itu, tapi memang berita yang tak sesuai harapan harus selalu kita sempurnakan. Jika hari ini tak bisa, ke esokan harinya bisa diperdalam lagi.
- A : Surat pembaca yang sering masuk ke Jurnal Nasional itu mengenai apa? (kemarin kurang jelas di rekaman) Penanggung jawab surat pembaca Jurnal Nasional, namanya siapa?

- B : Surat pembaca yang masuk itu banyak kategorinya, politik, hukum, keamanan, sosial, budaya, pelayanan publik, pertahanan dan lainnya. Bisa kejadian yang dialami masyarakat, komplain pelayanan bank, atau fasilitas publik, ya, sangat beragam. Penanggung jawabnya Very Herdiman. Kalau yang paling sering itu dan intensitasnya tinggi soal politik dan apresiasi atau dukungan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, program pro-rakyat.
- A : Mengenai posisi dari Anas Urbaningrum sebagai redaktur ahli yang berada dalam jajaran redaksi? Job desk nya dia di Jurnal Nasional ?
- B : Anas Urbaningrum itu kalau saya tidak salah menjadi redaktur ahli sejak tahun 2008, akhir. Dia dulu punya kolom setiap hari Jumat di halaman 1. Nama kolomnya Sudut Pandang. Namun dia, sejak terpilih menjadi anggota DPR berhenti menulis, dan itu juga merupakan kesepakatan dengan Jurnas. Redaktur ahlinya tak terlalu efektif berfungsi, dan saat ini komunikasi dengan redaksi juga berhenti. Tulisan-tulisan Anas di Sudut Pandang, seputar Politik.

**Wawancara via email kedua  
dengan redaktur halaman 1 SKH Jurnal Nasional,  
Jan Prince Permata tanggal 6 Juni 2010**

Pertanyaan

Sebagai redaktur halaman satu hal apa yang mendasari pemuatan berita pengusulan hak angket di halaman satu? Dari data saya tercatat tanggal 13-15 November 2009, berita mengenai pengusulan hak angket di muat pada halaman satu, kemudian seberapa pentingkah berita ini? dalam teks berita tampak memang jurnas memberikan porsi yang cukup besar kepada Partai demokat, apakah hal ini memang dikarenakan latar belakang dan ideologinya tadi,ya?

Jawaban

Usul hak angket kami pandang perlu karena dua hal. Pertama, usul hak angket yang dimunculkan DPR selalu akan memberi dampak politik besar. Kedua, dalam kasus Bank Century, sejak awal Jurnas memandang kebijakan itu benar, sehingga bagi kami segala sesuatu terkait isu ini menjadi penting untuk kami beritakan, dan akan kami tempatkan pada posisi lebih dibanding berita-berita lainnya.

Pertanyaan

Dalam proses penulisan maupun penyuntingan berita mengenai hak angket seberapa besar celah untuk menerapkan prinsip cover both side dalam teks berita tersebut? karena saya melihat dalam berita-berita yang ditulis khususnya mengenai hak angket, prinsip ini seperti dikesampingkan,ya? karena saya jarang melihat inisiator dari hak angket memberikan pandangan maupun gagasannya, terutama pada berita berjudul Demokrat : Usul Angket Century Terburu-buru (halaman satu, edisi 13 November 2009)

dan Proses Angket Century Masih Panjang (halaman satu, edisi 15 November 2009) dan hal yang utama adalah wacana dari Partai Demokrat.

Jawaban

Prinsip *cover both side* selalu saja kamu utamakan. Ini hal yang tak bisa ditinggalkan dalam pers. Saya akui terkadang, apa yang kami tampilkan di halaman depan, kerap mendapat editing dari mereka yang di atas saya. Misalnya, wakil pemimpin redaksi. Jadi hasil editan saya, biasanya diedit kembali. Nah, untuk kasus Century, hal-hal seperti ini terkadang terjadi. Soal nara sumber yang diambil, umumnya reporter bekerja seperti biasa, dan prinsip *cover both side* tetap dijalankan. Perubahannya biasanya ada pada tingkat *editing*.

Pertanyaan

Andakan sudah tahu dan bisa melihat sisi positif dari Presiden SBY dan Partai Demokrat melalui berita – berita yang anda tulis atau edit, berikut sikap-sikap dari Jurnal Nasional

sendiri, bahkan bobroknya DPR terlihat ketika kemarin kita membahas mengenai perpu JSPK yang sampai sekarang ternyata tidak jelas, kemudian apakah dengan cara padang yang sudah terbiasa melihat sisi positif dari pemerintah, maka apakah secara pribadi anda kemudian akan mendukung kebijakan dari Presiden dan Partai Demokrat?

Jawaban

Saya umumnya melihat kebijakan SBY itu memiliki sisi positif untuk kepentingan bangsa. Namun, tidak berarti saya setuju dengan semua kebijakan SBY. Misalnya, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bagi saya BLT bukanlah kebijakan yang tepat untuk membantu mereka yang terpinggirkan, karena yang diperlukan oleh orang miskin atau mereka yang terpinggirkan lainnya adalah bagaimana agar mereka mampu menolong dirinya sendiri dan mandiri, dan bukan dimanjakan dengan BLT, apalagi kesadaran kaum miskin dimanipulasi karena sulitnya tekanan hidup yang mereka rasakan. Tapi Jurnas mendukung kebijakan itu, sehingga dalam kerja tentu saya harus mengikuti sikap Jurnas, meski saya tak setuju. Dan untuk hal-hal lain juga sering terjadi kondisi yang sama. Soal Demokrat, saya bukan anggota partai Demokrat, bukan juga simpatisan Demokrat saat ini, jadi biasa saja. Saya merasa tak memiliki ikatan dengan partai ini untuk saat ini.

Pertanyaan

Kapan pergantian pemimpin redaksi terjadi?

Jawaban

Pergantian pemimpin redaksi Jurnas itu dari Ramadhan Pohan ke Asro Kamal Rokan sekitar Maret 2010

Pertanyaan via email tanggal 7 Juni 2010

Bagaimana dengan kebijakan *bailout* Bank Century yang dilakukan oleh pemerintah?

Jawaban

Kebijakan penyelamatan century saya setuju, karena itu upaya untuk mencegah dampak century ke bank-bank lain dan perekonomian nasional. Para ekonom menyebutnya dampak sistemik. Ini kan prosedur baku penyelamatan ekonomi. Persoalannya mungkin ada di masalah komunikasi dalam pengambilan keputusan yang dipersoalkan DPR, dan belakangan mantan wapres Jusuf Kalla, dan lebih jauh lagi soal debat dasar hukum apa yang digunakan dalam pengambilan keputusan itu yang berujung pada hak angket DPR. Saya pribadi setuju penyelamatan itu dan ada baiknya untuk memahaminya kita berpikir dari sisi ekonomian baru kemudian dilihat dari sisi politik. Poinnya adalah diperlukan ke depan semacam kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif langkah-langkah cepat apa yang diambil untuk penyelamatan ekonomi dalam situasi emergency. Namun soal pelanggaran, manipulasi pelaku perbankan di Century juga harus diusut total.

**Wawancara via email dengan  
wartawan Jurnal Nasional Friederich Batari, tanggal 6 Juni 2010**

Pertanyaan

Menurut mas Fredy secara pribadi, apakah perlu menunggu Audit BPK untuk mengesahkan penggunaan hak angket kasus Bank Century ini? Sebenarnya, seberapa pentingnya Audit BPK tersebut?

Jawaban

Saya berpendapat DPR RI dapat menggunakan hak angket terhadap suatu kebijakan yang diduga bermasalah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa menunggu hasil audit BPK RI. Dalam kasus bank Century, misalnya, hasil audit BPK RI itu hanya sebagai informasi awal yang memperkuat dugaan DPR bahwa kebijakan bailout Bank Century itu bermasalah. Dalam Pasal 77 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau disingkat UU MD3 menyebutkan, "Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan."

Sedangkan pada Pasal 77 ayat (1), menyebutkan, DPR mempunyai hak: a. interpelasi; b. angket; dan c. menyatakan pendapat. Saya perlu menambahkan, bahwa DPR pernah menggunakan hak angket dalam kasus buloggate di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tahun 2001.

Waktu itu, DPR merekomendasikan bahwa Presiden Gus Dur bersalah sehingga dilanjutkan pada upaya pemakzulan (impeachment). Padahal Presiden Gus Dur tidak pernah diproses secara hukum dan tidak pernah dinyatakan terbukti bersalah secara hukum. Artinya, penilaian DPR itu (bersalah atau tidak) lebih bersifat politis. Bukan proses hukum. Mestinya, pemakzulan kepada presiden dan atau wakil presiden harus terlebih dahulu dinyatakan bersalah secara hukum berdasarkan putusan pengadilan yang sah. Hal ini penting dalam negara yang menganut negara hukum.

#### Pertanyaan

Bagaimana komentar mas Fredy mengenai narsum Mukhamad Misbakhum, salah seorang dari pengusul hak angket yang sekarang dia ditahan karena diduga menerima surat kredit impor L/C dari Bank Century senilai US \$ 22,5 juta pada tahun 2007? Apakah ini salah satu dari bentuk inkonsistensi narasumber yang kemarin kita bahas? Hal apa yang mendasari pemilihan dia menjadi narasumber dalam teks berita “Usulan Angket Century Tak Perlu Disikapi Berlebihan” (rubrik Politik Hukum Keamanan edisi 16 November 2009)?

#### Jawaban

Komentar/pendapat M Misbakhum dan kemudian dimuat di Harian Jurnal Nasional (edisi 16 November 2009), menurut saya, pendapat M Misbakhum itu baik dalam rangka mendorong demokrasi ---sekurang-kurangnya--- Misbakhum mempunyai argumentasi dalam merespons wacana pengajuan usul hak angket terhadap kebijakan bailout Bank Century. Misbakhum tidak hanya dianggap berani berbeda pendapat dengan Fraksi Partai Demokrat (yang sama-sama berada dalam koalisi di pemerintahan) tetapi pendapat M Misbakhum---saat itu---bisa diterima secara akal sehat. Menurut saya, sepatutnya media massa dalam pemberitaannya mewadahi aspirasi/pendapat yang berbeda apalagi pendapat tersebut bisa logis. Meskipun belakangan baru diketahui bahwa Misbakhum, salah seorang dari inisiator usul hak angket itu, juga tersangkut kasus surat kredit import L/C dari Bank Century senilai \$ 22,5 juta pada tahun 2007. Sekali lagi, saya menjelaskan bahwa M Misbakhum saat diwawacarai Jurnas dan dimuat pada edisi 16 November 2009, belum terungkap keterlibatannya dalam kasus surat kredit impor L/C dari Bank Century senilai US \$ 22,5 juta pada tahun 2007. Dalam berita tersebut M Misbakhum menanggapi politisi Partai Demokrat, yang beranggapan bahwa pengajuan hak angket terhadap bailout bank Century sebagai sesuatu yang terburu-buru. Perhatikan salah satu bagian dari komentar M Misbakhum yang dimuat Jurnal Nasional edisi 16 November 2009, sebagai berikut: “meski aroma politik begitu kuat di balik pengajuan hak angket skandal Century, namun upaya DPR untuk menyelidiki dana talangan atau bailout Bank Century tidak perlu

disikapi berlebihan. Pasalnya, usulan hak angket Century merupakan mekanisme demokratis yang ditempuh DPR dalam upaya mengakomodasi aspirasi publik.”

Dilanjutkan dengan kutipan atas pernyataannya: “Pengajuan usulan hak angket Bank Century dimaksudkan agar talangan dana ke Bank Century bisa transparan,” kata Mukhammad Misbakhum, Minggu (15/11). (Berita selengkapnya, silakan dibaca). Komentar M Misbakhum ini menarik karena menanggapi komentar dari politisi Partai Demokrat yaitu Ketua Fraksi PD DPR Anas Urbaningrum. (Lihat: beritanya secara utuh).

#### Pertanyaan

Adakah rutinitas organisasi dari Jurnal Nasional yang mempengaruhi mas Fredy dalam menuliskan berita terutama berita yang menyangkut ttg pengusulan hak angket ini?

#### Jawaban

Tidak ada (intervensi). Pimpinan Jurnal Nasional tidak mengintervensi saya dalam menulis berita. Biasanya saya selalu berkoordinasi dengan Redaktur, misalnya Redaktur halaman Politik, Hukum dan Keamanan atau Redaktur halaman muka (halaman 1). Ada juga berita yang saya tulis tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan redaktur. Biasanya peristiwa/kegiatan yang ada di DPR sudah dipertimbangkan mana yang memiliki nilai berita---utamanya--- berdampak pada kepentingan publik. Misalnya, kasus korupsi, suap, pembahasan sebuah Rancangan Undang-Undang, dan lain sebagainya. Tentu saja, berita yang ditulis selalu memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik.

#### Pertanyaan

Andakan sudah tahu dan bisa melihat sisi positif dari Presiden SBY dan Partai Demokrat melalui berita-berita yang Anda tulis, berikut sikap-sikap dari Jurnal Nasional sendiri, bahkan bobroknnya DPR terlihat ketika kemarin kita membahas mengenai Perppu JSPK yang sampai sekarang ternyata tidak jelas, kemudian apakah dengan cara pandang yang sudah terbiasa melihat sisi positif dari pemerintah, maka apakah secara pribadi anda kemudian akan mendukung kebijakan dari Presiden dan Partai Demokrat?

#### Jawaban

Harian Jurnal Nasional dalam pemberitaannya menganut Jurnalisme Positif. Hal ini agak berbeda dengan kebanyakan media massa yang menganggap bahwa bad news is good news. Jurnal Nasional menganggap bahwa sesuatu yang baik juga merupakan berita yang baik: good news is good news. Namun, tidak berarti semua berita yang ditulis Jurnal Nasional hanya berkaitan dengan hal-hal positif atau sisi baik dari pemerintah. Jurnal Nasional juga melakukan koreksi/kritik dari kebijakan yang dianggap

tidak memihak bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara. Misalnya, saya menulis berita terkait permasalahan minimnya anggota DPR yang hadir dalam rapat-rapat Komisi atau Rapat Paripurna DPR. Menurut saya, ini penting ditulis dan diketahui publik karena anggota DPR itu digaji dari uang rakyat, sementara mereka tidak menjalankan tugasnya secara baik. Jurnal Nasional juga memuat berita yang mengkritik departemen/kementerian (atau Menteri/Dirjen dan pejabat negara lainnya) sembari memberikan solusi manakala kementerian/departemen/ pejabat publik itu lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.



